



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERSEPSI GURU TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KABIJAKAN  
PENYELENGGARAAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF  
INTERNASIONAL  
DI SMPN 1 KOTA SERANG BANTEN**

**TESIS**

**DIANA HERAWATI**

**0906589072**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI  
JAKARTA  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERSEPSI GURU TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KABIJAKAN  
PENYELENGGARAAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF  
INTERNASIONAL  
DI SMPN 1 KOTA SERANG BANTEN**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Administrasi**

**DIANA HERAWATI**

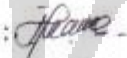
**0906589072**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI  
JAKARTA  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan benar.

Nama : Diana Herawati  
NPM : 0906589072

Tanda Tangan :   
Tanggal : 03 Juli 2012

## LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Diana Herawati

NPM : 0906589072

Judul Tesis : Persepsi Guru Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi  
Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rintisan Sekolah  
Bertaraf Internasional di SMPN 1 Serang, Banten

Telah disetujui,

Pembimbing



(Dr. Amy Y.S. Rahayu, M.Si)

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Diana Herawati

NPM : 0906589072

Program Studi : Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan.

Judul Tesis : Persepsi Guru Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di SMPN 1 Serang, Banten

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Administration pada Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA

Pembimbing : Dr. Amy Y.S. Rahayu, M.Si

Penguji : Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.,Sc.

Sekretaris Sidang : Lina Miftahul Jannah, M.Si

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juli 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Herawati  
NPM : 0906589072  
Program Studi : Ilmu Administrasi  
Kekhususan : Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Tesis

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya berjudul:

“ Persepsi Guru Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di SMPN 1 Serang, Banten ”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama masih tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 03 Juli 2012  
Yang menyatakan



(Diana Herawati)

## ABSTRAK

Nama : Diana Herawati  
Program Studi : Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan  
Judul Tesis : Persepsi Guru Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di SMPN 1 Serang, Banten

Penelitian ini mengenai Persepsi Guru Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Penelitian yang dilakukan Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Serang, Provinsi Banten. Penelitian ini mengkaji secara mendalam dan terperinci tentang factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis implementasi Kebijakan adalah model George C. Edwards III. Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah perpaduan (*mix*) antara kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi atau sosialisasi dan sumberdaya manusia belum mendukung untuk pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf internasional Pada dimensi struktur birokrasi artinya bahwa struktur birokrasi sudah memadai.

Kata kunci : Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, Kebijakan publik.

## ABSTRACT

Name : Diana Herawati  
Study program : Specificity of Administration and Educational Policy  
Thesis title : Teacher Perceptions of Factors that Affecting the Implementation of Pioneering International Standart School Policy in SMP Negeri 1 Serang, Banten Province

The research is about teacher perceptions of factors that affecting the implementation of pioneering international standart school policy. This research located in SMP Negeri 1 Serang, Banten Province. The purpose is to examine the factors that influence the implementation of pioneering international standart school policy both in depth and detail. The research is analyzed by using George C. Edwards III Implementation Policy Model. This model explains that there are four variables that play an important role in achieving a successful implementation, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The method of this reseach used both of quantitative and qualitative. The results showed that the factor of communication or socialization and human resources not support to the implementation of pioneering international standart school policy in the dimensions of bureaucratic structure which means that bureaucratic structure is adequate.

Key words: Pioneering International Standart School, Public Policy.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat, Taufik, Hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, baik masa perkuliahan, saat penelitian dan saat penyusunan tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan hanya oleh diri sendiri. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
3. Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA., Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.,Sc. dan Lina Miftahul Jannah, M.Si. selaku Tim Penguji.
4. Dr. Amy Y.S. Rahayu, M.Si, selaku pembimbing yang telah memberi banyak masukan, saran dan dorongan motivasi sehingga selesainya tesis ini.
5. Bapak Dr. Didik Suhardi, selaku Direktur Sekolah Menengah Pertama.
6. Kepala Sekola Menengah Pertama Negeri 1 Serang, Banten yang telah membantu dan mendukung serta mengizinkan penulis melakukan penelitian di sekolah ini.
7. Suamiku dan anak-anakku tercinta Sarah Ardiana Saputri dan Fadia Ammara Ardiana, terima kasih untuk semua dukungan dan cinta tulus kalian.
8. Kakakku Budiarti Ismail, SH. yang telah banyak memberikan perhatian dan sayangnya.
9. Teman-teman di Direktorat PSMP yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.
10. Teman-temanku semua, angkatan II pendidikan
11. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

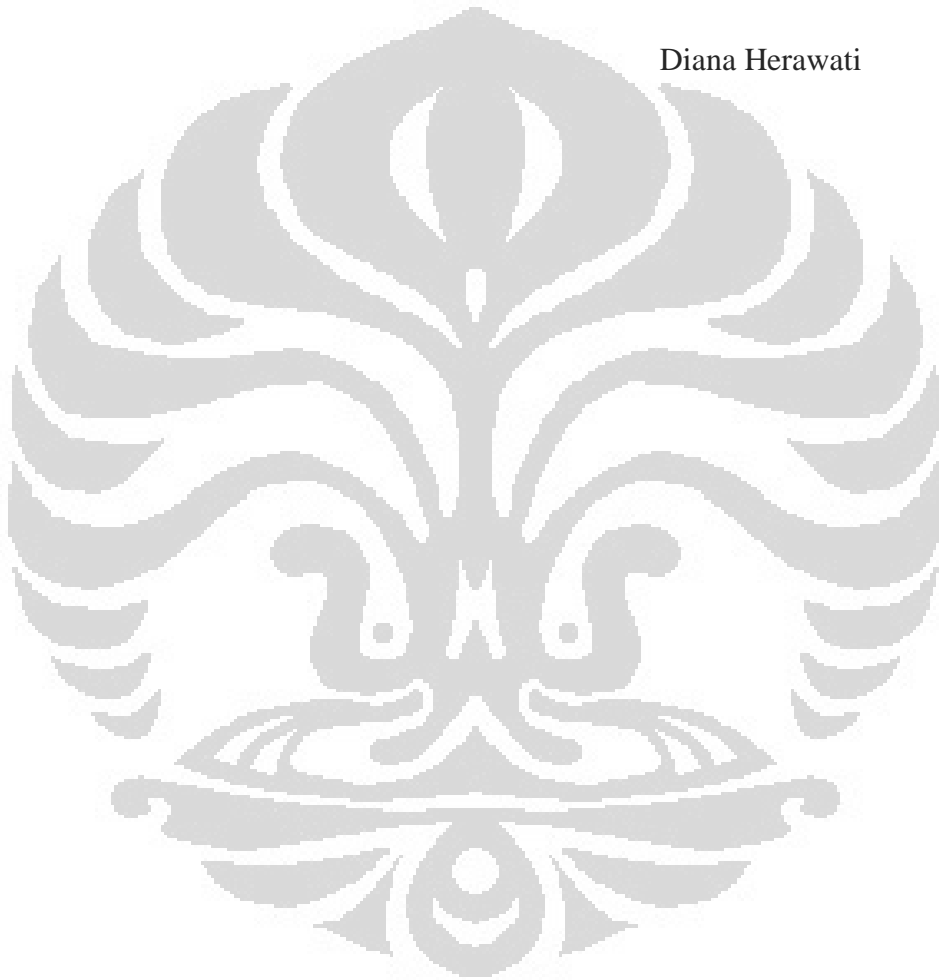
Dengan penuh kerendahan hati, selanjutnya dengan rasa hormat tesis ini penulis sajikan dan berharap agar dapat menambah wawasan mengenai rintisan sekolah bertaraf internasional serta memberikan manfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya karena kurangnya pengalaman, wawasan dan pengetahuan yang

dimiliki. Dengan penuh rasa hormat penulis mengharapkan saran ataupun tanggapan dalam penyempurnaan tesis ini sehingga dapat lebih sempurna.

Jakarta, Juli 2011

Penulis,

Diana Herawati



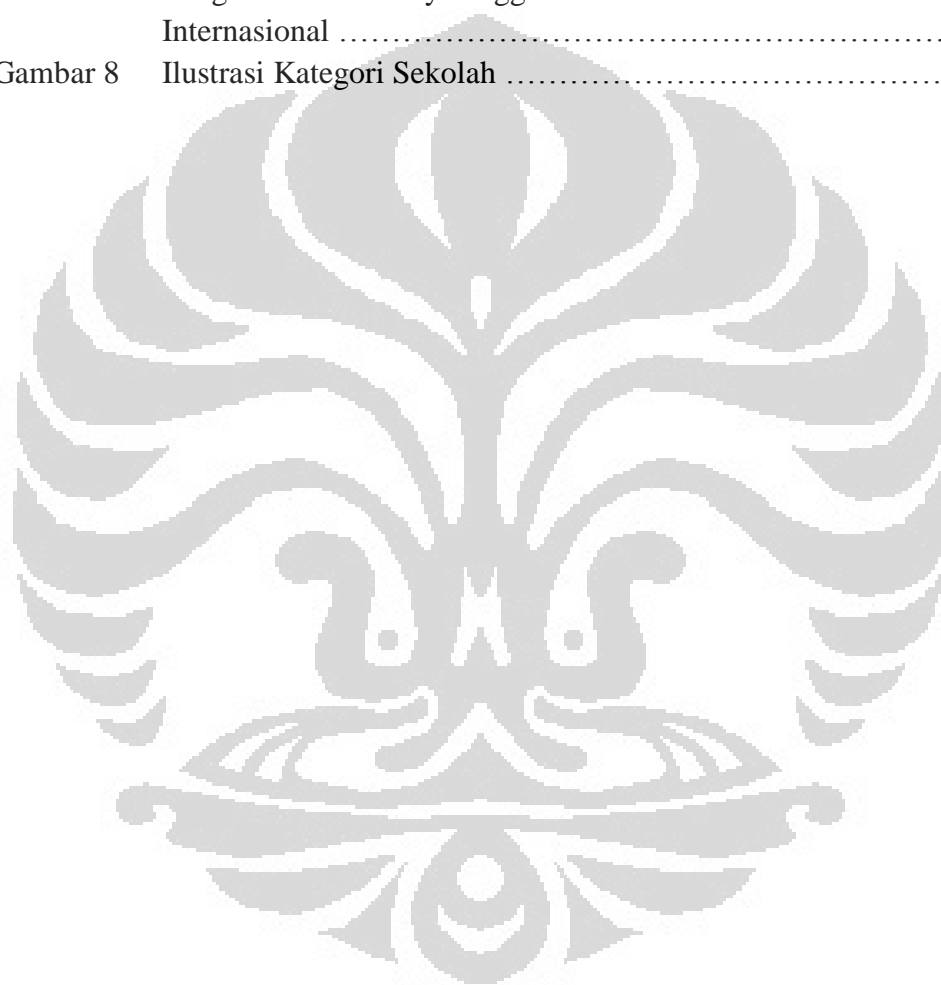
## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i    |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....  | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....  | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | iv   |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS<br>AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | v    |
| ABSTRAK .....  | vi   |
| KATA PENGANTAR .....   | viii |
| DAFTAR ISI .....   | x    |
| DAFTAR GAMBAR .....  | xii  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....   | 1    |
| 1.2 Pokok Masalah .....  | 9    |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....  | 9    |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....   | 9    |
| 1.5 Sistematika Penulisan .....  | 10   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....   | 11   |
| 2.1 Kebijakan Publik .....   | 11   |
| 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik .....  | 11   |
| 2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik .....  | 14   |
| 2.1.3 Model Implementasi Kebijakan Publik.....                                     | 15   |
| 2.2 Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.                       | 26   |
| 2.3 Hasil Penelitian Terdahulu .....   | 36   |
| 2.4 Operasional Konsep .....   | 40   |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....   | 49   |
| 3.1 Pendekatan Penelitian .....  | 49   |
| 3.2 Metode Pengumpulan Data.....   | 49   |

|           |   |     |
|-----------|---|-----|
| 3.2.1     | Kuantitatif .....   | 49  |
| 3.2.2     | Kualitatif .....  | 50  |
| BAB IV    | GAMBARAN PENYELENGGARAAN RINTISAN SEKOLAH<br>BERTARAF INTERNASIONAL | 52  |
| 4.1       | Profil Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional .....                | 52  |
| 4.2       | Profil SMPN 1 Serang .....  | 62  |
| BAB V     | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN                                     | 72  |
| 5.1       | Deskripsi dan Analisis Data Kuantitatif .....                       | 72  |
| 5.2       | Deskripsi dan Analisis Data Kuantitatif Komunikasi .....            | 73  |
| 5.3       | Deskripsi dan Analisis Data Kuantitatif Sumberdaya .....            | 93  |
| 5.4       | Deskripsi dan Analisis Data Kuantitatif Disposisi .....             | 105 |
| 5.5       | Deskripsi dan Analisis Data Kuantitatif Struktur Birokrasi.         | 109 |
| BAB VI    | SIMPULAN DAN SARAN  | 115 |
| A.        | Kesimpulan .....  | 115 |
| B.        | Saran .....   | 116 |
| REFERENSI | .....   | 117 |

## DAFTAR GAMBAR

|          |  |    |
|----------|--|----|
| Gambar 1 | Skor IKKT dan IKKM .....   | 7  |
| Gambar 2 | Alur Proses Kebijakan Publik .....   | 12 |
| Gambar 3 | Proses Kebijakan Publik menurut Dunn .....                                 | 12 |
| Gambar 4 | Pengaruh Elemen-elemen dalam Implementasi .....                            | 15 |
| Gambar 5 | Proses Komunikasi menurut Bovee dan Jhon V. Thil .....                     | 16 |
| Gambar 6 | Model komunikasi Lasswell .....  | 17 |
| Gambar 7 | Langkah Awal Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ..... | 37 |
| Gambar 8 | Ilustrasi Kategori Sekolah .....   | 55 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pada bab ini, membahas tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Era globalisasi merupakan era perubahan besar dalam kehidupan umat manusia, masyarakat era globalisasi merupakan suatu masyarakat transisi. Bagi Indonesia hal tersebut berupa perubahan dari masyarakat yang berdasarkan kehidupan agraris menuju kepada suatu masyarakat industri dan informasi dengan pola-pola kehidupan yang berbeda. Globalisasi menurut Muhamad Ali (2009) dapat dipandang sebagai suatu proses yang membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain. Berbagai analisis para ahli mengidentifikasi empat kekuatan global, yaitu: kemajuan IPTEK terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, perdagangan bebas, kerjasama regional dan internasional, serta meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia (Tilaar, 1998).

Era globalisasi yang terbuka dan kompetitif, memerlukan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang prima. Namun sampai saat ini pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia masih rendah, dapat terlihat dari peringkat Indonesia pada *Medium Human Development* atau berada pada peringkat tengah. Indikasi lain ketertinggalan Indonesia khususnya bidang teknologi sebagaimana dikemukakan dalam *Technology Achievement Index*, Indonesia berada pada kelompok ketiga, yaitu kumpulan Negara yang hanya mampu sedikit mengadopsi teknologi dan belum sampai tahap implementasi secara luas. (Zuhal, 2008: 45).

Sumber daya manusia yang berkualitas hanya dapat dihasilkan oleh sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan memiliki daya saing kuat. Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) dan pendidikan memegang peran penting dalam proses pembangunan bangsa. Itu sebabnya, peningkatan kualitas pendidikan

merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas SDM itu sendiri (Forum Wartawan Peduli Pendidikan, 2006). Manusia masa depan adalah manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta tangguh dalam menghadapi erosi nilai-nilai dan agama atau iman dan taqwa (Imtaq). Apabila pendidikan nasional ternyata merupakan sarana yang strategis untuk mewujudkan manusia yang siap menghadapi era globalisasi, maka sewajarnya apabila di dalam pembangunan nasional mendapatkan prioritas dan pengalokasian sumber-sumber yang memadai.

Oleh karena itu, dalam rangka merespon tuntutan global dan dalam upaya peningkatan mutu, efisiensi, relevansi, dan peningkatan daya saing secara nasional dan sekaligus internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, maka salah satu upaya pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 50 menyatakan bahwa: ayat (3) “ Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah yang bertaraf internasional”.

Berkaitan dengan penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional ini, maka : (1) pendidikan bertaraf internasional yang bermutu (berkualitas) adalah pendidikan yang mampu mencapai standar mutu internasional, (2) pendidikan bertaraf internasional yang efisien adalah pendidikan yang menghasilkan standar mutu lulusan optimal (berstandar nasional dan internasional) dengan pembiayaan yang minimal, (3) pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, orangtua, masyarakat, kondisi lingkungan, kondisi sekolah, dan kemampuan pemerintah daerahnya (kabupaten/kota dan propinsi); dan (4) pendidikan bertaraf internasional harus memiliki daya saing yang tinggi dalam hal hasil-hasil pendidikan (output dan outcomes), proses, dan input sekolah baik secara nasional maupun internasional.

Untuk menuju kepada satuan pendidikan yang bertaraf internasional atau sekolah bertaraf internasional (SBI) tersebut, maka pemerintah sejak tahun 2007 telah melaksanakan pembinaan pada sekolah atau satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI, yang berasal dari sekolah-sekolah yang sebelumnya telah ditetapkan

sebagai Sekolah Standar Nasional. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa untuk menjadi SBI memerlukan biaya yang sangat mahal, sehingga ditempuh dengan tidak mendirikan sekolah baru, akan tetapi diawali dari SSN tersebut.

Secara yuridis, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional berlandaskan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 50 menyatakan bahwa: ayat (2) “ Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional”, ayat (3) “ Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah yang bertaraf internasional”. 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. 3). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 61 ayat (1) “Pemerintah bersama-sama Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi sekolah yang bertaraf internasional”. 4) Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 25 menyebutkan “Pemerintah dapat mendirikan satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional”. Penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional, yang selanjutnya disebut dengan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). 5) Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan maka Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama juga menerbitkan Buku Panduan Pelaksanaan Sekolah Menengah Pertama Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.

Berdasarkan berbagai peraturan perundangan dan berbagai kebijakan diatas maka penting kiranya pemerintah berkewajiban untuk memberikan arahan dan bimbingan dan pengaturan untuk sekolah-sekolah yang akan atau telah



ditetapkan sebagai satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional atau disebut dengan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, yang kedepannya diharapkan pengembangannya lebih terarah, terencana, dan sistematis. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 menyatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa, perlu dikembangkan sekolah bertaraf internasional pada tingkat kabupaten/kota melalui kerjasama yang konsisten antara pemerintah dengan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Renstra Sekolah Bertaraf Internasional membedakan SMP menjadi empat kelompok, yaitu Sekolah Rintisan, Sekolah Potensial, Sekolah Standar Nasional (SSN) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) (Diknas, 2007: 4). Dimaksud dengan sekolah rintisan adalah sekolah-sekolah memenuhi sebagian kecil Standar Nasional Pendidikan, sekolah potensial adalah sekolah yang memenuhi sebagian besar atau hampir memenuhi sebagian besar Standar Nasional Pendidikan, Sekolah Standar Nasional (SSN) adalah sekolah sebagian besar atau hampir memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hermana Soemantri (2007:11) mengatakan bahwa sangat disadari bahwa Standar Nasional Pendidikan tidak akan bisa secara sekaligus diterapkan sepenuhnya oleh sekolah dalam waktu yang sangat singkat mengingat kemampuan sekolah yang bervariasi.

Sehubungan dengan hal itu, pemerintah menetapkan Sekolah Standar Nasional Pendidikan secara bertahap mulai dari tingkatan memenuhi sebagian kecil standar, memenuhi sebagian besar atau hampir memenuhi standar. (Hermana Soemantri, 2007: 11). Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional merupakan Sekolah/Madrasah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* dan/ atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, sehingga memiliki daya saing diforum internasional.

Dengan demikian SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi atau melaksanakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik, dan tenaga

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Selanjutnya komponen-komponen, aspek-aspek, dan indikator-indikator SNP tersebut diperkaya, diperkuat, dikembangkan, diperdalam, diperluas melalui adaptasi atau adopsi standar pendidikan dari salah satu atau lebih anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan serta diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional. Dengan demikian SBI harus mampu memberikan jaminan bahwa baik dalam penyelenggaraan maupun hasil-hasil pendidikannya standarnya daripada SNP. Penjaminan ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat nasional maupun internasional melalui berbagai strategi yang dapat dipertanggungjawabkan (Departemen Pendidikan Nasional, 2010).

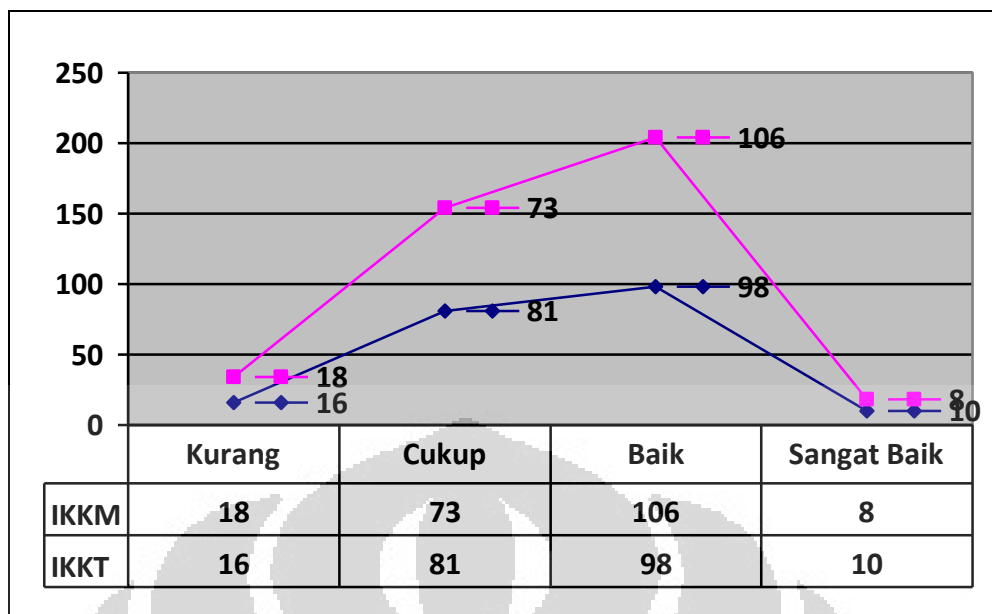
Sekolah Bertaraf Internasional harus melalui dua fase yaitu fase rintisan dan fase kemandirian (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 4). Rintisan SMP-SBI adalah sekolah yang melaksanakan/menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional baru sampai pada tahap atau fase pengembangan/ peningkatan kapasitas/kemampuan atau tahap konsolidasi pada berbagai komponen sekolah untuk memenuhi IKKM (Indikator Kunci Kinerja Minimal) dan IKKT (Indikator Kinerja Kunci Tambahan) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 48). Dalam fase rintisan ini terdiri dua tahap yaitu pertama tahapan pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia, modernisasi, manajemen, dan kelembagaan, dan kedua tahap konsolidasi. Dalam fase rintisan ini bentuk pembinaannya antara lain melalui sosialisasi tentang Sekolah Bertaraf Internasional, peningkatan sarana prasarana, serta bantuan dana blockgrant dalam bentuk sharing dengan pemerintah daerah tingkat propinsi dan kabupaten/kota dalam jangka waktu tertentu. Diharapkan pada saat nanti sekolah mampu secara mandiri untuk menyelenggarakan Sekolah Bertaraf Internasional (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 5).

Secara bertahap Direktorat Pembinaan SMP telah merintis sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria tertentu untuk dikembangkan dan dipersiapkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) sejak tahun 2007. Penetapan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional pada setiap sekolah/daerah melalui proses secara bertahap sesuai dengan pemenuhan kriteria yang ditentukan, sehingga

terjadi ada satu daerah kabupaten/kota lebih dari satu RSBI dan sebaliknya terdapat daerah lain yang belum ada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Pada tahap pertama, kedua, dan ketiga yaitu tahun 2007, 2008, dan 2009 telah ditetapkan RSBI negeri dan swasta di sebagian wilayah di Indonesia 313 sekolah.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional terhadap 205 sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional menunjukkan bahwa kinerja rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) masih banyak yang mengalami kendala dalam melaksanakan program, khususnya program yang berkaitan dengan eksistensi sebagai sekolah bertaraf internasional (SBI) yang tercermin dalam Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT) dan Indikator Kinerja Kunci Minimal (IKKM). Hal ini ditandai dengan rendahnya skor monitoring dan evaluasi yang diperoleh sekolah tersebut pada aspek dimensi internasional (IKKT) 54,14 % yang memiliki skor di bawah rata-rata observasi, yaitu 318,02, meskipun secara rata-rata secara keseluruhan skor capaian adalah 323,37 dari skor maksimum 400. Selanjutnya apabila dilihat dari skor rerata Indikator Kinerja Kunci Minimal (IKKM) gabungan menunjukkan angka sebesar 351,88 dari skor maksimum 400.

Selanjutnya dari hasil analisis menunjukkan bahwa dari 205 sekolah yang di monitoring dan evaluasi dapat dikategori menjadi empat kelompok untuk Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT), yaitu: (1) kategori “Sangat Baik” sebanyak 10 sekolah, (2), kategori “Baik” sebanyak 98 sekolah, (3), kategori “Cukup” sebanyak 81 sekolah, dan (4) kategori “Kurang” sebanyak 16 sekolah. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Kunci Minimal (IKKM), yaitu: (1) kategori “Sangat Baik” sebanyak 8 sekolah, (2), kategori “Baik” sebanyak 106 sekolah, (3), kategori “Cukup” sebanyak 73 sekolah, dan (4) kategori “Kurang” sebanyak 18 sekolah. Selanjutnya komposisi secara diagramatik dapat dilihat pada *line chart* di bawah ini.



Sumber: Diolah oleh peneliti dari data evaluasi dan monitoring Dit.PSMP tahun 2008

Gambar 1. Skor IKKT dan IKKM

**Tabel 1. Nilai Indikator Kinerja Kunci Minimal (IKKM) Kategori Kurang**

| No. | Kabupaten/Kota        | Propinsi           | Nilai IKKM    |
|-----|-----------------------|--------------------|---------------|
| 1.  | Kab.Tabanan           | Bali               | 251.99        |
| 2.  | Kota Banjarbaru       | Kalimantan Selatan | 281.76        |
| 3.  | Kab. Kulon Progo      | DI Yogyakarta      | 302.75        |
| 4.  | Kota Pangkal pinang   | Bangka Belitung    | 306.91        |
| 5.  | Kab.Ngawi             | Jawa Timur         | 308.11        |
| 6.  | <b>Kota Serang</b>    | <b>Banten</b>      | <b>310.88</b> |
| 7.  | Kab. Dompu            | NTB                | 313.05        |
| 8.  | Kab. Garut            | Jawa Barat         | 313.72        |
| 9.  | Kota Balikpapan       | Kalimantan Timur   | 314.9         |
| 10. | Kota Palu             | Sulawesi Tengah    | 315.06        |
| 11. | Kab. Pinrang          | Sulawesi Selatan   | 315.68        |
| 12. | Kab.Sragen            | Jawa Tengah        | 317.1         |
| 13. | Kab. Bengkulu Selatan | Bengkulu           | 319.54        |
| 14. | Kab. Soppeng          | Sulawesi Selatan   | 320.67        |
| 15. | Kab. Bojonegoro       | Jawa Timur         | 321.24        |
| 16. | Kab. Banyumas         | Jawa Tengah        | 321.34        |
| 17. | Kota Pare-pare        | Sulawesi Selatan   | 321.45        |
| 18. | Kab.Sukaharjo         | Jawa Tengah        | 321.64        |

Sumber: Diolah oleh peneliti dari data evaluasi dan monitoring Dit.PSMP tahun 2008

**Tabel 2. Nilai Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT) Kategori Kurang**

| No.       | Kabupaten/Kota        | Propinsi           | Nilai IKKT    |
|-----------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 1.        | Kab. Bengkulu Selatan | Bengkulu           | 228.06        |
| 2.        | Kab. Blitar           | Jawa Timur         | 232.16        |
| 3.        | Kab. Maros            | Sulawesi Selatan   | 251.75        |
| 4.        | Kab. Lubuk Sikaping   | Sumatera Barat     | 257.3         |
| 5.        | Kota Binjai           | Sumatera Utara     | 259.42        |
| 6.        | Kota Banjarbaru       | Kalimantan Selatan | 261.34        |
| 7.        | Kota Banda Aceh       | NAD                | 264.07        |
| 8.        | Kota Mataram          | NTB                | 274.39        |
| <b>9.</b> | <b>Kota Serang</b>    | <b>Banten</b>      | <b>274.67</b> |
| 10.       | Kota Cirebon          | Jawa Barat         | 276.24        |
| 11.       | Kab.Sukaharjo         | Jawa Tengah        | 278.31        |
| 12.       | Kab. Sumedang         | Jawa Barat         | 279.39        |
| 13.       | Kota Surakarta        | Jawa Tengah        | 280.36        |
| 14.       | Kab. Banyumas         | Jawa Tengah        | 280.47        |
| 15.       | Kab. Garut            | Jawa Barat         | 281.43        |
| 16.       | Kab.Rokan Hilir       | Riau               | 286.14        |

Sumber: Diolah oleh peneliti dari data evaluasi dan monitoring Dit.PSMP tahun 2008

Salah satu sekolah yang masuk kategori “kurang” adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Serang Provinsi Banten dengan skor dibawah rata-rata untuk IKKT gabungan (IKKT+Portofolio IKKT) mendapatkan skor sebesar 274.67, sedangkan untuk Indikator Kinerja Kunci Minimal (IKKM) sebesar 310,88. SMPN 1 Serang merupakan salah satu sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional mulai tahun 2007 atau pada tahap pertama.

Berdasarkan data tersebut di atas, penelitian ini akan mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional dilihat dari persepsi guru. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah SMPN 1 Serang Provinsi Banten. Alasan dipilihnya sekolah tersebut adalah SMPN 1 Serang termasuk kategori kurang berdasarkan skor IKKT dan IKKM yang diperoleh dalam penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Direktorat PSMP, dan salah satu sekolah penyelenggara RSBI yang berkategori kurang yang berada di ibu kota provinsi dan berada dekat dengan pengambil kebijakan (Direktorat

**Universitas Indonesia**

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama berada di DKI Jakarta). Peneliti tertarik untuk meneliti implementasi kebijakan penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional di SMPN 1 Serang Banten.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “ Bagaimanakah Persepsi guru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Serang, Provinsi Banten?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak pada perumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui persepsi guru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Serang, Provinsi Banten.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Bagi Penulis Sendiri**

Penelitian ini memperluas cakrawala berpikir dan menambah pengetahuan penulis dalam kajian rintisan sekolah bertaraf internasional.

### **1.4.2 Bagi Akademik**

Penelitian ini menambah kekayaan kajian kebijakan terutama berkaitan dengan kajian implementasi kebijakan penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional.

### **1.4.3 Bagi Perumus dan Pengambil Kebijakan**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pijakan dalam mengambil kebijakan di bidang sekolah bertaraf internasional.

#### 1.4.4 Bagi Peneliti Lanjutan

Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai rintisan sekolah bertaraf internasional.

### 1.5 Sistematika Penulisan

- BAB I** Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Pada bab ini, dibahas kerangka teori yang menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan penelitian dalam perumusan masalah. Untuk mengetahui bagaimana persepsi guru tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Serang, Propinsi Banten, maka perlu dibahas secara teoritik mengenai teori kebijakan publik, implementasi kebijakan, rintisan sekolah bertaraf internasional, dan hasil penelitian terdahulu tentang rintisan sekolah bertaraf internasional.
- BAB III** Pada bab ini, dibahas mengenai metode penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, instrument pengumpulan data, informan, teknik analisis data.
- BAB IV** Pada bab ini, dibahas mengenai gambaran penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional.
- BAB V** Pada bab ini disajikan hasil pengolahan data penelitian dalam bentuk deskripsi data dan analisa data.
- BAB VI** Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran setelah didapatnya hasil dari penelitian sehingga menghasilkan saran-saran untuk kemajuan program rintisan sekolah bertaraf internasional selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN LITERATUR

Pada bab ini, dibahas kerangka teori yang menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan penelitian dalam perumusan masalah. Perlu dibahas secara teoritik mengenai teori kebijakan publik, implementasi kebijakan, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, dan hasil penelitian terdahulu tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.

#### 2.1 Kebijakan Publik

##### 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologi, kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* dalam bahasa Inggris. Kata *policy* sebenarnya dapat dijumpai dalam berbagai bahasa seperti Latin, dan Yunani. *Politia* dalam bahasa Latin berarti negara. *Polis* dalam bahasa Yunani berarti negara kota. *Policie* dalam bahasa Inggris berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau juga berarti administrasi pemerintah. (Ali Imron, 2008: 12). Kata asal tersebut menghasilkan tiga jenis pengertian yang sekarang ini dikenal, yaitu *politic*, *policy*, dan *polici*. *Politic* berarti seni dalam ilmu pemerintahan, *policy* berarti hal-hal berkaitan dengan kebijakan pemerintah, sedangkan *polici* berarti hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan.

Kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Batasan atau definisi mengenai kebijakan publik telah banyak dikemukakan oleh para ahli sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Seperti yang dikemukakan oleh Laswell dan Kaplan, “*a projected program of goals, values, and practices*” (Thoha, 1990: 58) definisi ini memperlihatkan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu. Menurut Monahan dan Hengs seperti yang dikutip Syafarudin (2008) kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan baga sehingga sorganisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal ini mereka berusaha mengejar tujuannya.



Senada dengan definisi tersebut di atas, Budiarjo dikutip oleh Ali Imron mengemukakan bahwa kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang diambil oleh pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (Ali Imron, 2008: 14). Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

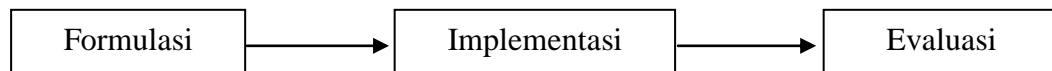
Selanjutnya Anderson mendefinisikannya sebagai *relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.* (Riant Nugroho, 2009: 83) definisi ini menjelaskan bahwa kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan masalah.

Definisi ini dipertegas oleh Friedrich seperti yang dikutip oleh Ali Imron (Ali Imron, 2008) yang menerangkan batasan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diajukan oleh seseorang, grup dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan (ancaman dan peluang) pelaksanaan usulan tersebut dalam mencapai tujuan.

Pendapat tersebut dipertegas oleh Thomas R. Dye kebijakan publik adalah segala sesuatu atau pilihan tindakan yang dilakukan atau tidak ingin dilaksanakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Solichin Abdul Wahab, 2010).

Dwiyanto Indiahono (2009, 18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Perkembangan konsep kebijakan mengarahkan bahwa pada dasarnya sebuah kebijakan publik terlaksana dalam-dan karena itu bisa dinilai-dari tiga hal, yaitu :

- a. Proses pembuatan/penyusunan kebijakan;
- b. Substansi kebijakan publik; dan
- c. Implementasi kebijakan publik

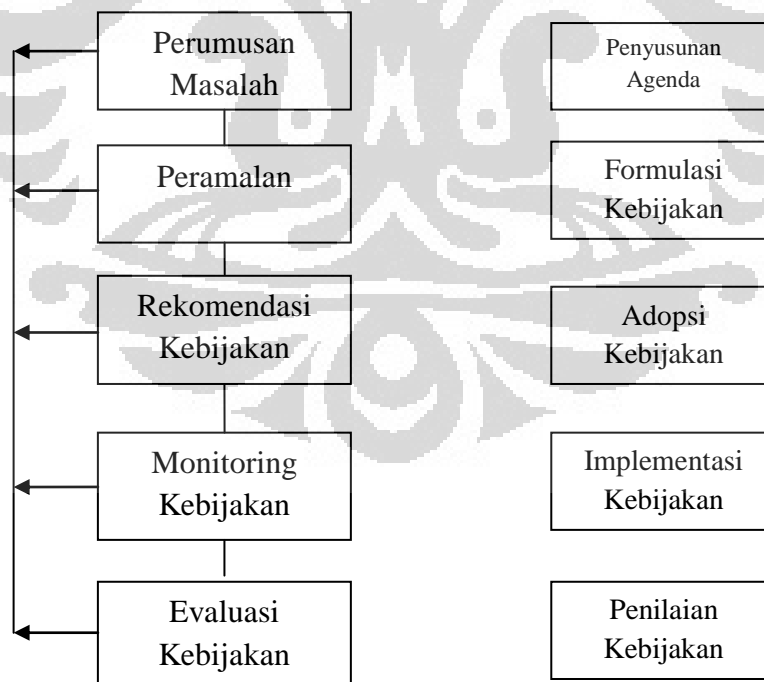


Gambar 2 : Alur Proses Kebijakan Publik

Sumber: Riant Nugroho (2004)

Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (Formulasi kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan ketiga, bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi (Nugroho 2004,100-105).

Dibandingkan dengan 3 (tiga) pentahapan di atas, William N. Dunn seperti yang dikutip oleh Dwiyanto Indiahono (2009) menggambarkan proses kebijakan sebagai berikut:



Gambar 3. Proses Kebijakan Publik menurut Dunn

Sumber: William N. Dunn, 1994: 17

Gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahapan 1) perumusan masalah, tahap ini memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda, 2) Peramalan, menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi masa datang, dan mengendalikan kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan melalui tahap formulasi kebijakan, 3) Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan akan manfaat kebijakan melalui tahap adopsi kebijakan, 4) Monitoring, menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya melalui tahap implementasi kebijakan dan 5) Evaluasi menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan kenyataan yang dihasilkan melalui tahap penilaian kebijakan (William N. Dunn, 1994).

Pengertian-pengertian terminologis tersebut kiranya jelas, bahwa untuk memberikan batasan mengenai kebijakan publik dapat menggunakan berbagai sudut pandang, dari sudut proses ataupun sudut pandang pelaksanaan. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan/kegiatan-kegiatan/strategi-strategi pemerintah yang terarah diperuntukan kepada seluruh masyarakat dan ditujukan untuk kepentingan publik.

### **2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik**

Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat reoritis. George C. Edwards III mengemukakan bahwa: "*Policy*

*implementation, ...is the stage of policy making between the establishment of a policy...and the consequences of the policy for the people whom it affects*". Selanjutnya dilihat dari sisi tahapan-tahapan kebijakan, implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang didalamnya telah tertuang apa yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya menurut tahapan tahapan tertentu (Mazmanian dan Sabatier. 1983).

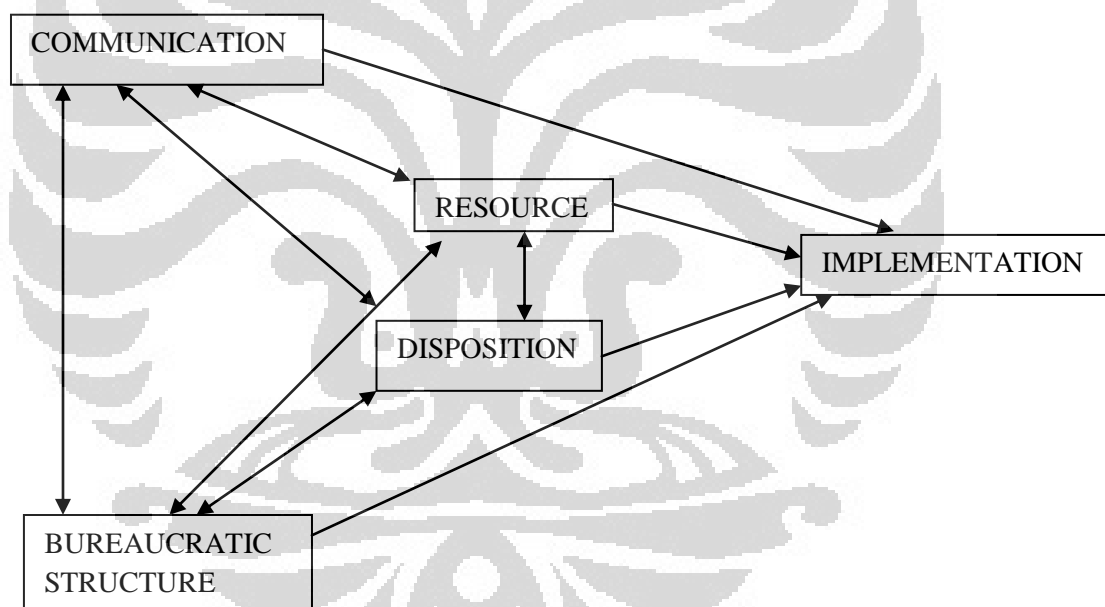
Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ditetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika *botton up*, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

Implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus implementasi kebijakan adalah kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disyahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.

### **2.1.3 Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III**

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang rintisan sekolah bertaraf internasional adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), disposisi (*dispositions*) dan struktur birokrasi (*bureucratic structure*).

Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Hal tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang saling terkait satu sama lain. Keempat hal tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan jika sedang membahas implementasi kebijakan publik. Secara operasional faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 4. Pengaruh Elemen-elemen dalam Implementasi

Sumber: George C. Edward III: *Implementing Public Policy*, 1980; 148

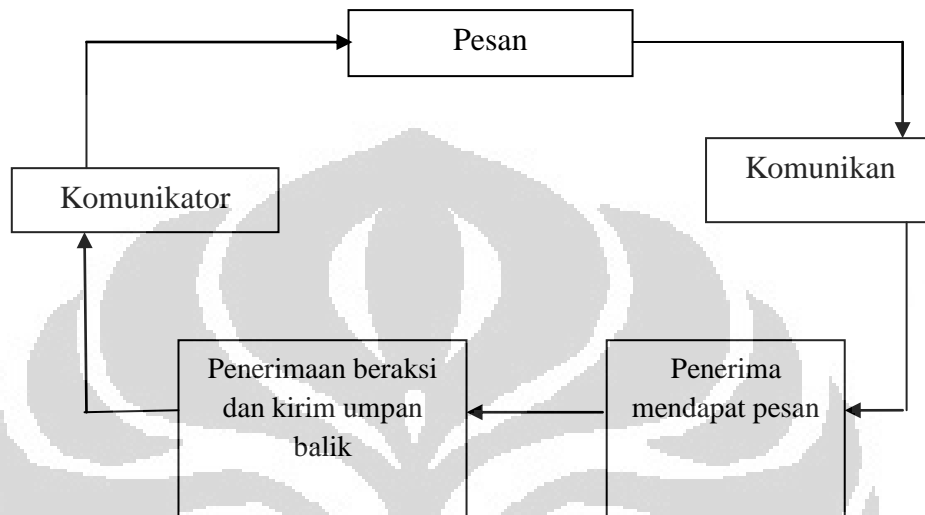
Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

#### 2.1.3.1 Komunikasi (*Communication*)

*Communication* adalah penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dan pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Pesan tersebut harus jelas,

akurat, dan konsisten sehingga pelaksana kebijakan tahu apa yang harus dilakukan.

Proses komunikasi menurut Courtland L. Bovee dan John V. Thil dapat dibagi menjadi lima tahap (Djoko Purwanto, 1997), yaitu :

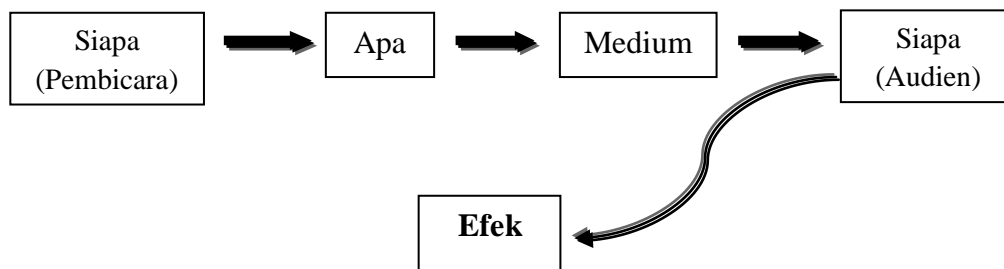


Gambar 5. Proses Komunikasi menurut Bovee dan Jhon V. Thil

Sumber: Djoko Purwanto (1997)

Gambar di atas menjelaskan bahwa dalam tahap pertama sebelum melakukan komunikasi, syarat utama adalah adanya ide/gagasan. Tahap kedua mengubah ide yang berbentuk abstrak harus diubah kedalam bentuk pesan. Tahap ketiga memindahkan atau menyampaikan pesan melalui berbagai saluran yang ada kepada si penerima pesan. Tahap keempat penerima menerima suatu pesan, adakalanya pesan yang diterima sempurna namun tidak jarang hanya sebagian kecil saja. Tahap kelima umpan balik (*feed back*) adalah penghubung akhir dalam suatu mata rantai dan dapat berfungsi sebagai koreksi si pengirim.

Sedangkan gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya, digambarkan oleh Harold Lasswell seperti yang dikutip oleh Arni Muhammad (2009) sebagai berikut:



Gambar 6. Model komunikasi Lasswell

Sumber: Arni Muhammad (2009)

Dari gambar tersebut Lasswell menggunakan lima pertanyaan yang perlu ditanyakan dan dijawab dalam proses komunikasi, yaitu: Siapa yang berbicara, apa isi pesan atau isi komunikasi, menggunakan media apa, siapa yang mendengarkan, dan pertanyaan terakhir adalah apa efek dari komunikasi tersebut. Pace dan Faules (2006) menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi yaitu: penciptaan pesan dan menafsirkan atau menterjemahkan pesan.

Berkaitan dengan kebijakan menurut George C. Edwards III ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi yaitu: *transmission* atau cara penyampaian pesan, *clarity* atau kejelasan pesan, serta *consistency* atau kekonsistenan dalam penyampaian pesan.

Pengiriman pesan *transmission* tidak selalu berlangsung mulus seperti proses komunikasi yang digambarkan, terkadang mengalami hambatan seperti ketidaksetujuan pelaksana kebijakan dengan pembuat kebijakan sehingga mempengaruhi kebijakan pelaksanaan dalam membuat keputusan umum. Hambatan juga dapat terjadi karena pesan yang harus disampaikan harus melalui birokrasi yang berlapis yang sangat mungkin mengakibatkan salah informasi. Penerimaan komunikasi dapat terhambat dapat disebabkan oleh kehendak bebas dari pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan akan mempersepsi secara selektif terhadap pesan-pesan yang dia terima. Di sinilah kehendak bebas dari pelaksana kebijakan berperan beberapa hal yang dianggap tidak bersesuaian dengan nilai-nilai hidup yang dianutnya, sadar atau tidak, akan ditolak atau bahkan

diingkarinya. Ataupun jika tidak bisa menolak, dia akan melaksanakan kebijakan tersebut dengan enggan. Pelaksana kebijakan enggan atau setengah hati akan menyebabkan suatu kebijakan tidak diimplementasikan dengan baik atau tuntas.

Faktor-faktor penghambat komunikasi mencakup masalah dalam pengembangan pesan, penyampaian pesan, penerimaan pesan, dan penafsiran pesan (Purwanto, 1997). Masalah yang dihadapi dalam mengembangkan pesan adalah masalah-masalah yang disebabkan oleh munculnya keraguan-raguan tentang isi pesan, kurang terbiasa dengan situasi yang ada atau dengan orang yang akan menerima, adanya pertentangan emosi atau adanya kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Komunikasi juga dapat terhambat jika ada masalah dalam penyampaian pesan dari pengirim ke penerima, yaitu faktor fisik. Meskipun sebagian dari suatu pesan mungkin hilang selama proses penyampaian pesan, masalah terbesar berada pada penafsiran pesan oleh penerima pesan yang diakibatkan perbedaan latar belakang, perbendaharaan bahasa, dan pernyataan emosional, dapat menimbulkan munculnya kesalahpahaman antara pemberi dan penerima pesan.

Berkaitan dengan kebijakan tentang penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional, komunikasi disini bisa dikembangkan lebih jauh bukan saja penyampaian program kerja kepada struktur organisasi pelaksana. Tidak kalah penting untuk mengkomunikasikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta kepada Pemerintah Daerah yang berkuasa dan tentu kepada SMP yang menjadi target implementasi. Hal ini lazimnya disebut sosialisasi kebijakan.

Salah satu hal yang paling penting dalam implementasi kebijakan adalah *clarity* atau kejelasan pesan, dimana pesan yang disampaikan tidak berlebihan dan ambigu. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidak jelasan informasi kebijakan adalah *complexity of policy making* kompleksitas pembuatan kebijakan public, *public opposition* penolakan masyarakat, *competing goals and the need for consensus* tidak tercapainya kesepakatan mengenai tujuan kebijakan, *unfamiliarity of new programs* sifat kebaruan suatu program kebijakan, *avoiding accountability* kebijakan yang tidak akuntabel, dan lain sebagainya (George C. Edwards III, 1980, p.26).



Ketidakjelasan pesan dapat membuat tidak tercapainya perubahan yang diinginkan, ketidakjelasan pesan juga dapat mengakibatkan terjadinya perubahan yang tidak direncanakan dan tidak terantisipasi. Kekonsistensian suatu pesan diperlukan seperti juga kejelasan pesan jika implementasi yang diinginkan menjadi efektif. Jika suatu pesan yang disampaikan sangat jelas tapi instruksi yang diberikan sangat berbeda akan menyulitkan petugas operasional dalam melaksanakan kebijakan.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya.

Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

### **2.1.3.2 Sumber-sumber (*Resources*)**

Resources dapat diartikan menjadi sumber daya pelaksana kebijakan. Sumberdaya dapat menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya adalah kualitas dan kuantitas staf pelaksana, ketersediaan informasi

bagi staf pelaksana, keluasan kewenangan yang diberikan kepada staf pelaksana, serta ketersediaan fasilitas pendukung bagi staf dalam rangka melaksanakan kebijakan. Jumlah dan kualitas sumberdaya manusia merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan. Jumlah staf pelaksana yang besar terkadang diperlukan agar kebijakan yang disampaikan dapat dipantau dengan baik. Tidak hanya jumlah staf yang banyak saja yang diperlukan tetapi juga kemampuan para staf pelaksana tersebut dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Manajemen sumberdaya manusia merupakan suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam aktivitas operasional sumberdaya manusia, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari sumberdaya manusia terhadap pencapaian tujuan organisasi (Herman Sofyandi, 2008).

Cara yang efektif untuk meningkatkan kemampuan staf dengan mengadakan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan staf. Pelatihan merupakan suatu program yang diharapkan dapat memberikan stimulus kepada staf untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu. Untuk membangun dan mengembangkan staf yang profesional perlu diadakan program pelatihan secara internal dan eksternal yang diikuti oleh komunitas sumberdaya manusia, program ini mulai dari rentang workshop hingga seminar dua pekan serta pengalaman pengembangan yang spesifik (Becker, Huselid dan Ulrich, 2001). Menurut Werther dan Davis ada lima prinsip pelatihan sehingga arah dan sasaran pelatihan lebih jelas, yaitu: partisipasi, dilakukan berulang-ulang, berhubungan dengan pelatihan terdahulu, sesuai dengan kebutuhan dalam pekerjaan, dan adanya umpan balik (Herman Sofyandi, 2008).

Ketersediaan staf dalam jumlah yang besar dan kemampuan yang tinggi perlu di dukung oleh motivasi. Diyakini motivasi adalah kondisi dasar yang harus diperhatikan agar staff pelaksana kebijakan bersedia menjalankan kebijakan publik dengan baik. Motivasi adalah dorongan seseorang untuk mengambil tindakan karena orang tersebut ingin melakukan demikian (Moekijat, 1995). Apabila orang-orang di dorong maka mereka hanya mengadakan reaksi terhadap tekanan. Mereka bertindak karena merasa bahwa mereka harus melakukan demikian. Akan tetapi, apabila mereka dimotivasi, maka mereka mengadakan

pilihan positif untuk melakukan sesuatu, karena mereka mengetahui tindakan ini mempunyai arti bagi mereka.

Selain staf, ketersediaan informasi juga merupakan sumberdaya yang diperlukan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor.

Pelaksana kebijakan mungkin sudah memiliki jumlah staf yang cukup, mengerti apa yang akan dilakukan, mempunyai kewenangan untuk melatih apa yang harus dilakukan, mempunyai kewenangan untuk melatih tugasnya, akan tetapi tanpa fasilitas fisik seperti gedung yang dibutuhkan, peralatan, persediaan maka implementasi kebijakan yang paling mudah pun tidak akan dapat terlaksana.

### **2.1.3.3 Dispositions**

*Dispositions* diterjemahkan sebagai pembawaan/kepribadian/pandangan pelaksana kebijakan publik. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau pelaksana. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka profesi implementasi akan mengalami banyak masalah.

Dengan asumsi bahwa semua pegawai pemerintah (pelaksana kebijakan publik) sudah lolos seleksi kepribadian pada saat penerimaan pegawai, maka disposition/sikap lebih dimaksudkan sebagai ketepatan atau kecocokan tipe/kepribadian antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan.

Ada dua hal penting berkenaan dengan dispositions. Hal pertama adalah *staffing the bureaucracy* dan yang kedua mengenai insentif bagi pelaksana kebijakan. *Staffing the bureaucracy* menekankan pada pentingnya pembuat

kebijakan untuk menyusun atau menempatkan staf-stafnya dalam struktur organisasi pelaksana demi menjamin terlaksananya kebijakan. Sikap para pelaksana merupakan hambatan serius bagi implementasi kebijakan. Jika staf yang ada tidak dapat mengimplementasikan kebijakan seperti keinginan para pembuat kebijakan, perlu diganti dengan staf yang lebih responsive terhadap pimpinan.

Sementara insentif menekankan pada tingkat kecukupan/kepentingan reward yang akan diterima pelaksana kebijakan jika bersedia dan/atau berhasil menerapkan kebijakan. Insentif juga dimaknai luas sebagai sarana “pengendalian” bagi pelaksana kebijakan agar bersedia menerapkan kebijakan sesuai yang direncanakan pembuat kebijakan. Pemberian insentif merupakan teknik potensial untuk menanggulangi sikap pelaksana kebijakan.

Pemberian insentif hendaknya mengikuti prinsip-prinsip tertentu seperti yang diungkapkan oleh Dimock (1986, p.254). prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Mencari dan berusaha menemukan bahwa pemberian hadiah memiliki arti penting bagi para pegawai.
2. Penghargaan yang cepat, sehingga pegawai sadar apa yang baru diterimanya, jangan menunda-nunda pemberian penghargaan atau bawahan menjadi tidak mempunyai motivasi lagi untuk bekerja.
3. Penghargaan hendaknya diberikan apabila mereka memang pantas menerimanya.
4. Membiarkan pegawai mengetahui apa yang terjadi dapat sangat menguntungkan. Langkah ini sekaligus memberikan penghargaan kepada bawahan dengan menunjukkan bahwa manajer mempercayai mereka dan memperbolehkan mereka melihat bahwa penghargaan yang diberikan adalah objektif.

Dari penjelasan di atas adalah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program, namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

#### **2.1.3.4 Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)**

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Birokrasi yang dimaksud adalah seluruh jajaran pemerintahan, meliputi semua pejabat negara dan pegawai baik yang berstatus sebagai pegawai negeri maupun non-pegawai negeri (pegawai tidak tetap, mitra kerja, dan lain sebagainya), serta struktur pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Max Weber memandang birokrasi sebagai sistem administrasi rutin yang dilakukan dengan keseragaman, diselenggarakan dengan cara tertentu, didasarkan aturan tertulis, oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya (M. Mas'ud Said, 2010; 2).

Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu : 1) Kompetensi dan ukuran staff suatu badan, 2) Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana, 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota

legislatif dan eksekutif), 4) Vitalitas suatu organisasi, 5) Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi, 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Edwards III juga mengemukakan pentingnya memperhatikan *fragmentation* dalam struktur birokrasi. Menurut Edwards III *fragmentation* adalah pembagian pusat koordinasi dan pertanggungjawaban. Atau bisa dikatakan bahwa *fragmentation* adalah terpecah-pecahnya pelaksana kebijakan karena banyaknya organisasi atau badan yang terlibat di dalamnya. Hal ini didukung oleh Henry Fayol, yang menyatakan bahwa pembagian kerja sesuai dengan spesialisnya akan membuat para pekerja lebih efisien dan wewenang yang diberikan berjalan seiring dengan tanggung jawab yang dibebankan (Stephen P. Robbins, 1994).

*Fragmentation* membawa konsekuensi yang besar bagi keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin banyak pihak yang itu terlibat, pelaksana kegiatan cenderung kurang fokus. Tetapi disisi lain, jika suatu kegiatan memiliki skala besar sementara koordinasi dan pertanggungjawaban yang pada akhirnya mengakibatkan tersendatkan pelaksana kegiatan.

Salah satu hal yang penting dalam implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik oleh organisasi adalah adanya sejenis *standard operating procedures* (SOP). SOP merupakan positivisasi atau pembakuan terhadap langkah-langkah dan prosedur yang harus dikerjakan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan, misalnya SOP pembuatan keputusan, SOP pertanggungjawaban kegiatan, SOP pengawasan kegiatan, dan lain sebagainya.

SOP adalah suatu standard penyikapan baku yang harus dilaksanakan dalam kondisi apapun. Kebakuan seperti ini membuat kebijakan diterapkan secara seragam dan standar, padahal bisa jadi masing-masing masalah yang dihadapi

memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik yang harusnya disikapi dengan kebijakan berbeda pula.

Dari uraian di atas keempat bidang tersebut (komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi) bukanlah jaminan untuk kesuksesan dalam implementasi kebijakan, masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, misalnya dukungan atau bantuan dari pihak diluar. Oleh karena itu empat bidang seperti dijabarkan di atas lebih ditekankan pada internal lembaga yang membuat kebijakan, sedangkan bagi lembaga yang dikenai kebijakan (obyek kebijakan) yang dalam hal ini adalah sekolah (rintisan sekolah bertaraf internasional) implementasi lebih ditekankan pada dukungan implementasi kebijakan, baik dalam konteks keberlanjutan program maupun dukungan kebijakan, termasuk di dalamnya pendanaan. Dalam konteks implementasi Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional maka dukungan dari stakeholder (pemerintah daerah) dapat membantu keberhasilan implementasi program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.

## **2.2 Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional**

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional merupakan sekolah nasional yang menyiapkan peserta didik berbasis standar nasional pendidikan Indonesia berkualitas internasional dan lulusannya berdaya saing internasional. Penyelenggaraan RSBI dilatarbelakangi oleh era globalisasi yang menuntut kemampuan daya saing yang kuat dalam teknologi, manajemen dan sumber daya manusia.

### **2.2.1 Pengertian IKKM dan IKKT dalam Penyelenggaraan RSBI**

Pengertian unsur indikator kinerja kunci minimal (IKKM) adalah suatu standar kinerja sekolah yang meliputi unsur-unsur pendidikan, yaitu: akreditasi, kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, pendidik, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pendidikan. Bagi sekolah yang dirintis sebagai sekolah bertaraf internasional, maka diharuskan terlebih dahulu memenuhi standar minimal dari berbagai unsur pendidikan tersebut. Indikator-indikator pendidikan tersebut merupakan kunci pokok yang harus dipenuhi

sebagai tolak ukur bahwa sekolah bersangkutan minimal telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan minimal yang terdiri dari pemenuhan terhadap standar kompetensi lulusan, pemenuhan standar isi, pemenuhan standar proses pembelajaran, pemenuhan standar penilaian, pemenuhan standar sarana dan prasarana, pemenuhan standar pengelolaan dan pemenuhan standar pembiayaan pendidikan.

Pengertian unsur indikator kinerja kunci tambahan (IKKT) adalah Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya, diperdalam dan diperluas dalam setiap komponen pendidikan, yaitu diperkaya tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan pendidikan.

#### 1. Standar Isi

Pemenuhan Standar Isi, sebagai sekolah yang dirintis menuju bertaraf internasional, maka dalam penyelenggaraan pendidikannya harus memenuhi standar isi, yaitu: Standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Standar Isi secara keseluruhan mencakup: 1) Kerangka dasar kurikulum; Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran, ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Pengembangan kurikulum menurut E. Mulyasa (2008) didasarkan atas tujuh prinsip, yaitu: berpusat pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik; menegakkan lima pilar belajar; pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan bersifat perbaikan, pengayaan, atau percepatan; kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka dan hangat; kurikulum diterapkan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia,



sumber belajar dan teknologi yang memadai; kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya serta kekayaan daerah; dan kurikulum mencakup semua kompetensi mata pelajaran, muatan local, dan pengembangan diri; 2) Beban studi, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran; 3). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), KTSP sebagai kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mempertahankan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Menurut Jamal Ma'mur Asmani (2010: 24) sekolah sebagai unit penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan, seperti perkembangan ilmu dan teknologi, globalisasi, dan era informasi; 4) Kalender pendidikan, yaitu pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun.

Dalam pengayaan atau pengembangan standar isi Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi bertaraf internasional sebagai indikator kinerja kunci tambahan (IKKT), dapat dilakukan dengan adopsi atau adaptasi. Penambahan atau pengembangan Standar Kompetensi (SK), dan atau beberapa Kompetensi Dasar (KD) serta indikator-indikator kompetensi dari masing-masing Standar Kompetensi Lulusan SMP, Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran, dan Standar Kompetensi Lulusan tiap mata pelajaran. Diharapkan sekolah mampu mengembangkan Standar Kompetensi (SK), dan atau beberapa Kompetensi Dasar (KD) dan indikator kompetensi tersebut sesuai dengan standar yang berlaku di sekolah bertaraf internasional baik yang ada di dalam negeri ataupun luar negeri, dari salah satu negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan. Standar isi yang telah diperkaya atau dikembangkan tersebut, selanjutnya dikembangkan menjadi suatu silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Semua itu kemudian disebut sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berlaku disekolah tersebut sebagai sekolah bertaraf internasional.

## 2. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Pemenuhan standar kompetensi lulusan (SKL), sebagai sekolah yang dirintis menuju bertaraf internasional, maka dalam penyelenggaraan pendidikannya harus memenuhi standar kompetensi lulusan. Sebagai Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional (RSBI), maka diharapkan dapat memperkaya atau menerapkan standar lulusan yang lebih tinggi dari pada yang ditetapkan secara nasional serta sesuai dengan tuntutan global.

## 3. Standar Proses

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses merupakan kriteria minimal SNP yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Menurut Dimiyati dan Mudjiono (2006: 207) pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. Penilaian hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

Berdasarkan Buku Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Berataraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (2008) menyebutkan bahwa keberhasilan dalam proses pembelajaran ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan (IKKT), yaitu: proses pembelajaran pada semua mata pelajaran menjadi teladan bagi sekolah lainnya dalam pengembangan akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa patriot dan jiwa inovator; diperkaya dengan model proses pembelajaran sekolah unggul dari salah satu negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan; menerapkan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada semua mata pelajaran; dan pembelajaran menggunakan dapat bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.

#### 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak

usia dini meliputi: a) Kompetensi pedagogik; b) Kompetensi kepribadian; c) Kompetensi profesional; dan d) Kompetensi sosial.

Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki: a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan c) sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs. Tenaga kependidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

Pendidik memiliki peranan yang strategis karena mempunyai tugas profesional untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran serta melakukan bimbingan dan pelatihan. Sebagai tenaga pendidik yang telah memenuhi standar nasional, apabila menjalankan tugas dan fungsinya pada sekolah yang merintis ataupun telah bertaraf internasional dituntut juga memenuhi indikator kinerja kunci tambahan (IKKT) dalam upaya memenuhi tuntutan pencapaian mutu pendidikan yang bertaraf internasional. indikator kinerja kunci tambahan (IKKT) sebagai guru pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional antara lain adalah: semua guru mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis TIK; guru mata pelajaran sains, matematika, dan inti kejuruan mampu mengampu pembelajaran berbahasa Inggris; minimal 20 % guru berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A.

Untuk tenaga kependidikan, keberhasilan juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan (IKKT) antara lain adalah: Kepala Sekolah/Madrasah berpendidikan minimal S2 dan telah menempuh pelatihan kepala sekolah/madrasah dari lembaga pelatihan kepala sekolah yang diakui pemerintah; kepalah sekolah/madrasah mampu berbahasa Inggris; dan memiliki visi internasional, mampu membangun jejaring internasional, memiliki kompetensi manajerial, serta jiwa kepemimpinan yang kuat. Selain itu, sebagai sekolah rintisan bertaraf internasional maka sekolah dapat memiliki sekurang-kurangnya adalah kepala sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium,

teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan, dan juga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

#### 5. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia. Standar jumlah peralatan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan perpeserta didik, Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan, Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik, Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP, Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

Pencapaian indikator kinerja kunci tambahan (IKKT) aspek standar sarana dan prasarana meliputi: setiap kelas dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK; perpustakaan dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TK di seluruh dunia; dan dilengkapi dengan ruang multi media, ruang unjuk seni budaya, fasilitas olahraga, klinik dan sebagainya; laboratorium tambahan seperti pengembangan laboratorium alam, *green house*, dan sebagainya; ruang data dan informasi; ruang riset dan pengembangan bagi pendidik dan lainnya; ruang para wakil kepala sekolah; ruang seminar, diskusi, workshop.

#### 6. Standar Pengelolaan

Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Beberapa aspek standar pengelolaan sekolah yang harus dipenuhi adalah meliputi: perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan, dan sistem informasi manajemen.

Dalam pencapaian indikator kinerja kunci tambahan (IKKT) antara lain adalah: meraih sertifikat ISO 9001:2000 atau sesudahnya; merupakan sekolah/madrasah multikultural; menjalin hubungan "*sister school*" dengan sekolah bertaraf internasional di luar negeri; bebas narkoba dan rokok; bebas kekerasan (*bullying*); menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam segala aspek pengelolaan sekolah; dan meraih medali tingkat internasional pada berbagai kompetisi sains, matematika, teknologi, seni dan olah raga.

#### 7. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal, Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

#### 8. Standar Penilaian

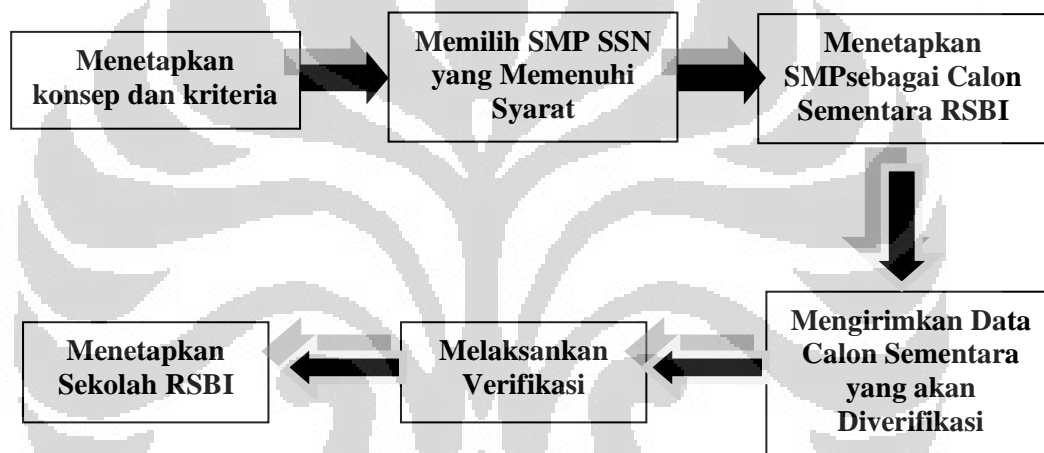
Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Menurut Cronbach dan Stufflebeam seperti yang dikutip oleh Arikunto (2009; 3) menyatakan bahwa penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dan bagaimana tujuan pendidikan telah tercapai, digunakan untuk pengambilan keputusan. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mengambil keputusan.

Sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional, sekolah harus melakukan pengembangan sistem penilaian yang bersifat memperkaya, memperluas, dan variatif untuk mencapai standar indikator kinerja kunci tambahan penilaian.

Untuk dapat menetapkan dan menyelenggarakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, maka diperlukan adanya prosedur dan mekanisme yang harus ditempuh oleh semua pihak pemangku kepentingan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Prosedur dan mekanisme merupakan tata urutan pelaksanaan penyelenggaraan/penetapan sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional. Prosedur atau mekanisme diselenggarakan untuk menjamin bahwa Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang diselenggarakan adalah telah memperoleh izin resmi dari pemerintah dimana secara hukum, sosial, dan aspek lainnya adalah diakui keberadaannya (legal).

Secara garis besar langkah-langkah awal yang harus ditempuh oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam pendirian

penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional adalah menetapkan konsep persyaratan atau kriteria, memilih sekolah standar nasional yang telah memenuhi persyaratan, menetapkan sekolah sebagai calon sementara untuk bahan verifikasi, mengirimkan informasi ke Dinas Pendidikan Propinsi, kabupaten/kota tentang sekolah yang akan diverifikasi, dan melaksanakan verifikasi. Data-data yang diperoleh selama verifikasi selanjutnya dianalisa tiap sekolah, baik secara deskriptif kuantitatif maupun kualitatif, hasil analisa data akan dihasilkan daftar calon tetap sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 8. Langkah Awal Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

Sumber: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (2008)

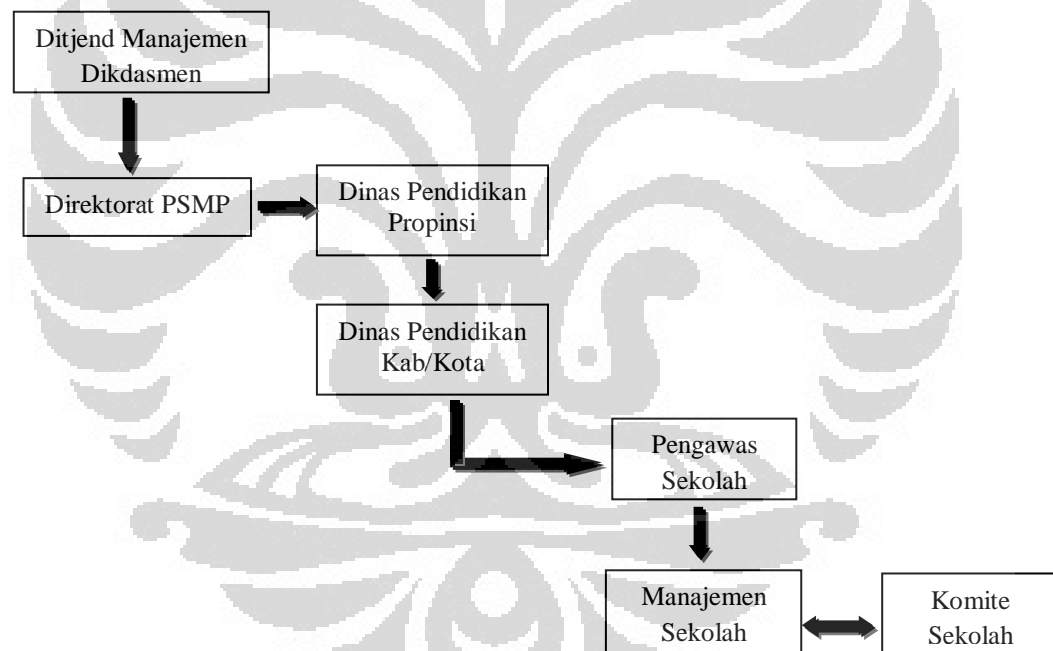
Selanjutnya Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama melaksanakan workshop untuk memberikan pemahaman tentang rintisan sekolah bertaraf internasional kepada sekolah calon rintisan sekolah bertaraf internasional. Selama workshop sekolah diberikan materi tentang berbagai aspek, seperti: kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, konsep RSBI, manajemen RSBI, dan aspek lain yang termasuk dalam IKKM dan IKKT.

Bagi sekolah yang telah ditetapkan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional diharapkan mampu melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder atau pemangku kepentingan (orangtua, siswa, komite sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan lembaga atau masyarakat). Beberapa hal pokok yang



disosialisasikan, antara lain: Landasan yuridis, program sekolah sebagai RSBI, target sekolah, peran serta stakeholder dalam penyelenggaraan RSBI, dan hal lainnya yang dianggap penting. Sosialisasi dapat dilakukan dalam berbagai strategi dan media, misalnya: melalui rapat, pertemuan, brosur, media cetak, elektronik dan sebagainya.

Jajaran birokrasi yang terkait dalam penyelenggaraan RSBI sesuai dengan kebijakan. Jajaran birokrasi tersebut meliputi: Manajemen Sekolah, Komite Sekolah, Pengawas Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



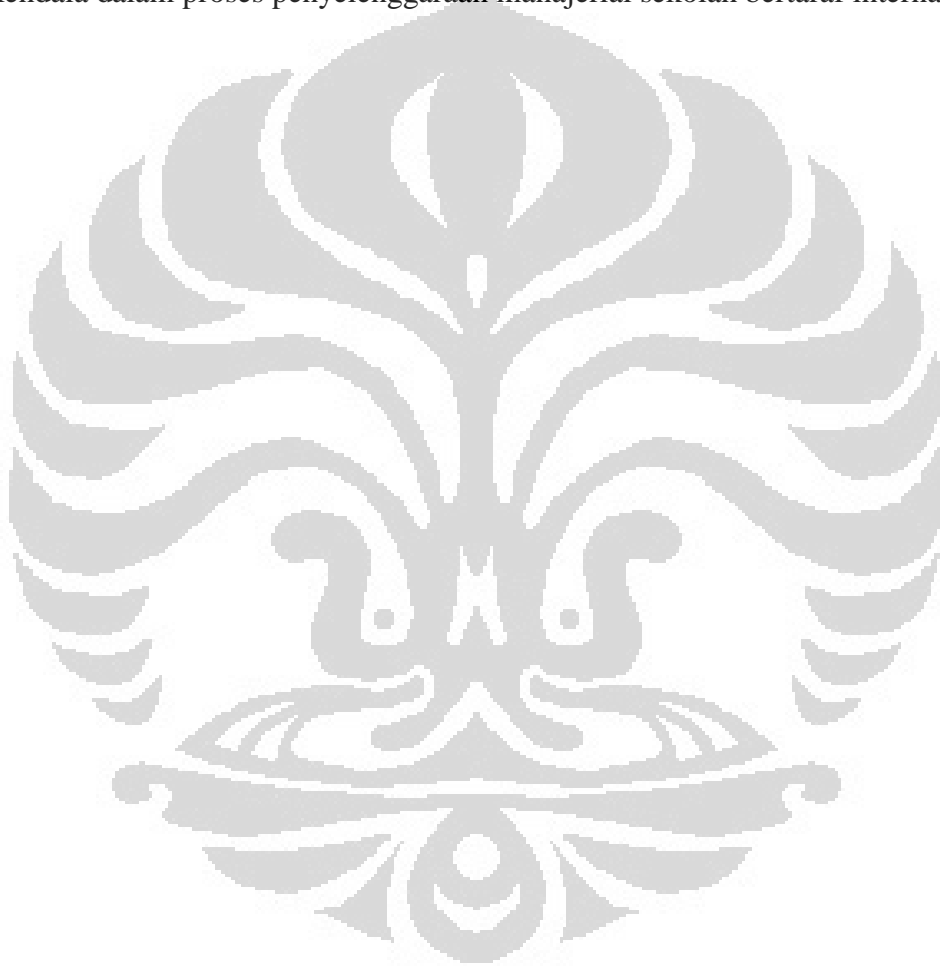
Gambar 9. Birokrasi yang terkait dalam penyelenggaraan RSBI

Sumber: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (2008)

### 2.3 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang terdahulu, dilakukan oleh Mudjito (2010) mengenai Evaluasi Kebijakan Pendidikan Nasional Tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. Temuan hasil

penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 di Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Yogyakarta ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Pada tataran kebijakan terdapat sejumlah aturan yang tidak konsisten dalam mengatur penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Ketidak konsistenan dalam arti bahwa kebijakan tertinggi sudah dirumuskan, namun peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri pendidikan nasional yang secara khusus mengatur penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional belum ada, 2). Masih adanya kendala dalam proses penyelenggaraan manajerial sekolah bertaraf internasional.

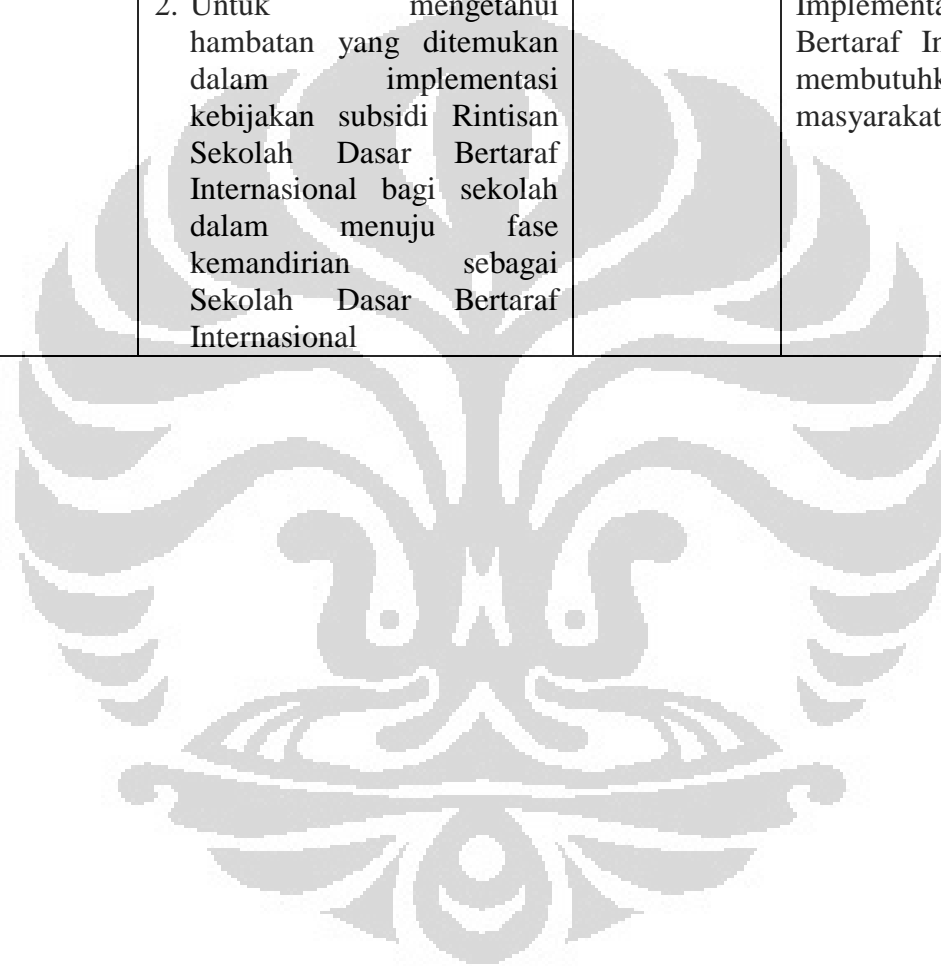


**Tabel 3. Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan**

| No. | Penulis dan Judul  | Tujuan   | Metode              | Hasil penelitian   |
|-----|--|--|---------------------|--|
| 1.  | Mudjito<br>Judul: Evaluasi Kebijakan Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. | Untuk mengevaluasi konsistensi antara rumusan kebijakan dan antar rumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan SBI. | Operations Research | Pada tataran kebijakan terdapat sejumlah aturan yang tidak konsisten dalam mengatur penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Ketidak konsistenan dalam arti bahwa kebijakan tertinggi sudah dirumuskan, namun peraturan pemerintah ataupun pereturan menteri pendidikan nasional yang secara khusus mengatur penyelenggaran Sekolah Bertaraf Internasional belum ada, 2). Masih adanya kendala dalam proses penyelenggaraan manajerial sekolah bertaraf internasional. |

|    |   |   |                               |   |
|----|---|---|-------------------------------|---|
| 2. | <p>Ratna Susiani<br/>         Judul: Kajian Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) SMK Negeri 2 Salatiga Dan Hubungannya Dalam Pengembangan Wilayah Sekitarnya</p>                                      | <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mutu dan pengembangan pendidikan melalui SBI SMK dan hubungannya dalam pengembangan wilayah sekitarnya sebagai wilayah pengaruh.</p>   | <p>Deskriptif kualitatif.</p> | <p>peningkatan mutu pendidikan melalui SBI SMKN 2 Salatiga akan berhasil jika dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan serta ditunjang oleh prasarana dan sarana pembelajaran yang kreatif dan inovatif, dengan dukungan <i>stakeholders</i> dalam pendanaan maupun kegiatan. Peningkatan mutu pendidikan melalui SBI SMK dapat mengembangkan wilayah di sekitar sekolah berupa akses jalan dan adanya perubahan penggunaan lahan untuk pengembangan fasilitas kota yang berdampak pula pada perubahan aktivitas/kegiatan masyarakat wilayah sekitar serta dapat mewujudkan salah satu fungsi Kota Salatiga sebagai kota pendidikan.</p> |
| 3. | <p>Setiawan Witaradya<br/>         Judul : Implementasi Kebijakan Subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional studi kasus pada SDNP 1 Menteng 01 Jak-Pus dan SDN Sukadamai 3 Kota Bogor</p> | <p>Tujuan Penelitian :<br/>         1. Untuk mengetahui efektivitas subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional bagi sekolah dalam menuju fase kemandirian sebagai Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional.</p> |                               | <p>Efektivitas implementasi kebijakan subsidi RSDBI pada tingkat prosedural dn efektivitas secara substansial bagi kesiapan sekolah menuju Sekolah Dasar Bertaraf Internasional berjalan efektif. Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sekolah yakni modernisasi ruang kelas dan studi banding, karena kedua kegiatan tersebut tidak mendapat dukungan dana pendamping dari pemerintah daerah.</p>   |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | <p>2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional bagi sekolah dalam menuju fase kemandirian sebagai Sekolah Dasar Bertaraf Internasional</p> | <p>Implementasi Kebijakan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional di masa mendatang membutuhkan dukungan pembiayaan dari masyarakat.</p> |
|--|--|---|---|



## **2.4 Operasional Konsep**

Dari uraian diatas tampak bahwa komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional.

Guna lebih terarahnya penelitian ini, berikut dikemukakan pengertian operasional dari konsep-konsep variabel yang diajukan;

### **2.4.1 Komunikasi**

Komunikasi adalah penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dan pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional. Beberapa unsur dalam komunikasi yang dianggap berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: transmisi atau cara penyampaian pesan, kejelasan pesan yang disampaikan, dan konsistensi dalam penyampaian pesan sehingga pelaksana kebijakan tahu apa yang harus dilakukan.

Dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional komunikasi adalah penyampaian informasi mengenai kebijakan penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional dari pembuat kebijakan dalam hal ini adalah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Departemen Pendidikan Nasional yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Propinsi Banten dan Dinas Pendidikan Kota Serang kemudian dikomunikasikan kepada sekolah-sekolah yang menyelenggarakan rintisan sekolah bertaraf internasional.

### **2.4.2 Sumberdaya**

Sumber daya yang dimaksud adalah kualitas dan kuantitas staf pelaksana, ketersediaan informasi bagi staf pelaksana, keluasan kewenangan yang diberikan kepada staf pelaksana, serta ketersediaan fasilitas pendukung bagi staf dalam rangka melaksanakan kebijakan. kualifikasi dan kualitas sumber daya manusia merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan. Kualifikasi akademik guru yang dipersyaratkan dalam penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional adalah minimal berpendidikan S2. Tidak hanya kualifikasi akademik yang dimiliki staf saja yang diperlukan tetapi juga kemampuan para staf

pelaksana tersebut dalam mengimplementasikan kebijakan rintisan sekolah bertaraf internasional.

Selain staf, ketersediaan informasi juga merupakan sumber daya yang diperlukan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staff, maupun pengadaan supervisor.

Dalam implementasi penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional staf merupakan personil Dinas Pendidikan propinsi Banten dan Kota Serang yang ditunjuk dalam menangani rintisan sekolah bertaraf internasional serta pihak sekolah penyelenggara rintisan sekolah bertaraf internasional yang terdiri atas; kepala sekolah, guru, laboran, pustakawan.

### **2.4.3 Disposisi**

Satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat

mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

#### 2.4.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Birokrasi yang dimaksud adalah seluruh jajaran pemerintahan, meliputi semua pejabat negara dan pegawai baik yang berstatus sebagai pegawai negeri maupun non-pegawai negeri (pegawai tidak tetap, mitra kerja, dan lain sebagainya), serta struktur pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat.

Pentingnya memperhatikan *fragmentation* dalam struktur birokrasi. Pembagian pusat koordinasi dan pertanggungjawaban. Atau bisa dikatakan bahwa *fragmentation* adalah terpecah-pecahnya pelaksana kebijakan karena banyaknya organisasi atau badan yang terlibat di dalamnya. Hal yang penting lainnya dalam implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik oleh organisasi adalah adanya sejenis *standard operating procedures* (SOP). SOP merupakan positivisasi atau pembakuan terhadap langkah-langkah dan prosedur yang harus dikerjakan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan.



Tabel 4. Operasional Konsep Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

| No | Variabel   | Sub Variabel   | Indikator  | Skala   |
|----|--|--|--|---|
| 1. | <p><b>Komunikasi.</b></p> <p><b>Definisi Konseptual.</b><br/>Penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dari pembuat kepada pelaksana kebijakan mengenai implementasi kebijakan terkait.</p> | <p><b>1. Transmisi</b><br/>Adanya cara penyampaian yang tepat mengenai RSBI</p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan disampaikan dinilai <b>baik</b> bila;               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Disampaikan dengan berbagai media.</li> <li>b. Frekuensi yang sering.</li> <li>c. Secara langsung</li> </ol> </li> <li>• Kebijakan disampaikan dinilai <b>kurang baik</b>:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Disampaikan dengan sebagian media.</li> <li>b. Frekuensi yang jarang.</li> <li>c. Tidak secara langsung</li> </ol> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baik</li> <li>• Kurang Baik</li> </ul>                         |
|    |  | <p><b>2. Kejelasan Pesan</b><br/>Adanya kejelasan pesan yang disampaikan mengenai RSBI</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan disampaikan dinilai <b>jelas</b> bila dipahami oleh pelaksana kebijakan.</li> <li>• Kebijakan disampaikan dinilai <b>cukup jelas</b> bila kurang dipahami oleh pelaksana kebijakan.</li> <li>• Kebijakan disampaikan dinilai <b>tidak jelas</b> bila tidak dipahami oleh pelaksana kebijakan .</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelas</li> <li>• Cukup Jelas</li> <li>• Tidak Jelas</li> </ul> |

| No | Variabel   | Sub Variabel   | Indikator  | Skala  |
|----|--|--|--|--|
| 2. | <b>Sumber-sumber</b><br><br>○ <b>Definisi Konseptual</b><br>Adalah Sumberdaya pelaksana kebijakan.<br>.<br>. | <b>1. Kuantitas SDM</b><br>Adanya rasio sumberdaya yang sesuai dengan ketentuan dalam mendukung kebijakan mengenai RSBI. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya jumlah SDM (Guru) yang sesuai dengan ketentuan dalam mendukung kebijakan mengenai RSBI.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memadai</li> <li>• Cukup Memadai</li> <li>• Kurang memadai</li> </ul> |
|    |  | <b>2. Kualitas SDM</b><br>Adanya pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi dan berpengalaman dibidangnya.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas SDM (Guru)               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuai bidang keahlian guru dengan mata pelajaran yang diajarkan.</li> <li>b. Guru mampu menerapkan TIK</li> <li>c. Kedisiplinan dari semua guru yang ada di sekolah</li> <li>d. Berpendidikan S2/S3</li> </ol> </li> <li>• Kualitas SDM (Laboran)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baik</li> <li>• Kurang Baik</li> </ul>                                |
|    |  | <b>3. Fasilitas</b><br>Adanya fasilitas pendukung pelaksanaan RSBI   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya sarana prasarana yang dinilai baik bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rasio ruang kelas yang memadai</li> <li>b. Kelengkapan bahan praktikum</li> <li>c. Kelengkapan sarana TIK</li> <li>d. Kelengkapan buku perpustakaan</li> </ol> </li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baik</li> <li>• Kurang Baik</li> </ul>                                |

| No | Variabel   | Sub Variabel   | Indikator   | Skala  |
|----|--|--|---|--|
|    |  | <b>4. Keuangan</b><br>Adanya pengelolaan keuangan yang baik dalam mendukung pelaksanaan RSBI | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan dana yang memadai</li> <li>• Ketersediaan dana yang cukup memadai</li> <li>• Ketersediaan dana yang kurang memadai</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memadai</li> <li>• Cukup Memadai</li> <li>• Kurang memadai</li> </ul> |
|    | <b>Disposisi</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Definisi Konseptual</b><br/>Kecenderungan/keinginan pelaku kebijakan memiliki disposisi terhadap kebijakan.</li> </ul> | <b>1. Komitmen</b><br>Adanya komitmen dari implementator dalam melaksanakan program RSBI     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen dinilai baik bila adanya komitmen implementator dalam melaksanakan kebijakan</li> <li>• Komitmen dinilai kurang baik bila tidak adanya komitmen implementator dalam melaksanakan kebijakan</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baik</li> <li>• Kurang baik</li> </ul>                                |
|    |  | <b>2. Penempatan Staf</b><br>Adanya penempatan staf yang sesuai dengan keahliannya.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinilai baik bila penempatan staf sesuai dengan keahliannya</li> <li>• Inilai tidak baik bila penempatan staf yang tidak sesuai dengan ahlinya.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai</li> <li>• Tidak sesuai</li> </ul>                             |
|    |  | <b>3. Insentif</b><br>Adanya intensif yang diberikan sesuai dengan porsinya                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensif yang memadai baik bagi pelaksana kebijakan bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penghargaan diberi cepat dan sesuai</li> <li>b. Penghargaan memiliki nilai penting.</li> </ol> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memadai</li> <li>• Kurang memadai</li> <li>• Tidak memadai</li> </ul> |

| No | Variabel   | Sub Variabel  | Indikator   | Skala   |
|----|--|---|---|---|
|    |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensif yang kurang memadai bagi pelaksana kebijakan bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penghargaan diberi cepat dan sesuai</li> <li>b. Penghargaan memiliki nilai penting.</li> </ol> </li> <li>• Tidak memadai bila tidak adanya intensif bagi pelaksana kebijakan.</li> </ul> |   |
|    | <p><b>Struktur Birokrasi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Definisi Konseptual</b><br/>Struktur organisasi atau pola hubungan antar jajaran birokrasi dalam pelaksanaan implementasi penyelenggaraan RSBI.</li> </ul> | <p><b>1. Prosedur Operasional Standar (POS)</b><br/>Adanya sejenis <i>standard operating procedures (SOP)</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya SOP dalam penyelenggaraan RSBI</li> <li>• Kurang tersedianya SOP dalam penyelenggaraan RSBI</li> <li>• Tidak tersedianya SOP dalam penyelenggaraan RSBI</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia</li> <li>• Kurang tersedia</li> <li>• Tidak tersedia</li> </ul> |
|    |  | <p><b>2. Fragmentation</b><br/>Adanya pembagian tugas dan pertanggungjawaban</p>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pembagian tugas dan pertanggungjawaban yang memadai</li> <li>• Adanya pembagian tugas dan pertanggungjawaban yang cukup memadai</li> <li>• Adanya pembagian tugas dan pertanggungjawaban yang kurang memadai</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memadai</li> <li>• Kurang memadai</li> <li>• Tidak memadai</li> </ul>    |

**Tabel 5. Operasional Konsep Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional**

| No. | Faktor-faktor yang Mempengaruhi  | Sub Faktor  | Informan                                      | Tujuan  |
|-----|--|---|---|---|
|     | <b>Komunikasi.</b><br><br><b>Definisi Konseptual.</b><br>Penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dari pembuat kepada pelaksana kebijakan mengenai implementasi kebijakan terkait. | <b>Transmisi</b><br>Adanya cara penyampaian yang tepat mengenai penyelenggaraan RSBI                            | Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Direktur PSMP | Untuk mengetahui cara-cara penyampaian mengenai sosialisasi kebijakan.                              |
|     |  | <b>Kejelasan Pesan</b><br>Adanya kejelasan pesan yang disampaikan mengenai RSBI.                                | Kepala Sekolah                                | Jelesan pesan yang disampaikan  |
|     | <b>Sumber-sumber</b><br><br>Adalah Sumberdaya pelaksana kebijakan.   | <b>Kuantitas SDM</b><br>Adanya sumberdaya yang sesuai dengan ketentuan dalam mendukung kebijakan mengenai RSBI. | Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Direktur PSMP | Untuk mengetahui jumlah tenaga yang mensosialisakan kebijakan dan tenaga implementator kebijakan.   |
|     |  | <b>Kualitas SDM</b><br>Adanya pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi dan berpengalaman dibidangnya.       | Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Direktur PSMP | Untuk mengetahui kualitas tenaga yang mensosialisakan kebijakan dan tenaga implementator kebijakan. |
|     | <b>Disposisi</b><br><br><b>Definisi Konseptual</b><br>Kecenderungan/keinginan pelaku kebijakan memiliki disposisi terhadap kebijakan.  | <b>4. Komitmen</b><br>Adanya komitmen dari implementator dalam melaksanakan RSBI                                | Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Direktur PSMP | Untuk mengetahui komitmen implementator terhadap penyelenggaraan RSBI.                              |
|     |  | <b>5. Penempatan Staf</b>   | Kepala Sekolah                                | Untuk mengetahui penempatan staf  |

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  | Adanya penempatan staf yang sesuai dengan keahliannya.  | Dinas Pendidikan<br>Direktur PSMP                   | dalam menjalankan program RSBI.  |
|  |  | <b>6. Insentif</b><br>Adanya intensif yang diberikan sesuai dengan porsinya                               | Kepala Sekolah<br>Dinas Pendidikan<br>Direktur PSMP | Untuk mengetahui pemberian intensif dalam pelaksanaan RSBI.                |
|  | <b>Struktur Birokrasi.</b><br><b>Definisi Konseptual</b><br>Struktur organisasi atau pola hubungan antar jajaran birokrasi dalam pelaksanaan implementasi penyelenggaraan RSBI | <b>3. Prosedur Operasional Standar (POS)</b><br>Adanya sejenis <i>standard operating procedures (SOP)</i> | Kepala Sekolah<br>Dinas Pendidikan<br>Direktur PSMP | Untuk mengetahui SOP dalam pelaksanaan RSBI.                               |
|  |  | <b>Fragmentation</b><br>Adanya pembagian tugas dan pertanggung jawaban                                    | Kepala Sekolah<br>Dinas Pendidikan<br>Direktur PSMP | Untuk mengetahui pembagian tugas dan pertanggung jawaban pelaksanaan RSBI. |

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, dibahas mengenai pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, instrument pengumpulan data, informan, teknik analisis data yang dipergunakan untuk melakukan penelitian dan analisis persepsi guru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional..

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigm positivisme yang bersifat *logico-hypotheo-verifikatif* dengan berlandaskan pada asumsi mengenai objek empiris dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini karena ingin menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika dan ingin melakukan pengujian (*retest*) terhadap teori yang sudah ada sehingga hasilnya bisa berupa penguatan, bantahan atau modifikasi terhadap teori yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme. Pendekatan ini adalah untuk mengungkap kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut nyata berjalan (Salim, 2001, h. 39)

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam dan terperinci tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di SMPN 1 Serang, Provinsi Banten. Karena penelitian ini mempertanyakan makna suatu obyek secara mendalam dan tuntas, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *mix method*, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

##### **3.2.1 Kuantitatif**

###### **3.2.1.1. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Serang Propinsi Banten yang berjumlah 49 orang. Sedangkan sampel

diambil berjumlah 30 orang dengan menggunakan tehnik random sampling, yaitu *simple random sampling*.

#### 3.2.1.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui; kuesioner. Kuesioner yang disebarakan kepada responden untuk memperoleh informasi/data tentang analisis implementasi penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional. Skala yang dipergunakan dalam penilaian ini adalah Skala Likert.

Penyusunan instrumen melalui beberapa tahapan, yaitu: berdasarkan sintesis dari teori yang dikaji tentang suatu konstruk dari variabel yang hendak diukur, kemudian dikembangkan indikator variabel dari indikator tersebut dikembangkan instrument.

#### 3.2.1.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Dalam analisis kuantitatif deskriptif, data yang diperoleh dan penelitian dideskripsikan menurut masing-masing variabel. Adapun tujuannya untuk memperoleh gambaran karakteristik penyebaran nilai setiap variabel yang diteliti dengan menghitung persentase.

### 3.3.2 Kualitatif

Metode kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap Direktur Direktorat Pembinaan SLTP Kemendiknas, Dinas Pendidikan Propinsi Banten, dan Kepala Sekolah. Wawancara tersebut dilakukan untuk mengkaji dan mengungkap secara mendalam permasalahan yang dianggap menjadi isuue penting dalam pengembangan sekolah, khususnya sekolah bertaraf internasional. Sedangkan kuantitatif dengan melakukan survey dengan menyebarkan kuesioner kepada tenaga pendidik dan kependidikan SMPN 1 Serang.

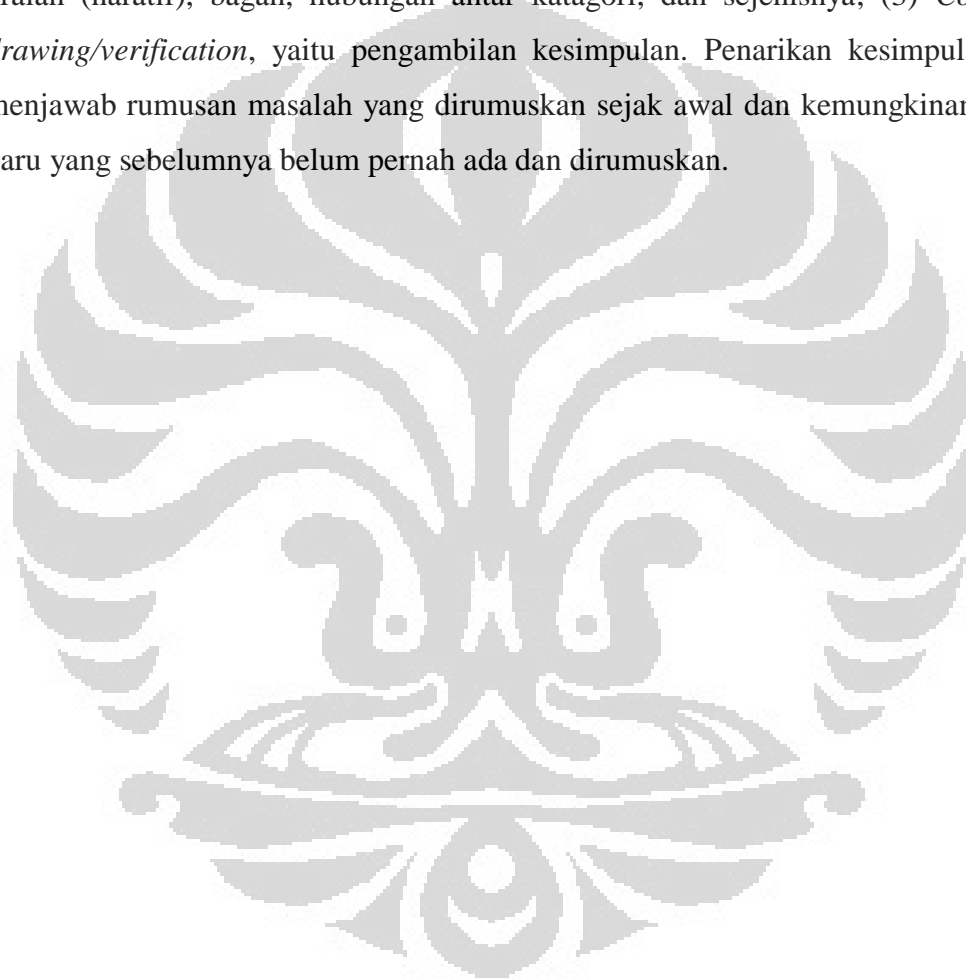
#### 3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui; wawancara terstruktur dan mendalam, penelusuran dokumen, dan observasi.

#### 3.3.2 Teknik Analisis Data



Data yang diperoleh dianalisis secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya mencapai titik jenuh, bahkan dari sisi waktu analisis dilakukan sebelum, pada saat di lapangan, dan sesudah penelitian. Secara umum aktivitas dalam analisis data ini meliputi tiga tahapan, yaitu: (1) Reduksi data, yaitu kegiatan merangkum, memilih, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu; (2) *Data display*, yaitu menampilkan atau menyajikan data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian (naratif), bagan, hubungan antar katagori, dan sejenisnya; (3) *Conclusion drawing/verification*, yaitu pengambilan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kemungkinan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada dan dirumuskan.



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM MENGENAI RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL**

Pada bab ini membahas mengenai program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan profil SMPN 1 Kota Serang.

#### **4.1 Profil Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional**

##### **4.1.1 Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional**

Era globalisasi menuntut kemampuan daya saing yang kuat antar negara dalam teknologi, manajemen dan sumber daya manusia. Keunggulan teknologi akan menurunkan biaya produksi, meningkatkan kandungan nilai tambah, memperluas keragaman produk, dan meningkatkan mutu produk. Keunggulan manajemen pengembangan SDM dapat mempengaruhi dan menentukan bagus tidaknya kinerja bidang pendidikan. Dan keunggulan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi pada tingkat internasional, akan menjadi daya tawar tersendiri dalam era globalisasi ini.

Mengingat fakta globalisasi yang menuntut persaingan ketat itu, pemerintah Indonesia telah membuat rencana-rencana strategis untuk bisa turut bersaing. Salah satunya adalah target strategis Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), bahwa pada tahun 2025 diharapkan mayoritas bangsa Indonesia merupakan insan cerdas komprehensif dan kompetitif (insan kamil).

Visi jangka panjang tersebut, kemudian ditempuh melalui Visi Kemdiknas periode 2010 s.d 2014, yaitu; Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif, dan dijabarkan dengan kelima misi Kemdiknas yang biasa disebut “5 (lima) K”, yaitu: meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan; meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan; meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan; meningkatkan kesetaraan memperoleh layanan pendidikan; dan meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan, sudah banyak program yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh Kemdiknas, salah satunya adalah Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Program SBI ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional, dan dilaksanakan oleh keempat Direktoratunya, yaitu: Direktorat Pembinaan TK dan SD, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pembinaan SMA, dan Direktorat Pembinaan SMK. Secara definitif, SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi dan melaksanakan standar nasional pendidikan (SNP) yang meliputi; standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Kedelapan aspek SNP ini kemudian diperkaya, diperkuat, dikembangkan, diperdalam, dan diperluas melalui adaptasi atau adopsi standar pendidikan dari salah satu anggota *organization for economic co-operation and development* (OECD) dan/atau negara maju lainnya, yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, serta diyakini telah mempunyai reputasi mutu yang diakui secara internasional. Dengan demikian, diharapkan SBI mampu memberikan jaminan bahwa baik dalam penyelenggaraan maupun hasil-hasil pendidikannya lebih tinggi standarnya daripada SNP. Penjaminan ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat nasional maupun internasional melalui berbagai strategi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedelapan SNP di atas disebut Indikator Kinerja Kunci Minimal (IKKM). Sementara standar pendidikan dari negara anggota OECD disebut sebagai unsur x atau Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT), yang isinya merupakan pengayaan, pendalaman, penguatan dan perluasan dari delapan unsur pendidikan tersebut.

#### **4.1.2 Pengertian Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional**

Dalam Buku Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (2007) ditegaskan bahwa sekolah/madrasah bertaraf internasional adalah sekolah/madrasah yang sudah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan

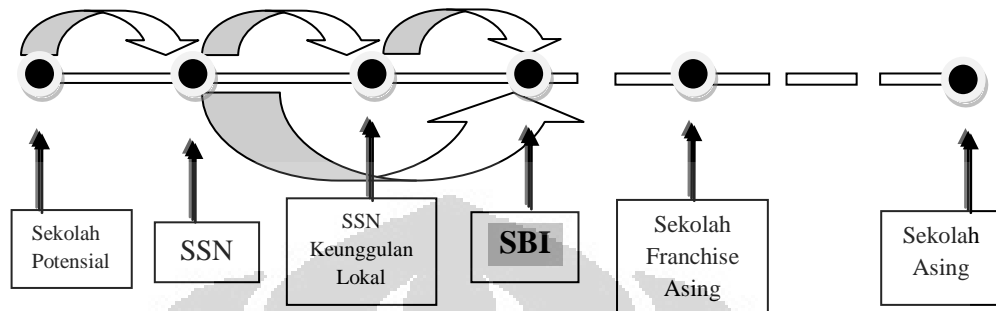
mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional.

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah suatu sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada tiap aspeknya, meliputi kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, dan penilaian serta telah menyelenggarakan dan menghasilkan lulusan dengan ciri ke-internasional-an (Slamet, 2007). Dengan kata lain sekolah bertaraf internasional (SBI) atau dalam konteks pembinaan disebut Rintisan Sekolah bertaraf Internasional (RSBI) harus telah melaksanakan dan menyelenggarakan aspek-aspek yang terkandung dalam Indikator Kinerja Kunci Minimal/IKKM dan Indikator Kinerja Kunci Tambahan/IKKT (Depdiknas, 2007). Di samping itu, SBI juga mampu mengembangkan budaya sekolah dan lingkungan sekolah yang mendukung ketercapaian standar internasional dari berbagai aspek tersebut. Oleh karena itu SBI senantiasa harus selalu dikembangkan berdasarkan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2007 tentang Penjaminan Mutu Sekolah Bertaraf Internasional yang mencakup IKKM dan IKKT seperti tersebut di atas.

Ciri-ciri keinternasionalan yang dimaksud adalah penguatan, pengayaan, perluasan, pendalaman, pengadaptasian, atau bahkan pengadopsian terhadap sebagian atau seluruh komponen sekolah dari luar negeri yang secara internasional telah terbukti mutunya, misalnya kurikulum, guru, media pendidikan, pengelolaan, organisasi, dan administrasi.

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) merupakan salah satu jenis sekolah yang berada di garis kontinum pengklasifikasian sekolah menurut sistim perundang-undangan yang berlaku. Pengelompokan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia menurut UU 20/2003 dan PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 11 dan 16 disebutkan terdapat beberapa kategori atau jenis sekolah di Indonesia. Beberapa kategori sekolah tersebut dapat

diilustrasikan secara skematik dalam suatu garis kontinum. Dalam konteks ini jenis sekolah dilihat dari kedekatan dengan kondisi lokal Indonesia.



Gambar 10. Ilustrasi Kategori Sekolah

Sumber: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (2008)

Sekolah yang berada pada ujung kontinum paling kiri adalah sekolah potensial atau Sekolah formal standar atau sekolah yang telah mencapai atau hampir mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu sekolah yang relatif masih banyak kekurangan/kelemahan untuk memenuhi kriteria sekolah yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003 pasal 35 maupun dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 yang harus memenuhi delapan aspek. Kedelapan aspek dalam SNP tersebut adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar manajemen, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Ke-delapan standar tersebut menjadi ukuran atau tolok ukur pelaksanaan berbagai program di tingkat sekolah. Di samping itu sekolah bertaraf internasional juga harus mencerminkan ciri-ciri keinternasional baik dalam proses pembelajaran maupun manajemen sekolah, dengan menggunakan kriteria penjaminan mutu Sekolah bertaraf Internasional yang dikeluarkan oleh BSNP. Dengan demikian sekolah bertaraf internasional harus dapat melakukan berbagai program yang memiliki ciri-ciri internasional dengan kualitas setaraf dengan sekolah-sekolah

yang diakui secara internasional, namun tetap menggunakan rambu-rambu yang ditetapkan dalam PP tentang Standar nasional pendidikan.

Sekolah yang berada pada garis kontinum paling ujung kanan (ektrim ke kanan) adalah sekolah asing. Sekolah ini diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang peserta didiknya adalah warga negara asing dan menggunakan sistem yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia. Kategori sekolah ini, Pemerintah Indonesia tidak membuat regulasi yang sifatnya pembinaan, namun hanya sekedar memberikan legitimasi (pengakuan) dalam rangka pemberian izin operasional.

Sekolah bertaraf internasional merupakan salah satu jenis sekolah yang ada di garis kontinum dan berada tepat di urutan ke-empat dari kiri sebelum Sekolah *Franchise Asing*. Dari sisi kebijakan keberadaan SBI menjadi sangat penting mengingat amanat Undang-undang pasal 50 ayat 3 bahwa "*pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional*". Di samping itu keberadaan SBI juga dapat dijadikan tolok ukur kualitas sekolah (khususnya SMP) dalam jajaran internasional. Dari sisi pembinaan keberadaan SBI juga dapat dijadikan wahana pembinaan sebagai "sekolah model secara internasional" di daerah untuk dapat dijadikan contoh model pengembangan sekolah di daerah, khususnya dalam menuju sekolah bertaraf internasional.

Sesuai dengan Buku Panduan Penyelenggaraan SBI yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa **SBI = (SNP + X)**, SNP meliputi 8 (delapan) standar, yaitu kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, dan penilaian; dan X adalah SNP yang diperkaya, dikembangkan, diperluas, diperdalam melalui adaptasi atau adopsi terhadap standar pendidikan yang dianggap reputasi mutunya diakui secara internasional, baik dari dalam maupun luar negeri (Depdiknas, 2007). Selanjutnya sesuai dengan Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah Bertaraf Internasional SNP diistilahkan dengan IKKM (Indikator Kinerja Kunci

Minimal) dan X diistilahkan IKKT (Indikator Kinerja Kunci Tambahan). Dengan demikian, setiap sekolah yang ditetapkan sebagai RINTISAN SBI secara bertahap namun pasti harus mengembangkan berbagai aspek tersebut sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan kondisi sekolah masing-masing.

Hingga saat ini, mayoritas sekolah bertaraf internasional masih berstatus rintisan. Ketika masih rintisan, sekolah diharapkan dapat berupaya memenuhi SNP dan mulai merintis untuk mencapai IKKT sesuai dengan kemampuan dan kondisi sekolah. Pencapaian pemenuhan IKKT sangat ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah, guru, komite sekolah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang lain. RSBI bisa disebut SBI Mandiri ketika ia bisa memenuhi IKKM dan IKKT. Ketentuan ini sebagaimana penjelasan Laporan Kebijakan Kemdiknas tahun 2007 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pada fase rintisan, ada dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu; *pertama*, tahap pengembangan kemampuan sumber daya manusia, modernisasi manajemen, dan kelembagaan; dan *kedua*, tahap konsolidasi. Dalam fase rintisan ini, bentuk pembinaannya antara lain melalui; sosialisasi tentang SBI, peningkatan kemampuan sumber daya manusia sekolah, peningkatan manajemen, peningkatan sarana dan prasarana, serta pemberian bantuan dana blockgrant dalam bentuk sharing dengan pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam jangka waktu tertentu. Diharapkan pada saatnya nanti, sekolah mampu secara mandiri untuk menyelenggarakan Sekolah Bertaraf Internasional.

#### **4.1.3 Tujuan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional**

Menurut Buku Panduan Pelaksanaan Pembinaan SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (2010), tujuan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional adalah: Untuk membina sekolah yang secara bertahap ditingkatkan dan dikembangkan komponen, aspek, dan indikator Standar Nasional Pendidikan dan sekaligus keinternasionalannya; Untuk menghasilkan suatu sekolah yang memenuhi IKKM (SNP) dan memenuhi IKKT sekaligus,

sehingga dapat menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI); Sekolah merintis dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) atau Negara maju lainnya; Sekolah merintis dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu dan bentuk penghargaan internasional lainnya; Sekolah merintis dapat menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing komparatif tinggi yang dibuktikan dengan kemampuan menampilkan keunggulan lokal ditingkat internasional; Sekolah merintis dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan bersaing kerja di luar negeri terutama bagi lulusan menengah kejuruan; Sekolah merintis dapat menghasilkan lulusan yang memiliki berperan aktif secara internasional dalam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia dari perspektif ekonomi, social-kultural, dan lingkungan hidup; Sekolah merintis dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi secara professional.

#### **4.1.4 Landasan Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional**

##### **4.1.4.1 Landasan Filosofis**

Penyelenggaraan SBI didasari oleh filosofi eksistensialisme dan esensialisme (fungsionalisme). Eksistensialisme berkeyakinan bahwa pendidikan harus menyuburkan dan mengembangkan eksistensi peserta didik seoptimal mungkin, melalui fasilitasi yang dilaksanakan lewat proses pendidikan yang bermartabat, pro perubahan (kreatif, inovatif, dan eksperimentatif), menumbuhkan dan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Jadi, peserta didik harus diberi perlakuan secara maksimal untuk mengaktualisasikan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritualnya. Para peserta didik itu merupakan aset bangsa yang sangat berharga, dan merupakan salah satu faktor daya saing yang kuat, yang secara



potensial mampu merespon tantangan global. (Ditjen Mandikdasmen, Kemendiknas, 2010)

Sementara filosofi esensialisme menekankan pada pendidikan yang harus berfungsi dan relevan dengan kebutuhan, baik kebutuhan individu, keluarga, masyarakat, baik lokal, nasional, dan internasional. Terkait dengan tuntutan globalisasi, pendidikan harus menyiapkan sumberdaya manusia Indonesia yang mampu bersaing secara internasional (Ditjen Mandikdasmen, Kemendiknas, 2010).

Ketika mengimplementasikan kedua filosofi itu, empat pilar pendidikan yaitu; *learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be*, merupakan patokan berharga bagi penyelarasan praktek-praktek penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Maksudnya, pembelajaran tidak hanya memperkenalkan pengetahuan (*learning to know*), tetapi juga harus bisa membangkitkan penghayatan dan mendorong penerapan nilai-nilai tersebut (*learning to do*) yang dilakukan secara kolaboratif (*learning to live together*) dan menjadi peserta didik yang percaya diri dan menghargai dirinya (*learning to be*). Keempat pilar ini harus ada mulai dari kurikulum, guru, proses belajar-mengajar, sarana dan prasarana, hingga sampai pada penilaiannya.

#### **4.1.4.2 Landasan Sosiologis**

Dalam kehidupan bermasyarakat dibedakan tiga macam norma, yaitu: 1) paham individualisme, 2) paham kolektivisme, dan 3) paham integralistik. Paham individualisme dilandasi teori bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Masing-masing bebas berbuat apa saja menurut keinginannya masing-masing, menyamping tidak mengganggu keamanan orang lain. Dampak individualisme menimbulkan cara pandang lebih mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Paham kolektivisme berprinsip bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak mungkin bisa bertahan hidup dan mengembangkan kehidupannya tanpa orang lain. (Ditjen Mandikdasmen, Kemendiknas, 2010)

Sementara paham integralistik merupakan paham yang menyatukan kedua paham di atas. Paham ini menyatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat (pribadi) saling berhubungan erat satu sama lain secara organis. Masyarakat integralistik menempatkan manusia tidak hanya sebagai makhluk individual, namun juga sosial. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia, berangkat dari paham integralistik yang bersumber dari empat norma kehidupan masyarakat, yaitu: 1) kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat; 2) kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat; 3) negara melindungi warga negaranya; dan 4) selaras, serasi, dan seimbang antara hak dan kewajiban (Ditjen Mandikdasmen, Kemendiknas, 2010)

Dengan pijakan ini, SBI diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia; tidak hanya meningkatkan kualitas manusia orang-perorang, melainkan juga kualitas struktur masyarakatnya.

#### **4.1.4.3 Landasan Yuridis**

Adapun landasan yuridis kebijakan program SBI ini, adalah sebagai berikut; 1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 50 ayat 2 dan 3; Ayat 2: Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional, Ayat 3: Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. 2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s.d 2025, yang mengatur perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 61 ayat 1, yaitu; Pemerintah bersama-sama Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan

menengah untuk dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional. 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 5) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 6) Peraturan pemerintah no 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 7) Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2005 s.d 2009 menyatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa, perlu dikembangkan Sekolah Bertaraf Internasional pada tingkat kabupaten/kota melalui kerjasama yang konsisten antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 8) Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2007 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Beraraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang antara lain pada halaman 10 disebutkan bahwa; “..... diharapkan seluruh pemangku kepentingan untuk menjabarkan secara operasional sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah/madrasah bertaraf internasional.....”. 9) Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi (SI) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. 10) Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah; Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru; Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan; Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan; Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan; Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana; Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 Tentang Standar Proses. 11) Permendiknas Nomor 78 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sekolah

Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah (Ditjen Mandikdasmen, Kemendiknas, 2010)

#### 4.2 Profil SMPN 1 Serang

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Serang dengan nomor statistik sekolah 201 28 04 01 001 yang beralamat di Jl. K.H.A. Fatah Hasan D/8. Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang Propinsi Banten. Tlepon/HP/Fax : 0254 200586. Sekolah ini ditetapkan sebagai Sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional pada tahun 2007. Sekolah yang memiliki ruang kelas berbasis teknologi informasi mencapai 75 % dan prosentasi guru yang telah berpendidikan S2/S3 mencapai 6 %.

Terkait penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ini, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Serang memandang perlu untuk melakukan penyesuaian atas visi dan misi sekolah. Menurut beliau visi dan misi sekolah lebih mengarah kepada pendidikan bertaraf internasional. Berikut visi dan misi SMPN 1 Serang.

Visi

“ SMPN 1 Kota Serang berlandaskan Imtaq, terdepan dalam prestasi, berjati diri Indonesia dan kompetitif secara global”.

Misi

1. Membentuk kepribadian insan yang bertaqwa.
2. Melaksanakan kurikulum yang kompetitif secara global.
3. Mengembangkan kurikulum yang ada menjadi kurikulum bertaraf internasional
4. Mewujudkan proses pembelajaran bertaraf internasional
5. Melaksanakan dan mengembangkan pembelajaran menggunakan ICT
6. Meningkatkan mutu pembelajaran yang berwawasan internasional.
7. Meningkatkan kinerja professional kepala sekolah, guru, dan staf administrasi serta karyawan melalui program pembinaan personil yang bertaraf internasional.
8. Meningkatkan kompetensi kepala sekolah, guru, staf administrasi, karyawan dan siswa agar dapat berkembang secara optimal berlandaskan imtaq.

9. Menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Bangsa Indonesia.
10. Mengembangkan kinerja sekolah menuju standar ISO: 9001.

**a. Siswa**

**Tabel 6. Data Siswa 5 (lima tahun terakhir) siswa regular**

| Tahun.<br>Pelajaran | Jumlah<br>Pendaftar | Kelas VII       |                  | Kelas VIII      |                  | Kelas IX        |                  | Jumlah |        |
|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------|--------|
|                     |                     | Jumlah<br>Siswa | Jumlah<br>Rombel | Jumlah<br>Siswa | Jumlah<br>Rombel | Jumlah<br>Siswa | Jumlah<br>Rombel | Siswa  | Rombel |
| 2007/2008           | 651                 | 336             | 8                | 420             | 9                | 399             | 9                | 1155   | 26     |
| 2008/2009           | 498                 | 330             | 8                | 330             | 8                | 410             | 9                | 1070   | 28     |
| 2009/2010           | 602                 | 335             | 6                | 332             | 8                | 434             | 8                | 1021   | 30     |
| 2010/2011           | 659                 | 201             | 6                | 347             | 8                | 328             | 8                | 876    | 27     |
| 2011/2012           | 590                 | 248             | 9                | 197             | 7                | 343             | 11               | 788    | 27     |

Sumber: SMPN 1 Serang (2011)

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah siswa di SMPN 1 Kota Serang, terjadi fluktuatif atau jumlah siswa yang berbeda-beda tiap tahun.

**Tabel 7. Data Siswa 5 (lima tahun terakhir) siswa RSBI**

| Tahun. Pelajaran | Jumlah Pendaftar | Kelas VII    |               | Kelas VIII   |               | Kelas IX     |               | Jumlah       |               |
|------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                  |                  | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel |
| 2007/2008        | 216              | 24           | 1             |              |               |              |               | 24           | 1             |
| 2008/2009        | 532              | 48           | 2             | 23           | 1             |              |               | 71           | 3             |
| 2009/2010        | 556              | 120          | 5             | 48           | 2             | 23           | 1             | 191          | 8             |
| 2010 / 2011      | 629              | 210          | 7             | 120          | 5             | 47           | 1             | 377          | 13            |
| 2011 / 2012      | 590              | 248          | 9             | 197          | 7             | 111          | 5             | 466          | 21            |

Sumber: SMPN 1 Serang (2011)

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah siswa rintisan sekolah bertaraf internasional di SMPN 1 Kota Serang mengalami kenaikan jumlah pendaftar setiap tahunnya kecuali pada tahun ajaran 2011/2012. Namun, setiap tahun jumlah siswa yang mengikuti kelas rintisan sekolah bertaraf internasional mengalami kenaikan. Hal ini, dikarenakan pada tahun 2007/2008, SMPN 1 Serang baru merintis atau membuka RSBI untuk umum di sekolah, pada awalnya hanya murid-murid tertentu yang mengikuti program RSBI yang dijadikan dalam satu kelas. Mulai tahun 2009/2010 SMPN 1 Serang memiliki siswa yang mengikuti program RSBI dari kelas tujuh sampai kelas sembilan.

## b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

**Tabel 8. Tingkat Pendidikan dan Status Guru SMPN1 Serang**

| No.           | Tingkat Pendidikan | Jumlah dan Status Guru |           |                |          | Jumlah    |
|---------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|----------|-----------|
|               |                    | GT/PNS                 |           | GTT/Guru Bantu |          |           |
|               |                    | L                      | P         | L              | P        |           |
| 1.            | S.2/S.3            | 4                      | 4         | -              | -        | 8         |
| 2.            | S.1                | 12                     | 12        | 3              | 5        | 32        |
| 3.            | D-4                | -                      | -         | -              | -        | -         |
| 4.            | D.3/Sarmud         | 2                      | 4         | 1              | 2        | 9         |
| 5.            | D.2                | -                      | -         | -              | -        | -         |
| 6.            | D.1                | -                      | -         | -              | -        | -         |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>18</b>              | <b>20</b> | <b>4</b>       | <b>7</b> | <b>49</b> |

Sumber: SMPN 1 Serang (2011)

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah guru di SMPN 1 Kota Serang yang memiliki kualifikasi akademik S2/S3 berjumlah 8 guru atau 16,3 %, ini berarti bahwa SMPN1 Serang belum memenuhi persyaratan dari kualifikasi guru. Pendidik memiliki peranan yang strategis karena mempunyai tugas profesional untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran serta melakukan bimbingan dan pelatihan. Sebagai tenaga pendidik yang telah memenuhi standar nasional, apabila menjalankan tugas dan fungsinya pada sekolah yang merintis ataupun telah bertaraf internasional dituntut juga memenuhi indikator kinerja kunci tambahan (IKKT) dalam upaya memenuhi tuntutan pencapaian mutu pendidikan yang bertaraf internasional. indikator kinerja kunci tambahan (IKKT) sebagai guru pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional salah satunya adalah minimal 20 % guru berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A.

**Table 9. Jumlah Guru dengan tugas mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan (keahlian)**

| No  | Guru             | Jumlah Guru dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas mengajar |              |           |           | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan yang TIDAK sesuai dengan tugas mengajar |              |          |           | Jml       |
|-----|------------------|---|--------------|-----------|-----------|--|--------------|----------|-----------|-----------|
|     |                  | D1<br>D2  | D3<br>Sarmud | S1<br>D4  | S2/<br>S3 | D1<br>D2   | D3<br>Sarmud | S1<br>D4 | S2/<br>S3 |           |
| 1.  | IPA              |   |              | 5         | 2         |  |              |          |           | 7         |
| 2.  | Matematika       |   | 2            | 4         | 2         |  |              |          |           | 8         |
| 3.  | Bahasa Indonesia |   |              | 5         | 1         |  |              |          |           | 6         |
| 4.  | Bahasa Inggris   |   | 1            | 3         | 1         |  |              |          |           | 5         |
| 5.  | Pendidikan Agama |   | 1            | 2         |           |  |              |          |           | 3         |
| 6.  | IPS              |   |              | 2         | 1         |  |              | 1        |           | 4         |
| 7.  | Penjaskes        |   | 1            | 2         |           |  |              |          |           | 3         |
| 8.  | Seni Budaya      |   | 1            | 2         |           |  |              |          |           | 3         |
| 9.  | PKn              |   |              | 2         | 1         |  |              |          |           | 3         |
| 10. | TIK/Keterangan   |   | 2            | 2         |           |  |              |          |           | 4         |
| 11. | BK               |   |              | 1         |           |  |              |          |           | 1         |
| 12. | PTD              |   | 1            | 1         |           |  |              |          |           | 2         |
|     | <b>Jumlah</b>    |   | <b>9</b>     | <b>31</b> | <b>8</b>  |  |              | <b>1</b> |           | <b>49</b> |

Sumber: SMPN 1 Serang (2011)

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah guru di SMPN 1 Kota Serang yang mengajar berdasarkan kesesuaian dengan latar belakang pendidikannya atau keahliannya sangat tinggi, hanya satu orang guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakangnya yaitu guru yang mengajar mata pelajaran Ilmu pengetahuan sosial.



**Tabel 10. Pengembangan kompetensi/profesionalisme guru**

| No. | Jenis Pengembangan Kompetensi                | Jumlah Guru yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi/profesionalisme |           |        |
|-----|--|---|-----------|--------|
|     |  | Laki-laki   | Perempuan | Jumlah |
| 1.  | Penataran KBK/KTSP                           | 17  | 20        | 37     |
| 2.  | Penataran Metode Pembelajaran (termasuk CTL) | 17  | 20        | 37     |
| 3.  | Penataran PTK                                | 2   | 3         | 5      |
| 4.  | Penataran Karya Tulis Ilmiah                 | 22  | 27        | 49     |
| 5.  | Sertifikasi Profesi/Kompetensi               | 3   | 4         | 7      |
| 6.  | Penataran PTBK                               |   | 1         | 1      |
| 7.  | Penataran PTD                                | 3   | 2         | 3      |

Sumber: SMPN 1 Serang (2011)

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah guru di SMPN 1 Kota Serang yang telah mengikuti kegiatan dalam pengembangan kompetensi dan profesional guru sangat baik. Sebagian besar guru telah mengikuti jenis pengembangan penataran karya tulis ilmiah, penataran pengembangan kurikulum baik KBK maupun KTSP, serta penataran dalam pengembangan metode pembelajaran.

Tabel 11. Tenaga Kependidikan : Tenaga pendukung

| No  | Tenaga Pendukung      | Jumlah Tenaga Pendukung dan Kualifikasi pendidikannya |           |        |        |        |          | Jumlah tenaga pendukung berdasarkan status dan Jenis kelamin |          |          |          | Jml       |
|-----|-----------------------|---|-----------|--------|--------|--------|----------|--|----------|----------|----------|-----------|
|     |                       | SMP   | SMA       | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | S<br>1   | PNS  |          | Honorer  |          |           |
|     |                       |   |           |        |        |        |          | L  | P        | L        | P        |           |
| 1.  | Tata Usaha            |   | 4         |        |        |        | 3        | 1  | 2        | 1        | 3        | 7         |
| 2.  | Perpustakaan          |   | 1         |        |        |        |          |  |          | 1        |          | 1         |
| 3.  | Laboran Lab IPA       |   |           |        |        |        |          |  |          |          |          |           |
| 4.  | Teknisi lab. Komputer |   |           |        |        |        |          |  |          |          |          |           |
| 5.  | Laboran lab. Bahasa   |   |           |        |        |        |          |  |          |          |          |           |
| 6.  | PTD                   |   | 1         |        |        |        |          |  |          | 1        |          | 1         |
| 7.  | Kantin                |   | 2         |        |        |        |          |  |          |          | 2        | 2         |
| 8.  | Penjaga Sekolah       |   | 5         |        |        |        |          |  |          | 5        |          | 5         |
| 9.  | Tukang kebun          |   |           |        |        |        |          |  |          |          |          |           |
| 10. | Keamanan              | 1   |           |        |        |        |          |  |          | 1        |          | 1         |
| 11. | Lainnya....           |   |           |        |        |        |          |  |          |          |          |           |
|     | <b>Jumlah</b>         | <b>1</b>  | <b>13</b> |        |        |        | <b>3</b> | <b>1</b>   | <b>2</b> | <b>9</b> | <b>5</b> | <b>17</b> |

Sumber: SMPN 1 Serang

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kependidikan atau tenaga pendukung di SMPN 1 Kota Serang dapat dilihat bahwa tenaga tata usaha dan penjaga sekolah yang lebih banyak, bahkan tenaga pendukung secara langsung dalam proses pembelajaran yaitu tenaga laboran IPA, Komputer dan Bahasa tidak ada. Selain itu, sebagai sekolah

rintisan bertaraf internasional maka sekolah dapat memiliki sekurang-kurangnya adalah kepala sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan, dan juga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

**Tabel 12. Koleksi Buku Perpustakaan**

| No            | Jenis  | Jumlah       | Kondisi    |              |
|---------------|--|--------------|------------|--------------|
|               |  |              | Rusak      | Baik         |
| 1.            | Buku siswa/Pelajaran (Semua mata pelajaran)                        | 10145        | 500        | 9645         |
| 2.            | Buku bacaan (misal novel, buk ilmu pengetahuan dan teknologi, dsb) | 758          |            | 758          |
| 3.            | Buku referensi (misalnya kamus, enslikopedia, dsb)                 | 423          |            | 423          |
| 4.            | Jurnal   |              |            |              |
| 5.            | Majalah  | 50           |            | 50           |
| 6.            | Surat kabar  | 360          |            | 360          |
| 7.            | Lainnya  | 2600         | 300        | 2300         |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>14336</b> | <b>800</b> | <b>13536</b> |

Sumber: SMPN 1 Serang (2011)

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah buku di SMPN1 Serang sangat mendukung dalam proses pembelajaran karena jumlah buku secara keseluruhan yang layak 13536 berbanding jumlah siswa 788 atau lebih kurang 17 buku berbanding 1 siswa. Jumlah buku pelajaran yang layak atau kondisi baik 9645 berbanding dengan jumlah siswa 788 atau 12 buku berbanding 1 siswa.

Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan, Standar jumlah buku teks pelajaran di

perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik, Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP, Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

**Table 13. Alat/Bahan di Laboratorium/Ruang Keterampilan/Ruang Multimedia**

| No. | Alat/Bahan    | Jumlah              |                          |                          |                        | Kualitas |   |   |    | Kondisi        |                 |      |
|-----|---------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------|---|---|----|----------------|-----------------|------|
|     |               | < 25<br>% dr<br>keb | 25-<br>50%<br>dr<br>keb. | 50-<br>100%<br>dr<br>keb | 75-<br>100<br>%<br>keb | K        | C | B | SB | Rusak<br>Berat | Rusak<br>ringan | Baik |
| 1.  | Lab. IPA      |                     | V                        |                          |                        | V        |   |   |    | V              |                 |      |
| 2.  | Lab. Bahasa   | V                   |                          |                          |                        |          | V |   |    |                | V               |      |
| 3.  | Lab. Komputer | V                   |                          |                          |                        | V        |   |   |    |                | V               |      |
| 4.  | Keterampilan  |                     |                          |                          |                        |          |   |   |    |                |                 |      |
| 5.  | PTD           |                     | v                        |                          |                        | V        |   |   |    |                | v               |      |
| 6.  | Kesenian      | V                   |                          |                          |                        | V        |   |   |    | v              |                 |      |
| 7.  | Multimedia    |                     |                          |                          |                        |          |   | V |    |                |                 | V    |

Sumber: SMPN 1 Serang (2011)

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah Alat/Bahan di Laboratorium/Ruang Keterampilan/Ruang Multimedia di SMPN1 Serang masih kurang, hanya di bawah 50 % dari kebutuhan. Sedangkan dari kualitasnya masih banyak yang kurang, begitu juga halnya dengan kondisi alat banyak yang rusak.

Pencapaian indikator kinerja kunci tambahan (IKKT) aspek standar sarana dan prasarana meliputi: setiap kelas dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK; perpustakaan dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TK di seluruh

dunia; dan dilengkapi dengan ruang multi media, ruang unjuk seni budaya, fasilitas olahraga, klinik dan sebagainya; laboratorium tambahan seperti pengembangan laboratorium alam, *green house*, dan sebagainya; ruang data dan informasi; ruang riset dan pengembangan bagi pendidik dan lainnya; ruang para wakil kepala sekolah; ruang seminar, diskusi, workshop.

**Table 14. Sumber dana 2 (dua) tahun terakhir**

| No | Sumber Dana   | Tahun 2009/2010 | Tahun 2010/2011 |
|----|---|-----------------|-----------------|
| 1. | Rutin   |                 |                 |
| 2. | APBD Kab/Kota   |                 | 37.700.000      |
| 3. | APBD Propinsi   | 100.000.000     | 100.000.000     |
| 4. | BOS   | 500.269.099     | 692.866.943     |
| 5. | Komite Sekolah/Orangtua siswa (Jumlah keseluruhan iuran bulanan dan sumbangan pendidikan bagi siswa baru) | 999.187.567     | 642.791.998     |
| 6. | School Grant  |                 |                 |
| 7. | Grant Pendidikan kecakapan hidup  |                 |                 |
| 8. | Subsidi Imbal Swadaya   |                 |                 |
| 9. | Grant SSN/RSBI  | 300.000.000     | 130.000.000     |
|    | Jumlah  |                 |                 |

Sumber: SMPN 1 Serang (2011)

Dari data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa bantuan dari APBD baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota masih sedikit dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah pusat bahkan jauh di bawah bantuan atau sumbangan dari orangtua atau masyarakat. Bantuan dari orangtua menurut Kepala Sekolah SMPN1 Serang yaitu pada saat siswa pertama masuk atau saat kelas.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan hasil pengolahan data penelitian dalam bentuk deskripsi data dan analisa data.

#### 5.1 Deskripsi dan Analisis Data

Penelitian ini terdapat 4 dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi organisasi. Penyajian data mengenai dimensi tersebut dideskripsikan perhitungan prosentase berdasarkan responden secara keseluruhan.

Sedangkan untuk tiap dimensi, dari 30 responden dan jumlah butir pernyataan tentang tiap dimensi dengan skor pilihan jawaban 1 sampai 5. Skor maksimal yang dapat diperoleh dari jumlah responden dikalikan jumlah butir pernyataan dikalikan skor pilihan jawaban maksimal.

Berdasarkan skor aktual yang diperoleh dari masing-masing kelompok responden, dan data responden secara keseluruhan, selanjutnya interpretasi skor dikelompokkan menjadi lima kategori sesuai dengan yang dikemukakan oleh Djaali dan Pudji Muljono (2004: 171). Kelima kategori tersebut sebagai berikut:

**Tabel 15. Kriteria penilaian.**

| No. | Kategori                        | Jumlah Skor |
|-----|---------------------------------|-------------|
| 1.  | Sangat Baik/Jelas/Memadai       | 126 – 150   |
| 2.  | Baik/Jelas/Memadai              | 102 – 125   |
| 3.  | Cukup Baik/Jelas/Memadai        | 78 – 101    |
| 4.  | Tidak Baik/Jelas/Memadai        | 54 – 77     |
| 5.  | Sangat Tidak Baik/Jelas/Memadai | 30 – 53     |

Sumber: Djaali dan Pudji Muljono (2004: 171)

Skor maksimal untuk tiap-tiap butir 5, maka jumlah skor maksimal setiap butir adalah 5 dikalikan 30 sama dengan 150 dan skor minimal tiap-tiap butir 1, maka jumlah skor minimal tiap-tiap butir adalah 1 dikalikan 30 sama dengan 30. Jadi rentang skor yang mungkin diperoleh setiap skor adalah 30 - 150. Sebelum

menentukan predikat, peneliti terlebih dahulu menentukan tolak ukur atau kriteria yang akan dijadikan patokan penilaian selanjutnya, tolak ukur yang ditentukan adalah kriteria jumlah skor dengan kategori, seperti tabel di atas.

Selanjutnya jawaban responden dianalisis berdasarkan sub dimensi dari masing-masing dimensi, yaitu: komunikasi terdiri atas sub dimensi transmisi (cara penyampaian dan kejelasan pesan; sumber daya terdiri atas sub dimensi sumberdaya manusia, fasilitas (sarana dan prasarana) dan keuangan; Disposisi terdiri atas sub dimensi komitmen, penempatan staf dan insentif; dan struktur birokrasi terdiri dari sub dimensi fragmentasi dan prosedur operasional standar.

## 5.2 Deskripsi dan Analisis Data Dimensi Komunikasi

### 5.2.1 Tanggapan Guru Terhadap Sub Dimensi Transmisi

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap komunikasi sub dimensi transmisi atau cara penyampaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Pemerintah Propinsi atau Dinas Pendidikan Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Suku dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan kategori jawaban Selalu, Sering, Kadang-kadang, Jarang, dan Tidak Pernah. Diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 16. Sosialisai Pemerintah Pusat**

| Pernyataan                         | Kategori Jawaban |        |                 |         |                        |         |                 |         |                       |        | Jml skor  | Ket.              |
|------------------------------------|------------------|--------|-----------------|---------|------------------------|---------|-----------------|---------|-----------------------|--------|-----------|-------------------|
|                                    | Selalu (skor 5)  |        | Sering (skor 4) |         | Kadang-kadang (skor 3) |         | Jarang (skor 2) |         | Tidak Pernah (skor 1) |        |           |                   |
| Sosialisasi melalui berbagai media | 3                | 10 %   | 12              | 40 %    | 10                     | 33,3%   | 4               | 13,3 %  | 1                     | 3,33 % | 102       | Baik              |
| Sosialisasi melalui seminar        | 2                | 6,67%  | 6               | 20 %    | 15                     | 50 %    | 6               | 20 %    | 1                     | 3,33 % | 92        | Cukup baik        |
| Sosialisasi melalui workshop       | 1                | 3,33 % | 8               | 26,67 % | 12                     | 40 %    | 7               | 20,84 % | 2                     | 6,67 % | 89        | Cukup baik        |
| Sosialisasi melalui pelatihan      | 1                | 3,33 % | 11              | 34,14 % | 7                      | 20,84 % | 8               | 26,67 % | 3                     | 10 %   | 89        | Cukup baik        |
| <b>Rata-rata</b>                   |                  |        |                 |         |                        |         |                 |         |                       |        | <b>93</b> | <b>Cukup baik</b> |

Sumber: Peneliti (2012)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, pada transmisi 1, yaitu *sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui berbagai media*, responden yang menjawab kategori *tidak pernah* sebanyak 1 orang atau 3,33 %, yang menjawab kategori *jarang* sebanyak 4 orang atau 13,33 %, yang menjawab kategori *kadang-kadang* 10 orang atau 33,33 %, yang menjawab kategori *sering* 12 orang atau 40 %, dan sedangkan menjawab kategori *selalu* 3 orang atau 10 %.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) sering melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional, hal ini ditunjukkan dengan prosentase responden yang menjawab kategori sering 40 % dan yang menjawab kategori *selalu* 10 %. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada transmisi 1 dengan skor 102 dengan kategori baik.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sekolah SMPN 1 Serang, diketahui bahwa pemerintah pusat sering melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional:

*“ pemerintah sering melakukan sosialisasi, melalui training atau pelatihan namun tidak adanya sosialisasi yang berkesinambungan dan secara kontinyu.”*

Berkaitan dengan kebijakan, Edwards III menyatakan bahwa *communication* adalah penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dan pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Pesan tersebut harus jelas, akurat, dan konsisten sehingga pelaksana kebijakan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam analisis implementasi kebijakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi yaitu: cara penyampaian pesan dan kejelasan pesan.

Program penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional ini pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator adalah konsep umum penyelenggaraan penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional. Sosialisasi kepada pihak lain yang berkepentingan melalui sosialisasi



program. Sosialisasi dilakukan secara berjenjang atau tingkatan, yaitu: sosialisasi tingkat pusat, sosialisasi tingkat propinsi, sosialisasi tingkat kabupaten/kota, sosialisasi tingkat kecamatan dan sosialisasi tingkat sekolah.

Sosialisasi tingkat pusat dilakukan untuk menginformasikan program penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional kepada pemerintah propinsi dan dinas pendidikan. Namun, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah pusat (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama) melakukan sosialisasi sering langsung kepada guru-guru berdasarkan bidang studi.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 30 responden, pada transmisi 2, yaitu *sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kegiatan seminar*, responden yang menjawab kategori *tidak pernah* sebanyak 1 orang atau 3,33 %, yang menjawab kategori *jarang* sebanyak 6 orang atau 20 %, yang menjawab kategori *kadang-kadang* 15 orang atau 50 %, yang menjawab kategori *sering* 6 orang atau 20 %, dan sedangkan menjawab kategori *selalu* 2 orang atau 6,67 %.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) kadang-kadang melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional melalui kegiatan seminar, hal ini ditunjukkan dengan prosentase responden yang menjawab kategori sering 50 % dan yang menjawab kategori *sering* 20 %. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada transmisi 1 dengan skor 92 dengan kategori cukup baik.

Pada transmisi 3, yaitu *sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kegiatan workshop*, responden yang menjawab kategori *tidak pernah* sebanyak 2 orang atau 6,67 %, yang menjawab kategori *jarang* sebanyak 7 orang atau 23,33 %, yang menjawab kategori *kadang-kadang* 12 orang atau 40 %, yang menjawab kategori *sering* 8 orang atau 26,67 %, dan sedangkan menjawab kategori *selalu* 1 orang atau 3,33 %.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) kadang-kadang melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional

melalui kegiatan seminar, hal ini ditunjukkan dengan prosentase responden yang menjawab kategori sering 40 % dan yang menjawab kategori *sering* 26,67 %. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada transmisi 1 dengan skor 89 dengan kategori cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara:

*“ Untuk mengikuti sosialisasi, belum semua guru mengikuti tapi sudah lebih dari 50 %, biasanya mengikuti kegiatan workshop “.*

Untuk membangun dan mengembangkan staf yang profesional perlu diadakan program pelatihan secara internal dan eksternal yang diikuti oleh komunitas sumberdaya manusia, program ini mulai dari rentang whorkshop hingga seminar dua pekan serta pengalaman pengembangan yang spesifik

Pada transmisi 4, yaitu *sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kegiatan pelatihan*, responden yang menjawab kategori *tidak pernah* sebanyak 3 orang atau 10 %, yang menjawab kategori *jarang* sebanyak 8 orang atau 26,67 %, yang menjawab kategori *kadang-kadang* 7 orang atau 20,84 %, yang menjawab kategori *sering* 11 orang atau 34,14 %, dan sedangkan menjawab kategori *selalu* 1 orang atau 3,33 %.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) sering melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional melalui kegiatan pelatihan, hal ini ditunjukkan dengan prosentase responden yang menjawab kategori sering 34,14 % dan yang menjawab kategori *kadang-kadang* 20,84 %. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada transmisi 4 dengan skor 89 dengan kategori cukup baik. Hal ini juga terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SMPN 1 Serang:

*“..Pemerintah sering melakukan training-tarining kepada guru-guru penyelenggara sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional, pertama-tama pemerintah melaksanakan di Surabaya. Training dilakukan berdasarkan mata pelajaran”.*

Salah satu faktor keberhasilan suatu kebijakan adalah adanya sosialisasi berbentuk pelatihan, karena hal ini akan menambah pemahaman pelaksana dalam melaksanakan atau menjalankan kebijakan. Pelatihan merupakan suatu program yang diharapkan dapat memberikan stimulus kepada staf untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu

Pada sub dimensi transmisi atau cara penyampaian sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, secara keseluruhan rata-rata skor 93 , artinya bahwa transmisi dipandang oleh para guru masih baik atau pemerintah selalu melakukan sosialisasi dengan berbagai media.

**Tabel 18. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi**

| Pernyataan                         | Kategori Jawaban |       |                 |         |                        |      |                 |         |                       |        | Jml skor | Ket.       |
|------------------------------------|------------------|-------|-----------------|---------|------------------------|------|-----------------|---------|-----------------------|--------|----------|------------|
|                                    | Selalu (skor 5)  |       | Sering (skor 4) |         | Kadang-kadang (skor 3) |      | Jarang (skor 2) |         | Tidak Pernah (skor 1) |        |          |            |
| Sosialisasi melalui berbagai media | 2                | 6,67% | 3               | 10 %    | 9                      | 30%  | 14              | 46,67 % | 2                     | 6,67 % | 79       | Cukup Baik |
| Sosialisasi melalui seminar        | 2                | 6,67% | 3               | 10 %    | 12                     | 40 % | 10              | 33,33 % | 2                     | 6,67 % | 80       | Cukup baik |
| Sosialisasi melalui workshop       | 1                | 3,33% | 5               | 16,67 % | 10                     | 50 % | 12              | 40 %    | 2                     | 6,67 % | 81       | Cukup baik |
| Sosialisasi melalui pelatihan      | 1                | 3,33% | 4               | 13,3 %  | 12                     | 40 % | 10              | 33,33 % | 3                     | 10 %   | 76       | Tidak baik |
| <b>Rata-rata</b>                   |                  |       |                 |         |                        |      |                 |         |                       |        | 79       | Cukup baik |

Sumber: Peneliti (2012)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, pada transmisi 1, yaitu *sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah propinsi (Dinas Pendidikan) melalui berbagai media*, responden yang menjawab kategori *tidak pernah* sebanyak 2 orang atau 6,67 %, yang menjawab kategori *jarang* sebanyak 14 orang atau 46,67 %, yang menjawab kategori *kadang-kadang* 9 orang atau 30 %, yang menjawab kategori *sering* 3 orang atau 10 %, dan sedangkan menjawab kategori *selalu* 2 orang atau 6,67 %.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah *propinsi (Dinas Pendidikan)* jarang melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional, hal ini ditunjukkan dengan prosentase responden yang menjawab kategori kadang-kadang 30 % dan yang menjawab kategori *jarang* 46,67 %. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada transmisi 1 dengan skor 79 dengan kategori cukup baik.

*“...dinas pendidikan jarang melakukan sosialisasi kepada sekolah, bahkan yang melakukan para guru mensosialisasikan ke sekolah-sekolah dasar atau SD.”*

Berkaitan dengan kebijakan tentang penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional, komunikasi disini bisa dikembangkan lebih jauh bukan saja penyampaian program kerja kepada struktur organisasi pelaksana. Tidak kalah penting untuk mengkomunikasikan kepada Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta kepada Pemerintah Daerah yang berkuasa dan tentu kepada SMP yang menjadi target implementasi. Hal ini lazimnya disebut sosialisasi kebijakan.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, pada transmisi 2, yaitu *sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah propinsi (Dinas Pendidikan) melalui kegiatan seminar*, responden yang menjawab kategori *tidak pernah* sebanyak 2 orang atau 6,67 %, yang menjawab kategori *jarang* sebanyak 10 orang atau 33,33 %, yang menjawab kategori *kadang-kadang* 12 orang atau 40 %, yang menjawab kategori *sering* 3 orang atau 10 %, dan sedangkan menjawab kategori *selalu* 2 orang atau 6,67 %.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah *propinsi (Dinas Pendidikan)* kadang-kadang melakukan sosialisasi melalui seminar tentang penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional, hal ini ditunjukkan dengan prosentase responden yang menjawab kategori kadang-kadang 40 % dan yang menjawab kategori *jarang* 33,33 %. Sedangkan

dilihat dari skor yang diperoleh pada transmisi 2 dengan skor 80 dengan kategori cukup baik.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, pada transmisi 3, yaitu *sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah propinsi (Dinas Pendidikan) melalui kegiatan workshop*, responden yang menjawab kategori *tidak pernah* sebanyak 2 orang atau 6,67 %, yang menjawab kategori *jarang* sebanyak 12 orang atau 40 %, yang menjawab kategori *kadang-kadang* 10 orang atau 33,33 %, yang menjawab kategori *sering* 5 orang atau 16,67 %, dan sedangkan menjawab kategori *selalu* 1 orang atau 3,33 %.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah *propinsi (Dinas Pendidikan)* kadang-kadang melakukan sosialisasi melalui kegiatan workshop tentang penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional, hal ini ditunjukkan dengan prosentase responden yang menjawab kategori kadang-kadang 50 % dan yang menjawab kategori *jarang* 20 %. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada transmisi 3 dengan skor 81 dengan kategori cukup baik.

Pada transmisi 4, yaitu *sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah propinsi (Dinas Pendidikan) melalui kegiatan pelatihan*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, responden yang menjawab kategori *tidak pernah* sebanyak 3 orang atau 10 %, yang menjawab kategori *jarang* sebanyak 10 orang atau 33,33 %, yang menjawab kategori *kadang-kadang* 12 orang atau 40 %, yang menjawab kategori *sering* 3 orang atau 10 %, dan sedangkan menjawab kategori *selalu* 3 orang atau 10 %.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah *propinsi (Dinas Pendidikan)* kadang-kadang melakukan sosialisasi melalui kegiatan pelatihan tentang penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional, hal ini ditunjukkan dengan prosentase responden yang menjawab kategori kadang-kadang 40 % dan yang menjawab kategori *jarang* 33,33 %. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada transmisi 4 dengan skor 76 dengan kategori tidak baik.

Salah satu faktor keberhasilan suatu kebijakan adalah adanya sosialisasi berbentuk pelatihan, karena hal ini akan menambah pemahaman pelaksana dalam melaksanakan atau menjalankan kebijakan. Pelatihan merupakan suatu program yang diharapkan dapat memberikan stimulus kepada staf untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu

Pada sub dimensi transmisi atau cara penyampaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat propinsi atau Dinas Pendidikan Propinsi, secara keseluruhan rata-rata skor 83,75, artinya bahwa transmisi dipandang oleh para guru masih kadang ataupun cukup baik.

**Tabel 19. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang**

| Pernyataan                         | Kategori Jawaban |        |                 |         |                        |         |                 |         |                       |         | Jml skor | Ket.       |
|------------------------------------|------------------|--------|-----------------|---------|------------------------|---------|-----------------|---------|-----------------------|---------|----------|------------|
|                                    | Selalu (skor 5)  |        | Sering (skor 4) |         | Kadang-kadang (skor 3) |         | Jarang (skor 2) |         | Tidak Pernah (skor 1) |         |          |            |
| Sosialisasi melalui berbagai media | 1                | 3,33 % | 3               | 10 %    | 10                     | 33,33 % | 13              | 43,33 % | 3                     | 10 %    | 76       | Tidak baik |
| Sosialisasi melalui seminar        | 1                | 3,33 % | 3               | 10 %    | 7                      | 23,33 % | 17              | 56,67 % | 2                     | 6,67 %  | 74       | Tidak baik |
| Sosialisasi melalui workshop       | 2                | 6,67 % | 4               | 13,33 % | 5                      | 16,67 % | 15              | 50 %    | 4                     | 13,33 % | 73       | Tidak baik |
| Sosialisasi melalui pelatihan      | 2                | 6,67 % | 4               | 13,33 % | 8                      | 26,67 % | 14              | 46,67 % | 2                     | 6,67 %  | 80       | Cukup baik |
| <b>Rata-rata</b>                   |                  |        |                 |         |                        |         |                 |         |                       |         | 76       | Cukup baik |

Sumber: Peneliti (2012)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, pada transmisi 1, yaitu *sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang (Suku Dinas Pendidikan) melalui berbagai media*, responden yang menjawab kategori *tidak pernah* sebanyak 3 orang atau 10 %, yang menjawab kategori *jarang* sebanyak 13 orang atau 43,33 %, yang menjawab kategori *kadang-kadang* 10 orang atau 33,33 %, yang menjawab kategori *sering* 3 orang atau 10 %, dan sedangkan menjawab kategori *selalu* 1 orang atau 3,33 %.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah *propinsi (Dinas Pendidikan)* jarang melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional, hal ini ditunjukkan dengan persentase responden yang menjawab kategori kadang-kadang 33,33 % dan yang menjawab kategori *jarang* 43,33 %. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada transmisi 1 dengan skor 76 dengan kategori tidak baik.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, pada transmisi 2, yaitu *sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang (Suku Dinas Pendidikan) melalui kegiatan seminar*, responden yang menjawab kategori *tidak pernah* sebanyak 2 orang atau 6,67 %, yang menjawab kategori *jarang* sebanyak 17 orang atau 56,67 %, yang menjawab kategori *kadang-kadang* 7 orang atau 23,33 %, yang menjawab kategori *sering* 3 orang atau 10 %, dan sedangkan menjawab kategori *selalu* 3 orang atau 10 %.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Kota (*Suku Dinas Pendidikan*) sering melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional, hal ini ditunjukkan dengan persentase responden yang menjawab kategori kadang-kadang 23,33 % dan yang menjawab kategori *jarang* 56,67 %. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada transmisi 1 dengan skor 74 dengan kategori tidak baik. Berdasarkan hasil wawancara:

*“..Untuk dinas pendidikan kota/kabupaten dan dinas propinsi sangat jarang mengadakan sosialisasi, biasanya hanya dari pusat keguru dan kepala sekolah dan dari kepala sekolah dan guru mengsosialisasikan ke sekolah dasar atau masyarakat..”*

Pada transmisi 3, yaitu *sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang (Suku Dinas Pendidikan) melalui kegiatan workshop*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, responden yang menjawab kategori *tidak pernah* sebanyak 4 orang atau 13,33 %, yang menjawab kategori *jarang* sebanyak 15 orang atau 50 %, yang menjawab kategori

*kadang-kadang* 5 orang atau 16,67 %, yang menjawab kategori *sering* 4 orang atau 13,33 %, dan sedangkan menjawab kategori *selalu* 2 orang atau 6,673 %.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah *propinsi* (*Dinas Pendidikan*) jarang melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional melalui seminar, hal ini ditunjukkan dengan prosentase responden yang menjawab kategori *jarang* 50 %. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada transmisi 3 dengan skor 74 dengan kategori tidak baik.

*“..Untuk dinas pendidikan kota/kabupaten dan dinas propinsi sangat jarang mengadakan sosialisasi, biasanya hanya dari pusat keguru dan kepala sekolah dan dari kepala sekolah dan guru mengsosialisasikan ke sekolah dasar atau masyarakat..”*

Pada transmisi 4, yaitu *sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang (Suku Dinas Pendidikan) melalui kegiatan pelatihan*, responden yang menjawab kategori *tidak pernah* sebanyak 2 orang atau 6,67 %, yang menjawab kategori *jarang* sebanyak 14 orang atau 46,67 %, yang menjawab kategori *kadang-kadang* 8 orang atau 26,67 %, yang menjawab kategori *sering* 4 orang atau 13,33 %, dan sedangkan menjawab kategori *selalu* 2 orang atau 6,67 %.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Kota (*Suku Dinas Pendidikan*) sering melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional melalui pelatihan, hal ini ditunjukkan dengan persentase responden yang menjawab kategori *kadang-kadang* 26,67 % dan yang menjawab kategori *jarang* 46,67 %. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada transmisi 1 dengan skor 74 dengan kategori tidak baik.

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama melaksanakan workshop untuk memberikan pemahaman tentang rintisan sekolah bertaraf internasional kepada sekolah calon rintisan sekolah bertaraf internasional.



Selama workshop sekolah diberikan materi tentang berbagai aspek, seperti: kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, konsep RSBI, manajemen RSBI, dan aspek lain yang termasuk dalam IKKM dan IKKT.

Bagi sekolah yang telah ditetapkan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional diharapkan mampu melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder atau pemangku kepentingan (orangtua, siswa, komite sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan lembaga atau masyarakat). Beberapa hal pokok yang disosialisasikan, antara lain: Landasan yuridis, program sekolah sebagai RSBI, target sekolah, peran serta stakeholder dalam penyelenggaraan RSBI, dan hal lainnya yang dianggap penting. Sosialisasi dapat dilakukan dalam berbagai strategi dan media, misalnya: melalui rapat, pertemuan, brosur, media cetak, elektronik dan sebagainya.

Jajaran birokrasi yang terkait dalam penyelenggaraan RSBI sesuai dengan kebijakan. Jajaran birokrasi tersebut meliputi: Manajemen Sekolah, Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

Pada sub dimensi transmisi atau cara penyampaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota atau Suku Dinas Pendidikan Kota Serang, secara keseluruhan rata-rata skor 80, artinya bahwa transmisi dipandang oleh para guru masih kadang ataupun jarang.

### **5.2.2 Tanggapan Guru Terhadap Sub Dimensi Kejelasan Pesan**

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap komunikasi sub dimensi kejelasan pesan yang disampaikan dengan kategori jawaban sangat mudah dipahami (SP), mudah dipahami (P), cukup dipahami (CP), tidak dipahami (TP), dan sangat tidak dipahami (STP), diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 20. Kejelasan bahasa yang Disampaikan  
Pemerintah Pusat**

| Pernyataan                           | Kategori Jawaban      |        |                |         |                      |         |                      |         |                             |        | Jml skor | Ket.       |
|--------------------------------------|-----------------------|--------|----------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|-----------------------------|--------|----------|------------|
|                                      | Sangat Paham (skor 5) |        | Paham (skor 4) |         | Cukup Paham (skor 3) |         | Tidak Paham (skor 2) |         | Sangat Tidak Paham (skor 1) |        |          |            |
| Kejelasan bahasa melalui seminar     | 3                     | 10 %   | 9              | 30 %    | 15                   | 50 %    | 2                    | 6,67 %  | 1                           | 3,33 % | 101      | Cukup baik |
| Kejelasan bahasa melalui workshop    | 2                     | 6,67 % | 6              | 20 %    | 18                   | 60 %    | 3                    | 10 %    | 1                           | 3,33 % | 93       | Cukup baik |
| Kejelasan bahasa melalui pelatihan   | 1                     | 3,33 % | 8              | 26,67 % | 12                   | 40 %    | 7                    | 23,33 % | 2                           | 6,67 % | 89       | Cukup baik |
| Tingkat pemahaman guru terhadap RSBI | 3                     | 3,33 % | 15             | 23,33 % | 8                    | 26,67 % | 3                    | 10 %    | 1                           | 10 %   | 106      | Baik       |
| <b>Rata-rata</b>                     |                       |        |                |         |                      |         |                      |         |                             |        | 97       | Cukup baik |

Sumber: Peneliti (2012)

Pada kejelasan 1, yaitu *kejelasan bahasa yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi RSBI yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui seminar*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak jelas* sebanyak 1 orang atau 3,33 %, guru yang menjawab kategori *tidak jelas* sebanyak 2 orang atau 10 %, yang menjawab kategori *cukup jelas* 15 orang atau 50 %, yang menjawab kategori *jelas* 9 orang atau 30 %, dan sedangkan menjawab kategori *sangat jelas* 3 orang atau 10 %.

“...selama kegiatan sosialisasi bahasa yang digunakan oleh narasumber cukup jelas dan mudah dimengerti..”

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum *kejelasan bahasa yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi RSBI yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat* ditanggapi cukup jelas oleh guru hal ini ditunjukkan dengan prosentase responden yang menjawab kategori cukup jelas 50 %.

Dilihat dari skor yang diperoleh pada kejelasan 1 dengan skor 101 dengan kategori cukup jelas atau cukup baik.

Pada kejelasan 2, yaitu *kejelasan bahasa yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi RSBI yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui workshop*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak jelas* sebanyak 1 orang atau 3,33 %, guru yang menjawab kategori *tidak jelas* sebanyak 3 orang atau 10 %, yang menjawab kategori *cukup jelas* 18 orang atau 60 %, yang menjawab kategori *jelas* 6 orang atau 20 %, dan sedangkan menjawab kategori *sangat jelas* 2 orang atau 6,67 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum tingkat kejelasan bahasa terhadap yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi RSBI yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui workshop cukup jelas atau paham. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada kejelasan 1 dengan skor 93 dengan kategori cukup jelas atau cukup baik.

Pada kejelasan 3, yaitu *kejelasan bahasa yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi RSBI yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui pelatihan*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak jelas* sebanyak 2 orang atau 6,67 %, guru yang menjawab kategori *tidak jelas* sebanyak 7 orang atau 23,33 %, yang menjawab kategori *cukup jelas* 12 orang atau 40 %, yang menjawab kategori *jelas* 8 orang atau 26,67 %, dan sedangkan menjawab kategori *sangat jelas* 1 orang atau 3,33 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum tingkat kejelasan bahasa terhadap yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi RSBI yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui pelatihan cukup jelas atau paham. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada kejelasan 1 dengan skor 89 dengan kategori cukup jelas atau cukup baik.

Penerimaan komunikasi juga terhambat dapat disebabkan oleh kehendak bebas dari pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan akan mempersepsi secara selektif terhadap pesan-pesan yang dia terima. Hal lain yang paling penting dalam implementasi kebijakan adalah *clarity* atau

kejelasan pesan, dimana pesan yang disampaikan tidak berlebihan dan ambigu. Ketidakjelasan pesan dapat membuat tidak tercapainya perubahan yang diinginkan, ketidakjelasan pesan juga dapat mengakibatkan terjadinya perubahan yang tidak direncanakan dan tidak terantisipasi. Kekonsistensian suatu pesan diperlukan seperti juga kejelasan pesan jika implementasi yang diinginkan menjadi efektif. Jika suatu pesan yang disampaikan sangat jelas tapi instruksi yang diberikan sangat berbeda akan menyulitkan petugas operasional dalam melaksanakan kebijakan.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya.

Kejelasan 4, yaitu, *tingkat pemahaman guru terhadap tujuan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak jelas* sebanyak 1 orang atau 3,33 %, guru yang menjawab kategori *tidak jelas* sebanyak 3 orang atau 10 %, yang menjawab kategori *cukup jelas* 18 orang atau 60 %, yang menjawab kategori *jelas* 6 orang atau 20 %, dan sedangkan menjawab kategori *sangat jelas* 2 orang atau 6,67 %.

*“...Untuk pemahaman guru mengenai kegiatan atau penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional cukup jelas..”*

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum *tingkat pemahaman guru terhadap tujuan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional cukup jelas atau paham*. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada kejelasan 1 dengan skor 93 dengan kategori cukup jelas. Pada sub dimensi

kejelasan pesan yang disampaikan secara keseluruhan rata-rata skor 97, artinya bahwa kejelasan dipandang oleh para guru jelas atau paham.

Berkaitan dengan kebijakan Edwards III menyatakan bahwa *communication* adalah penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dan pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Pesan tersebut harus jelas, akurat, dan konsisten sehingga pelaksana kebijakan tahu apa yang harus dilakukan. Menurut Edwards III dalam analisis implementasi kebijakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi yaitu: *transmission* atau cara penyampaian pesan, *clarity* atau kejelasan pesan.

Ketidajelasan pesan dapat membuat tidak tercapainya perubahan yang diinginkan, ketidakjelasan pesan juga dapat mengakibatkan terjadinya perubahan yang tidak direncanakan dan tidak terantisipasi. Kekonsistensian suatu pesan diperlukan seperti juga kejelasan pesan jika implementasi yang diinginkan menjadi efektif. Jika suatu pesan yang disampaikan sangat jelas tapi instruksi yang diberikan sangat berbeda akan menyulitkan petugas operasional dalam melaksanakan kebijakan.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

**Tabel 21. Kejelasan bahasa yang Disampaikan Pemerintah Propinsi**

| Pernyataan                         | Kategori Jawaban      |        |                |        |                      |         |                      |         |                             |        | Jml skor  | Ket.              |
|------------------------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------------|---------|----------------------|---------|-----------------------------|--------|-----------|-------------------|
|                                    | Sangat Paham (skor 5) |        | Paham (skor 4) |        | Cukup Paham (skor 3) |         | Tidak Paham (skor 2) |         | Sangat Tidak Paham (skor 1) |        |           |                   |
| Kejelasan bahasa melalui seminar   | 2                     | 6,67 % | 3              | 10 %   | 12                   | 40 %    | 10                   | 33,33 % | 3                           | 10 %   | 81        | Cukup baik        |
| Kejelasan bahasa melalui workshop  | 1                     | 3,33 % | 3              | 10 %   | 12                   | 60 %    | 11                   | 36,67 % | 3                           | 10 %   | 77        | Tidak baik        |
| Kejelasan bahasa melalui pelatihan | 1                     | 3,33 % | 2              | 6,67 % | 14                   | 46,67 % | 11                   | 36,67 % | 2                           | 6,67 % | 79        | Cukup baik        |
| <b>Rata-rata</b>                   |                       |        |                |        |                      |         |                      |         |                             |        | <b>79</b> | <b>Cukup baik</b> |

Sumber: Peneliti (2012)

Pada kejelasan 1, yaitu *kejelasan bahasa yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi RSBI yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi melalui seminar*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak jelas* sebanyak 3 orang atau 10 %, guru yang menjawab kategori *tidak jelas* sebanyak 10 orang atau 33,33 %, yang menjawab kategori *cukup jelas* 12 orang atau 40 %, yang menjawab kategori *jelas* 3 orang atau 10 %, dan sedangkan menjawab kategori *sangat jelas* 2 orang atau 6,67 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum *kejelasan bahasa yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi RSBI yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi*, ditanggapi cukup jelas dan tidak jelas oleh guru hal ini ditunjukkan dengan prosentase responden yang menjawab kategori cukup jelas 40 %.Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada kejelasan 1 dengan skor 81 dengan kategori cukup jelas atau cukup baik.

Pada kejelasan 2, yaitu *kejelasan bahasa yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi RSBI yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi melalui workshop*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak jelas* sebanyak 3 orang atau

10 %, guru yang menjawab kategori *tidak jelas* sebanyak 11 orang atau 36,67 %, yang menjawab kategori *cukup jelas* 12 orang atau 40 %, yang menjawab kategori *jelas* 3 orang atau 10 %, dan sedangkan menjawab kategori *sangat jelas* 1 orang atau 3,33 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum tingkat kejelasan bahasa terhadap yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi RSBI yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi melalui workshop cukup jelas atau paham. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada kejelasan 1 dengan skor 77 dengan kategori tidak jelas.

Pada kejelasan 3, yaitu *kejelasan bahasa yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi RSBI yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi melalui pelatihan*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak jelas* sebanyak 2 orang atau 6,67 %, guru yang menjawab kategori *tidak jelas* sebanyak 11 orang atau 36,67 %, yang menjawab kategori *cukup jelas* 14 orang atau 46,67 %, yang menjawab kategori *jelas* 2 orang atau 6,67 %, dan sedangkan menjawab kategori *sangat jelas* 1 orang atau 3,33 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum tingkat kejelasan bahasa terhadap yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi RSBI yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi melalui pelatihan cukup jelas atau paham. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada kejelasan 1 dengan skor 79 dengan kategori cukup jelas.

**Tabel 22. Kejelasan bahasa yang Disampaikan Pemerintah Kota Serang**

| Pernyataan                         | Kategori Jawaban      |        |                |        |                      |         |                      |      |                             |        | Jml skor | Ket.       |
|------------------------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------------|---------|----------------------|------|-----------------------------|--------|----------|------------|
|                                    | Sangat Paham (skor 5) |        | Paham (skor 4) |        | Cukup Paham (skor 3) |         | Tidak Paham (skor 2) |      | Sangat Tidak Paham (skor 1) |        |          |            |
| Kejelasan bahasa melalui seminar   | 0                     | 0      | 2              | 6,67 % | 6                    | 20 %    | 18                   | 60 % | 3                           | 10 %   | 65       | Tidak Baik |
| Kejelasan bahasa melalui workshop  | 1                     | 6,67 % | 3              | 10 %   | 7                    | 23,33 % | 18                   | 60 % | 1                           | 3,33 % | 75       | Tidak Baik |
| Kejelasan bahasa melalui pelatihan | 1                     | 3,33 % | 2              | 6,67 % | 7                    | 23,33 % | 18                   | 60 % | 2                           | 6,67 % | 72       | Tidak Baik |
| <b>Rata-rata</b>                   |                       |        |                |        |                      |         |                      |      |                             |        | 71       | Tidak Baik |

Pada kejelasan 1, yaitu *kejelasan bahasa yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi RSBI yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui seminar*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak jelas* sebanyak 3 orang atau 10 %, guru yang menjawab kategori *tidak jelas* sebanyak 18 orang atau 60 %, yang menjawab kategori *cukup jelas* 6 orang atau 20 %, yang menjawab kategori *jelas* 2 orang atau 6,67 %, dan sedangkan menjawab kategori *sangat jelas* 0 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum *kejelasan bahasa yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi RSBI yang dilakukan oleh Pemerintah kota*, ditanggapi cukup jelas dan tidak jelas oleh guru hal ini ditunjukkan dengan prosentase responden yang menjawab kategori cukup jelas 40 %.Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada kejelasan 1 dengan skor 65 dengan kategori tidak baik atau tidak jelas.

Pada kejelasan 2, yaitu *kejelasan bahasa yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi RSBI yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi melalui workshop*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak jelas* sebanyak 1 orang atau 3,33 %, guru yang menjawab kategori *tidak jelas* sebanyak 18 orang atau 60



%, yang menjawab kategori *cukup jelas* 7 orang atau 23,33 %, yang menjawab kategori *jelas* 3 orang atau 10 %, dan sedangkan menjawab kategori *sangat jelas* 6,67 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum tingkat kejelasan bahasa terhadap yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi RSBI yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui workshop cukup jelas atau paham. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada kejelasan 1 dengan skor 75 dengan kategori tidak jelas atau tidak baik.

Pada kejelasan 3, yaitu *kejelasan bahasa yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi RSBI yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui pelatihan*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak jelas* sebanyak 1 orang atau 3,33 %, guru yang menjawab kategori *tidak jelas* sebanyak 18 orang atau 60 %, yang menjawab kategori *cukup jelas* 7 orang atau 23,33 %, yang menjawab kategori *jelas* 3 orang atau 10 %, dan sedangkan menjawab kategori *sangat jelas* 6,67 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum tingkat kejelasan bahasa terhadap yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi RSBI yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui pelatihan cukup jelas atau paham. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada kejelasan 1 dengan skor 72 dengan kategori tidak jelas atau tidak baik.

Berkaitan dengan kebijakan Edward III menyatakan bahwa *communication* adalah penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dan pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Pesan tersebut harus jelas, akurat, dan konsisten sehingga pelaksana kebijakan tahu apa yang harus dilakukan. Menurut Edward ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi yaitu: *transmission* atau cara penyampaian pesan, *clarity* atau kejelasan pesan, serta *consistency* atau kekonsistenan dalam penyampaian pesan.

Pengiriman pesan *transmission* tidak selalu berlangsung mulus seperti proses komunikasi yang digambarkan, terkadang mengalami hambatan

seperti ketidaksetujuan pelaksana kebijakan dengan pembuat kebijakan sehingga mempengaruhi kebijakan pelaksanaan dalam membuat keputusan umum. Hambatan juga dapat terjadi karena pesan yang harus disampaikan harus melalui birokrasi yang berlapis yang sangat mungkin mengakibatkan salah informasi.

Penerimaan komunikasi juga terhambat dapat disebabkan oleh kehendak bebas dari pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan akan mempersepsi secara selektif terhadap pesan-pesan yang dia terima. Hal lain yang paling penting dalam implementasi kebijakan adalah *clarity* atau kejelasan pesan, dimana pesan yang disampaikan tidak berlebihan dan ambigu. Ketidakjelasan pesan dapat membuat tidak tercapainya perubahan yang diinginkan, ketidakjelasan pesan juga dapat mengakibatkan terjadinya perubahan yang tidak direncanakan dan tidak terantisipasi. Kekonsistensian suatu pesan diperlukan seperti juga kejelasan pesan jika implementasi yang diinginkan menjadi efektif. Jika suatu pesan yang disampaikan sangat jelas tapi instruksi yang diberikan sangat berbeda akan menyulitkan petugas operasional dalam melaksanakan kebijakan.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya.

Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan

telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

### 5.3 Deskripsi dan Analisis Data Dimensi Sumberdaya

#### 5.3.1 Tanggapan Guru Terhadap Sub Dimensi SDM

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap Sumberdaya sub dimensi sumberdaya manusia dengan kategori jawaban sangat baik (SB), baik (B), cukup baik (CB), tidak baik (TB), dan sangat tidak baik (STB). Diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 23. Sub Dimensi Kuantitas SDM**

| Pernyataan   | Kategori Jawaban |         |      |      |            |         |            |         |                   |        | Jml skor   | Ket.        |
|--|------------------|---------|------|------|------------|---------|------------|---------|-------------------|--------|------------|-------------|
|  | Sangat Baik      |         | Baik |      | Cukup Baik |         | Tidak Baik |         | Sangat Tidak Baik |        |            |             |
| Kesesuaian jumlah rasio guru dengan rombongan belajar                  | 8                | 26,67 % | 12   | 40 % | 9          | 30 %    | 1          | 3,33%   | 0                 | 0      | 127        | Sangat baik |
| Kesesuaian bidang keahlian pendidik dengan mata pelajaran yang diampuh | 6                | 20 %    | 15   | 50 % | 8          | 26,67 % | 1          | 3,33%   | 0                 | 0      | 116        | Baik        |
| Kemampuan Pendidik/guru dalam menerapkan TIK                           | 6                | 20 %    | 12   | 40 % | 8          | 26,67 % | 4          | 13,33 % | 0                 | 0      | 110        | Baik        |
| Tingkat Kedisiplinan pendidik/guru                                     | 9                | 30 %    | 18   | 60 % | 3          | 10 %    | 0          | 0       | 0                 | 0      | 126        | Sangat baik |
| Ketepatan waktu dalam melaksanakan pembelajaran                        | 9                | 30 %    | 18   | 60 % | 3          | 10 %    | 0          | 0       | 0                 | 0      | 126        | Sangat baik |
| Tingkat kualifikasi pendidikan guru                                    | 6                | 20 %    | 18   | 60 % | 4          | 13,33 % | 2          | 6,67 %  | 0                 | 0      | 118        | Baik        |
| Kesesuaian jumlah laboran dengan rombongan belajar                     | 0                | 0       | 3    | 10 % | 9          | 30 %    | 16         | 53,33   | 2                 | 6,67 % | 89         | Cukup baik  |
| <b>Rata-rata</b>   |                  |         |      |      |            |         |            |         |                   |        | <b>116</b> | <b>Baik</b> |

Sumber: peneliti (2012)

Pada SDM 1, yaitu *Kesesuaian jumlah rasio guru dengan rombongan belajar*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak baik* sebanyak 0 orang atau 0 %, guru yang menjawab kategori *tidak baik* sebanyak 1 orang atau 3,33 %, yang menjawab kategori *cukup baik* 9 orang atau 30 %, yang menjawab kategori *baik* 12 orang atau 40 %, dan sedangkan menjawab kategori *sangat baik* 8 orang atau 26,67 %. Berdasarkan hasil wawancara:

*“..Jumlah guru dibanding dengan rombongan belajar baik dengan arti bahwa jumlah guru yang ada di SMP ini memenuhi syarat dalam kegiatan pembelajaran RSBL..”*

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum *Kesesuaian jumlah rasio guru dengan rombongan belajar* pada kategori *sangat baik*. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan. Jumlah staff pelaksana yang besar terkadang diperlukan agar kebijakan yang disampaikan dapat dipantau dengan baik. Pelaksanaan proses pembelajaran dalam program rintisan sekolah bertaraf internasional harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.

Pada SDM 2, yaitu *Kesesuaian bidang keahlian pendidik dengan mata pelajaran yang diampuh*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak baik* sebanyak 0 orang atau 0 %, guru yang menjawab kategori *tidak baik* sebanyak 1 orang atau 3,33 %, yang menjawab kategori *cukup baik* 8 orang atau 26,67 %, yang menjawab kategori *baik* 15 orang atau 50 %, dan sedangkan menjawab kategori *sangat baik* 6 orang atau 20 %. Berdasarkan hasil wawancara:

*“.. kesesuaian bidang keahlian guru termasuk sesuai karena di sekolah kami ini, guru mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Guru lulusan matematika mengajar matematika”*

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum Kesesuaian bidang keahlian pendidik dengan mata pelajaran yang diampu pada kategori baik. Tidak hanya jumlah staf yang banyak saja yang diperlukan tetapi juga kemampuan para staf pelaksana tersebut dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Selain itu, Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pada SDM 3, yaitu Kemampuan Pendidik/guru dalam menerapkan TIK, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak baik* sebanyak 0 orang atau 0 %, guru yang menjawab kategori *tidak baik* sebanyak 4 orang atau 3,33 %, yang menjawab kategori *cukup baik* 8 orang atau 26,67 %, yang menjawab kategori *baik* 12 orang atau 50 %, dan sedangkan menjawab kategori *sangat baik* 6 orang atau 20 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum Kemampuan Pendidik/guru dalam menerapkan TIK pada kategori baik. keberhasilan dalam proses pembelajaran pada program penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan (IKKT), yaitu: proses pembelajaran pada semua mata pelajaran menjadi teladan bagi sekolah lainnya dalam pengembangan akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa patriot dan jiwa inovator; diperkaya dengan model proses pembelajaran seklah unggul dari salah satu negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan; menerapkan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada semua mata pelajaran; dan pembelajaran menggunakan dapat bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.

Pada SDM 4, yaitu Tingkat Kedisiplinan pendidik/guru, responden yang menjawab kategori *sangat tidak baik* sebanyak 0 orang atau 0 %, guru yang menjawab kategori *tidak baik* sebanyak 4 orang atau 3,33 %, yang menjawab kategori *cukup baik* 3 orang atau 10 %, yang menjawab kategori *baik* 18 orang atau 60 %, dan sedangkan menjawab kategori *sangat baik* 9 orang atau 30 %. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum Tingkat Kedisiplinan pendidik/guru pada kategori baik. Berdasarkan hasil wawancara:

*“..Guru-guru di sekolah kami ini Alhamdulillah memiliki tingkat disiplin dan integritas yang tinggi..”*

Pada SDM 5, yaitu Ketepatan waktu dalam melaksanakan pembelajaran, responden yang menjawab kategori *sangat tidak baik* sebanyak 0 orang atau 0 %, guru yang menjawab kategori *tidak baik* sebanyak 4 orang atau 3,33 %, yang menjawab kategori *cukup baik* 3 orang atau 10 %, yang menjawab kategori *baik* 18 orang atau 60 %, dan sedangkan menjawab kategori *sangat baik* 9 orang atau 30 %. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum Ketepatan waktu dalam melaksanakan pembelajaran pada kategori sangat baik.

*“..Guru-guru di sekolah kami ini Alhamdulillah memiliki tingkat disiplin dan integritas yang tinggi termasuk ketepatan waktu atau kehadiran..”*

Pada SDM 6, yaitu Tingkat kualifikasi pendidikan guru, responden yang menjawab kategori *sangat tidak baik* sebanyak 0 orang atau 0 %, guru yang menjawab kategori *tidak baik* sebanyak 2 orang atau 6,67 %, yang menjawab kategori *cukup baik* 4 orang atau 60 %, yang menjawab kategori *baik* 18 orang atau 60 %, dan sedangkan menjawab kategori *sangat baik* 6 orang atau 20 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum Tingkat kualifikasi pendidikan guru pada kategori baik. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan

kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada SDM 7, yaitu *Kesesuaian jumlah rasio laboran dengan rombongan belajar*, responden yang menjawab kategori *sangat tidak baik* sebanyak 2 orang atau 6,67 %, guru yang menjawab kategori *tidak baik* sebanyak 16 orang atau 53,33 %, yang menjawab kategori *cukup baik* 9 orang atau 30 %, yang menjawab kategori *baik* 3 orang atau 10 %, dan sedangkan menjawab kategori *sangat baik* 0 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum *Kesesuaian jumlah rasio laboran dengan rombongan belajar* pada kategori cukup baik.

### 5.3.2 Tanggapan Guru Terhadap Sub Dimensi Fasilitas

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap Sumberdaya sub dimensi Fasilitas dengan kategori jawaban sangat memadai (SM), Memadai (M), cukup Memadai (CM), tidak memadai (TM), dan sangat tidak Memadai (STM), diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 24. Sub Dimensi Fasilitas**

| Pernyataan   | Kategori Jawaban |         |         |         |               |      |               |        |                      |        | Jmlh skor | Ket.              |
|--|------------------|---------|---------|---------|---------------|------|---------------|--------|----------------------|--------|-----------|-------------------|
|  | Sangat Memadai   |         | Memadai |         | Cukup Memadai |      | Tidak Memadai |        | Sangat Tidak Memadai |        |           |                   |
| Ketersediaan ruang kelas dengan jumlah rombongan belajar | 8                | 26,67 % | 12      | 40%     | 9             | 30 % | 1             | 3,33%  | 0                    | 0      | 117       | Baik              |
| Bahan Praktikum yang dimiliki RSBI                       | 0                | 0 %     | 3       | 10 %    | 9             | 30%  | 15            | 50 %   | 3                    | 10 %   | 72        | Tidak baik        |
| Kelengkapan sarana TIK                                   | 1                | 3,33 %  | 6       | 20 %    | 18            | 60 % | 4             | 13,3 % | 1                    | 3,33 % | 92        | Cukup baik        |
| Kelengkapan Laboratorium                                 | 1                | 3,33 %  | 5       | 16,67 % | 18            | 60 % | 4             | 13,3 % | 2                    | 6,67 % | 89        | Cukup baik        |
| Menggunakan TIK dalam kegiatan pembelajaran              | 3                | 10 %    | 9       | 30 %    | 15            | 50 % | 3             | 10 %   | 0                    | 0 %    | 102       | Baik              |
| Jumlah Buku di perpustakaan                              | 1                | 3,33 %  | 5       | 16,67 % | 9             | 30 % | 12            | 40 %   | 3                    | 10 %   | 79        | Cukup baik        |
| <b>Rata-rata skor</b>                                    |                  |         |         |         |               |      |               |        |                      |        | <b>92</b> | <b>Cukup baik</b> |

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fasilitas 1, yaitu *ketersediaan ruang kelas sama dengan jumlah rombongan belajar*, responden yang menjawab kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 0 orang atau 0 %, guru yang menjawab kategori *tidak memadai* sebanyak 1 orang atau 3,33 %, yang menjawab kategori *cukup memadai* 4 orang atau 6,67 %, yang menjawab kategori *memadai* sebanyak 12 orang atau 40 % dan *sangat memadai* sebanyak 8 orang atau 26,67%.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum ketersediaan ruang kelas sama dengan jumlah rombongan belajar menurut guru masuk dalam kategori memadai. Berdasarkan hasil wawancara:

*“..Jumlah kelas di sekolah ini memadai, artinya bahwa tidak terjadi kekurangan ruangan untuk belajar..”*

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fasilitas 2, yaitu *Bahan Praktikum yang dimiliki RSBI*, responden yang masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 3 orang atau 10 %, guru yang masuk kategori *tidak memadai* sebanyak 15 orang atau 50 %, yang masuk kategori *cukup memadai* 9 orang atau 30 %, sedangkan yang menjawab kategori *memadai* sebanyak 3 orang atau 10 % dan *sangat memadai* tidak ada. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum *Bahan Praktikum yang dimiliki RSBI* masuk dalam kategori sangat cukup memadai.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fasilitas 3, yaitu *Kelengkapan sarana TIK*, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 1 orang atau 3,33 %, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 4 orang atau 13,33 %, yang menyatakan kategori *cukup memadai* 18 orang atau 60 %, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 6 orang atau 20 % dan yang menyatakan *sangat memadai* 1 orang atau 3,33 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa *Kelengkapan sarana TIK*. Pencapaian indikator kinerja kunci tambahan (IKKT) aspek standar sarana dan prasarana meliputi: setiap kelas dilengkapi



dengan sarana pembelajaran berbasis TIK; perpustakaan dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TK di seluruh dunia; dan dilengkapi dengan ruang multi media

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fasilitas 4, yaitu *Kelengkapan Laboratorium*, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 2 orang atau 6,67 %, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 4 orang atau 13,33 %, yang menyatakan kategori *cukup memadai* 18 orang atau 60 %, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 5 orang atau 16,67 % dan yang menyatakan *sangat memadai* 1 orang atau 3,33 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa *kelengkapan laboratorium*. Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia. Standar jumlah peralatan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan perpeserta didik.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fasilitas 5, yaitu *menggunakan TIK dalam kegiatan pembelajaran*, responden atau guru yang masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 0 orang atau 0 %, guru yang masuk kategori *tidak memadai* sebanyak 3 orang atau 10 %, yang masuk dalam kategori *cukup memadai* 15 orang atau 50 %, yang masuk kategori *memadai* 9 orang atau 30 % dan yang masuk *sangat memadai* 3 orang atau 10 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menggunakan TIK dalam kegiatan pembelajaran masuk dalam kategori cukup memadai. Pencapaian indikator kinerja kunci tambahan (IKKT) aspek standar sarana dan prasarana meliputi: setiap kelas dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK; perpustakaan dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TK di seluruh dunia; dan dilengkapi dengan ruang multi media

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fasilitas 6, Jumlah Buku di perpustakaan. responden atau guru yang masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 3 orang atau 10 %, guru yang masuk kategori *tidak memadai* sebanyak 12 orang atau 40 %, yang masuk dalam kategori *cukup memadai* 9 orang atau 30 %, yang masuk kategori *memadai* 5 orang atau 16,67 % dan yang masuk *sangat memadai* 1 orang atau 3,33 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum Jumlah Buku di perpustakaan masuk kategori tidak memadai. Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan, Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik, Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP, Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

Pelaksana kebijakan mungkin sudah memiliki jumlah staff yang cukup, mengerti apa yang akan dilakukan, mempunyai kewenangan untuk melatih apa yang harus dilakukan, mempunyai kewenangan untuk melatih tugasnya, akan tetapi tanpa fasilitas fisik seperti gedung yang dibutuhkan, peralatan, persediaan maka implementasi kebijakan yang paling mudah pun tidak akan dapat terlaksana.

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

### 5.3.3 Tanggapan Guru Terhadap Sub Dimensi Keuangan

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap Sumberdaya sub dimensi keuangan dengan kategori jawaban sangat memadai (SM), Memadai (M), cukup Memadai (CM), tidak memadai (TM), dan sangat tidak Memadai (STM), diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 25. Sub Dimensi Keuangan**

| Pernyataan                            | Kategori Jawaban |         |         |     |               |       |               |        |                      |       | Jml skor  | Ket.              |
|---------------------------------------|------------------|---------|---------|-----|---------------|-------|---------------|--------|----------------------|-------|-----------|-------------------|
|                                       | Sangat Memadai   |         | Memadai |     | Cukup Memadai |       | Tidak Memadai |        | Sangat Tidak Memadai |       |           |                   |
| Bantuan dana dari pemerintah pusat    | 4                | 13,33 % | 15      | 50% | 9             | 30 %  | 2             | 6,67 % | 0                    | 0     | 109       | Baik              |
| Bantuan dana dari pemerintah propinsi | 0                | 0       | 0       | 0   | 3             | 10 %  | 21            | 70%    | 7                    | 23,3% | 55        | Tidak baik        |
| Bantuan dana dari pemerintah Kota     | 0                | 0       | 0       | 0   | 3             | 10 %  | 21            | 70%    | 7                    | 23,3% | 55        | Tidak baik        |
| Ketersediaan dana                     | 3                | 10%     | 6       | 20% | 13            | 43,3% | 6             | 20 %   | 2                    | 6,67% | 92        | Cukup baik        |
| <b>Rata-rata Skor</b>                 |                  |         |         |     |               |       |               |        |                      |       | <b>77</b> | <b>Tidak baik</b> |

Sumber: Peneliti (2012)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa keuangan 1, yaitu *bantuan dana dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan RSBI*, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 0 orang atau 0 %, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 2 orang atau

6,67 %, yang menyatakan kategori *cukup memadai* sebanyak 9 orang atau 30 %, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 15 orang atau 50 % dan yang menyatakan *sangat memadai* 4 orang atau 13,33 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa bantuan dana dari pemerintah pusat memadai.

*“..Dana dari pemerintah pusat memadai karena sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada awalnya sekolah menerima dari pemerintah sebesar 400 juta.”*

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa keuangan 2, yaitu *bantuan dana dari pemerintah provinsi untuk penyelenggaraan RSBI*. responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 7 orang atau 23,33 %, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 21 orang atau 70 %, yang menyatakan kategori *cukup memadai* sebanyak 3 orang atau 10 %, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 0 orang atau 0 % dan yang menyatakan *sangat memadai* 0 orang atau 0 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa bantuan dana dari pemerintah provinsi tidak memadai.

*“..Dana dari provinsi seharusnya 30 %, tapi tidak jalan hanya kemampuan mereka, dari provinsi seharusnya 240 juta tapi provinsi hanya memberi 100 juta. Artinya bahwa dana dari provinsi tidak seseuai dengan ketentuan tau tidak memadai”.*

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa keuangan 3, yaitu *bantuan dana dari pemerintah kota untuk penyelenggaraan RSBI*. responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 7 orang atau 23,33 %, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 21 orang atau 70 %, yang menyatakan kategori *cukup memadai* sebanyak 3 orang atau 10 %, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 0 orang atau 0 % dan yang menyatakan *sangat memadai* 0 orang atau 0 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa bantuan dana dari pemerintah kota tidak memadai.

*“..Dana dari propinsi seharusnya 20 %, tapi tidak jalan bahkan sampai sekarang pemerintah kota tidak member bantuan dana sedikit pun, dari kota/kabupaten tidak seseuai dengan ketentuan tau tidak memadai”.*

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa keuangan 4, yaitu *ketersediaan dana dalam penyelenggaraan RSBI*, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 2 orang atau 6,67 %, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 6 orang atau 20 %, yang menyatakan kategori *cukup memadai* sebanyak 13 orang atau 43,3 %, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 6 orang atau 20 % dan yang menyatakan *sangat memadai* 3 orang atau 3,33 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa ketersediaan dana dalam penyelenggaraan RSBI cukup memadai. Namun berdasarkan hasil wawancara:

*“..ketersediaan dana cenderung tidak memadai, bantuan dana dari propinsi dan kota/kabupaten tidak memadai hanya dari pemerintah pusat yang memadai..”*

Sumber daya anggaran dan peralatan diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas dalam Edwards III (1980:82) “ *Budgetary limitations and citizens opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of the services that implementers can be provide to be public*”. Kondisi tersebut menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan insentif sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program.

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal, Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Sumber daya yang dimaksud oleh Edwards III adalah kualitas dan kuantitas staf pelaksana, ketersediaan informasi bagi staf pelaksana, keluasan kewenangan yang diberikan kepada staf pelaksana, serta ketersediaan fasilitas pendukung bagi staff dalam rangka melaksanakan kebijakan. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan. Jumlah staf pelaksana yang besar terkadang diperlukan agar kebijakan yang disampaikan dapat dipantau dengan baik. Tidak hanya jumlah staf yang banyak saja yang diperlukan tetapi juga kemampuan para staf pelaksana tersebut dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Selain staf, ketersediaan informasi juga merupakan sumber daya yang diperlukan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Pelaksana kebijakan mungkin sudah memiliki jumlah staf yang cukup, mengerti apa yang akan dilakukan, mempunyai kewenangan untuk melatih apa yang harus dilakukan, mempunyai kewenangan untuk melatih tugasnya, akan tetapi tanpa fasilitas fisik seperti gedung yang dibutuhkan, peralatan, persediaan maka implementasi kebijakan yang paling mudah pun tidak akan dapat terlaksana.

## 5.4 Deskripsi dan Analisis Data Dimensi Disposisi

### 5.4.1 Tanggapan Guru Terhadap Sub Dimensi Komitmen

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap disposisi dimensi sub dimensi komitmen dengan kategori jawaban sangat baik (SB), baik (B), cukup baik (CB), tidak baik (TB), dan sangat tidak baik (STB), diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 26. Sub Dimensi Komitmen**

| Pernyataan  | Kategori Jawaban |         |      |         |            |         |            |        |                   |   | Jml skor   | Ket.        |
|---|------------------|---------|------|---------|------------|---------|------------|--------|-------------------|---|------------|-------------|
|   | Sangat Baik      |         | Baik |         | Cukup Baik |         | Tidak Baik |        | Sangat Tidak Baik |   |            |             |
| Merasa terbebani dalam melaksanakan program RSBI                            | 18               | 60 %    | 6    | 20 %    | 5          | 16,67 % | 1          | 3,33 % | 0                 | 0 | 131        | Sangat baik |
| RSBI hanya meningkatkan status sosial sekolah                               | 9                | 30 %    | 15   | 50 %    | 5          | 16,67 % | 1          | 3,33 % | 0                 | 0 | 122        | Baik        |
| Guru berusaha untuk meningkatkan pengetahuan guna melaksanakan program RSBI | 8                | 26,67 % | 20   | 66,67 % | 2          | 6,67 %  | 0          | 0      | 0                 | 0 | 126        | Sangat baik |
| Bekerjasama dalam pelaksanaan tugas untuk keberhasilan program RSBI         | 8                | 26,67 % | 20   | 66,67 % | 2          | 6,67 %  | 0          | 0      | 0                 | 0 | 126        | Sangat baik |
| Kesesuaian antara keahlian dan tugas yang diberikan pada program RSBI       | 6                | 20 %    | 10   | 33,33 % | 12         | 40 %    | 2          | 6,67 % | 0                 | 0 | 108        | Baik        |
| <b>Rata-rata</b>  |                  |         |      |         |            |         |            |        |                   |   | <b>122</b> | <b>Baik</b> |

Sumber: Peneliti (2012)

Pada komitmen 1, yaitu *merasa terbebani dalam melaksanakan program RSBI*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, responden yang masuk kategori *sangat tidak baik* tidak ada, yang masuk kategori *tidak baik* 1 orang atau 3,33 %, yang masuk kategori *cukup baik* 5 orang atau 16,67 %, yang masuk kategori *baik* 6 orang atau 20 %, dan sedangkan masuk kategori *sangat baik* sebanyak 18 orang atau 60 %. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menerima konsep program RSBI.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menerima konsep program RSBI dalam kategori sangat baik. Sedangkan dilihat dari komitmen 1 skor yang diperoleh 131 dengan kategori *sangat baik*. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah menyatakan bahwa:

*“..sebenarnya yang menjadikan beban adalah istilah standar atau taraf..kita harus mengejar taraf tersebut padahal setiap Negara itu ideologinya berbeda seharusnya tarafnya juga berbeda..”*

Pada komitmen 2, yaitu *RSBI hanya meningkatkan status sosial sekolah*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, responden yang masuk kategori *sangat tidak baik* tidak ada, yang masuk kategori *tidak baik* 1 orang atau 3,33 %, yang masuk kategori *cukup baik* 5 orang atau 16,67 %, yang masuk kategori *baik* 15 orang atau 50 %, dan sedangkan masuk kategori *sangat baik* sebanyak 9 orang atau 30 %. Sedangkan dilihat dari komitmen 3 skor yang diperoleh 122 dengan kategori *baik*.

Pada komitmen 3, yaitu *guru berusaha untuk meningkatkan pengetahuan guna melaksanakan program RSBI*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, responden yang masuk kategori *sangat tidak baik dan tidak baik* tidak ada., yang masuk kategori *cukup baik* 2 orang atau 6,67 %, yang masuk kategori *baik* 20 orang atau 66,67 %, dan sedangkan masuk kategori *sangat baik* sebanyak 8 orang atau 26,67 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dibidangnya dalam rangka menyukseskan program RSBI. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh 126 dengan kategori *baik*.

Pada komitmen 4, yaitu *Bekerjasama dalam pelaksanaan tugas untuk keberhasilan program RSBI*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, responden yang masuk kategori *sangat tidak baik dan tidak baik* tidak ada., yang masuk kategori *cukup baik* 2 orang atau 6,67 %, yang masuk kategori *baik* 20 orang atau 66,67 %, dan sedangkan masuk kategori *sangat baik* sebanyak 8 orang atau 26,67 %. Berdasarkan hasil tersebut, secara



umum guru berusaha untuk meningkatkan pengetahuannya dibidangnya dalam rangka menyukseskan program RSBI. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh 126 dengan kategori sangat baik.

Pada komitmen 5, yaitu *Kesesuaian antara keahlian dan tugas yang diberikan pada program RSBI*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 responden, responden yang masuk kategori *sangat tidak baik dan tidak baik* tidak ada., yang masuk kategori *cukup baik* 12 orang atau 40 %, yang masuk kategori *baik* 10 orang atau 33,33 %, dan sedangkan masuk kategori *sangat baik* sebanyak 6 orang atau 20 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru berusaha untuk meningkatkan pengetahuannya dibidangnya dalam rangka menyukseskan program RSBI. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh 108 dengan kategori baik.

#### 5.4.2 Tanggapan Guru Terhadap Sub Dimensi Insentif

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap disposisi sub dimensi intensif dengan kategori jawaban sangat memadai (SM), Memadai (M), cukup Memadai (CM), tidak memadai (TM), dan sangat tidak Memadai (STM), diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 27. Sub Dimensi Insentif**

| Pernyataan  | Kategori Jawaban |     |         |        |               |         |               |      |                      |        | Jml skor  | Ket.              |
|---|------------------|-----|---------|--------|---------------|---------|---------------|------|----------------------|--------|-----------|-------------------|
|   | Sangat Memadai   |     | Memadai |        | Cukup Memadai |         | Tidak Memadai |      | Sangat Tidak Memadai |        |           |                   |
| Pemberian insentif                                    | 0                | 0 % | 1       | 3,33 % | 5             | 16,67 % | 21            | 70 % | 3                    | 10 %   | <b>64</b> | <b>Tidak baik</b> |
| Pemberian insentif sesaat setelah pelaksanaan program | 0                | 0 % | 1       | 3,33 % | 9             | 30 %    | 18            | 60 % | 2                    | 6,67 % | <b>69</b> | <b>Tidak baik</b> |
| Insentif yang diberikan bernilai                      | 0                | 0 % | 1       | 3,33 % | 9             | 30 %    | 18            | 60 % | 2                    | 6,67 % | <b>69</b> | <b>Tidak baik</b> |
| <b>Rata-rata</b>                                      |                  |     |         |        |               |         |               |      |                      |        | <b>67</b> | <b>Tidak baik</b> |

Sumber: Peneliti (2012)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa insentif 1, yaitu *pemberian insentif dalam melaksanakan program RSBI*, responden yang menjawab kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 3 orang atau 10 %, guru yang menjawab kategori *tidak memadai* sebanyak 21 orang atau 70 %, yang menjawab kategori *cukup memadai* 5 orang atau 16,67 %, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 1 orang atau 3,33 % dan *sangat memadai* tidak ada.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa pemberian insentif dalam melaksanakan program RSBI tidak memadai. Sedangkan berdasarkan skor yang diperoleh untuk pemberian insentif sebesar 64, masuk dalam kategori tidak memadai. Hasil wawancara:

*“..Insentif guru untuk guru RSBI, tidak ada dana khusus untuk RSBI, klo ada kegiatan baru menerima insentif, untuk insentif wali kelas, jabatan wakil itu tidak ada. Insentifnya berdasarkan kinerja artinya kalau ada kegiatan misalnya kepanitian, baru ada insentifnya. Ini merupakan peraturan daerah..”*

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa intensif 2, yaitu *insentif diberikan sesaat setelah melaksanakan tugas program RSBI*, responden yang menjawab kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 2 orang atau 6,67 %, guru yang menjawab kategori *tidak memadai* sebanyak 18 orang atau 60 %, yang menjawab kategori *cukup memadai* 9 orang atau 30 %, 1 orang atau 3,33 % dan *sangat memadai* tidak ada.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa pemberian insentif dalam melaksanakan program RSBI tidak memadai. Sedangkan berdasarkan skor yang diperoleh untuk pemberian insentif sebesar 69, masuk dalam kategori tidak memadai.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa intensif 3, yaitu *insentif yang diberikan bernilai penting bagi guru*, responden yang menjawab kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 2 orang atau 6,67 %, guru yang menjawab kategori *tidak memadai* sebanyak 18 orang atau 60 %, yang menjawab

kategori *cukup memadai* 9 orang atau 30 %, 1 orang atau 3,33 % dan *sangat memadai* tidak ada.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa pemberian insentif dalam melaksanakan program RSBI tidak memadai. Sedangkan berdasarkan skor yang diperoleh untuk pemberian insentif sebesar 69, masuk dalam kategori tidak memadai.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau pelaksana. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka implementasi akan mengalami banyak masalah.

Lebih jauh Edwards III menyebut dua hal penting berkenaan dengan dispositions. Hal pertama adalah sikap para staf dan yang kedua mengenai insentif bagi pelaksana kebijakan. Sikap para pelaksana merupakan hambatan serius bagi implementasi kebijakan. Jika staf yang ada tidak dapat mengimplementasikan kebijakan seperti keinginan para pembuat kebijakan, perlu diganti dengan staf yang lebih responsive terhadap pimpinan. Sementara insentif menekankan pada tingkat kecukupan/kepentingan reward yang akan diterima pelaksana kebijakan jika bersedia dan/atau berhasil menerapkan kebijakan. Insentif juga dimaknai luas sebagai sarana “pengendalian” bagi pelaksana kebijakan agar bersedia menerapkan kebijakan sesuai yang direncanakan pembuat kebijakan. Pemberian insentif merupakan tehnik potensial

Dari penjelasan di atas adalah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

## **5.5 Tanggapan Guru Terhadap Struktur Birokrasi**

### **5.5.1 Tanggapan Guru Terhadap Sub Dimensi SOP**

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap struktur birokrasi sub dimensi *standard operational procedur* dengan kategori

jawaban sangat memadai (SM), Memadai (M), cukup Memadai (CM), tidak memadai (TM), dan sangat tidak Memadai (STM), diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 28 . Sub Dimensi SOP**

| Pernyataan        | Kategori Jawaban |        |         |         |               |      |               |        |                      |    | Jml skor  | Ket.              |
|-------------------|------------------|--------|---------|---------|---------------|------|---------------|--------|----------------------|----|-----------|-------------------|
|                   | Sangat Memadai   |        | Memadai |         | Cukup Memadai |      | Tidak Memadai |        | Sangat Tidak Memadai |    |           |                   |
| Ketersediaan SOP  | 2                | 6,67 % | 5       | 16,66 % | 21            | 70 % | 2             | 6,67 % | 0                    | 0% | 95        | Cukup Baik        |
| Kejelasan SOP     | 2                | 6,67 % | 5       | 16,66 % | 21            | 70 % | 2             | 6,67 % | 0                    | 0% | 95        | Cukup Baik        |
| Kejelasan pedoman | 6                | 20 %   | 5       | 16,67 % | 18            | 80 % | 1             | 3,33 % | 0                    | 0% | 106       | Baik              |
| <b>Rata-rata</b>  |                  |        |         |         |               |      |               |        |                      |    | <b>99</b> | <b>Cukup Baik</b> |

Sumber: Peneliti (2012)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa SOP 1, yaitu *ketersediaan Standard Operating Procedures (SOP)*, responden yang menjawab kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 0 orang atau 0 %, guru yang menjawab kategori *tidak memadai* sebanyak 2 orang atau 6,67 %, yang menjawab kategori *cukup memadai* 21 orang atau 70 %, yang menyatakan masuk kategori *memadai* sebanyak 5 orang atau 16,66 % dan yang menyatakan *sangat memadai* 2 orang atau 6,67 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan *ketersediaan Standard Operating Procedures (SOP)* masuk dalam kategori cukup memadai.

“...Untuk SOP ada, tapi bukan daerah sekolah. Sekoalh menterjemahkan peraturan atau standar dari pusat..”

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa SOP 2, yaitu *kejelasan Standard Operating Procedures (SOP)*, responden yang menjawab kategori *sangat*

*tidak memadai* sebanyak 0 orang atau 0 %, guru yang menjawab kategori *tidak memadai* sebanyak 2 orang atau 6,67 %, yang menjawab kategori *cukup memadai* 21 orang atau 70 %, yang menyatakan masuk kategori *memadai* sebanyak 5 orang atau 16,66 % dan yang menyatakan *sangat memadai* 2 orang atau 6,67 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan *ketersediaan Standard Operating Procedures (SOP)* masuk dalam kategori cukup memadai.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa SOP 3, yaitu *kejelasan petunjuk pelaksanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional*, responden yang menjawab kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 0 orang atau 0 %, guru yang menjawab kategori *tidak memadai* sebanyak 1 orang atau 3,33 %, yang menjawab kategori *cukup memadai* 18 orang atau 80 %, yang menyatakan masuk kategori *memadai* sebanyak 5 orang atau 16,66 % dan yang menyatakan *sangat memadai* 6 orang atau 20 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan *kejelasan petunjuk pelaksanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional* masuk dalam kategori cukup memadai.

### **5.5.2 Tanggapan Guru Terhadap Sub Dimensi Fragmentasi**

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap struktur birokrasi sub dimensi fragmentasi dengan kategori jawaban sangat memadai (SM), Memadai (M), cukup Memadai (CM), tidak memadai (TM), dan sangat tidak Memadai (STM), diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 29. Sub Dimensi Fragmentasi**

| Pernyataan                    | Kategori Jawaban |      |         |         |               |         |               |         |                      |        | Jml skor   | Ket.        |
|-------------------------------|------------------|------|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------------------|--------|------------|-------------|
|                               | Sangat Memadai   |      | Memadai |         | Cukup Memadai |         | Tidak Memadai |         | Sangat Tidak Memadai |        |            |             |
| Ketersediaan tim khusus       | 3                | 10 % | 18      | 60 %    | 8             | 26,67 % | 1             | 3,33 %  | 0                    | 0 %    | 113        | Baik        |
| ketersediaan Job Descreption  | 9                | 30 % | 14      | 46,67 % | 7             | 23,33 % | 0             | 0 %     | 0                    | 0 %    | 122        | Baik        |
| Kejelasan Job Descreption     | 6                | 20 % | 6       | 20 %    | 10            | 33,33 % | 8             | 26,67 % | 0                    | 0 %    | 100        | Baik        |
| Kerja sama dengan pihak lain, | 3                | 10 % | 4       | 13,33 % | 12            | 40 %    | 10            | 33,33 % | 1                    | 3,33 % | 88         | Cukup baik  |
| <b>Rata-rata</b>              |                  |      |         |         |               |         |               |         |                      |        | <b>106</b> | <b>Baik</b> |

Sumber: Peneliti (2012)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fragmentasi 1, yaitu *ketersediaan tim khusus (kelompok kerja) dalam pelaksanaan program RSBI*, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 0 orang atau 0 %, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 1 orang atau 3,33 %, yang menyatakan kategori *cukup memadai* 8 orang atau 26,67 %, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 18 orang atau 60 % dan yang menyatakan *sangat memadai* 3 orang atau 10 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa *ketersediaan tim khusus (kelompok kerja) dalam pelaksanaan program RSBI*, memadai atau baik.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fragmentasi 2, yaitu *ketersediaan Job Descreption yang dimiliki anggota tim*, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 0 orang atau 0 %, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 0 orang atau 0 %, yang menyatakan kategori *cukup memadai* 7 orang atau 23,33 %, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 14 orang atau 46,67 % dan yang menyatakan *sangat memadai* 9 orang atau 30 %.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa ketersediaan *Job Description yang dimiliki anggota tim* dalam kategori memadai atau baik.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fragmentasi 3, yaitu *kejelasan Job Description yang dimiliki anggota tim*, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 0 orang atau 0 %, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 8 orang atau 26,673 %, yang menyatakan kategori *cukup memadai* 10 orang atau 33,33 %, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 6 orang atau 20 % dan yang menyatakan *sangat memadai* 6 orang atau 20 %. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa kejelasan *Job Description yang dimiliki anggota tim* dalam kategori memadai atau baik.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fragmentasi 4, yaitu *Kerjasama dengan pihak lain*, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 1 orang atau 3,33 %, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 10 orang atau 33,33 %, yang menyatakan kategori *cukup memadai* 12 orang atau 40 %, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 4 orang atau 13,33 % dan yang menyatakan *sangat memadai* 3 orang atau 10 %. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa *kerja sama dengan pihak lain* cukup memadai atau cukup baik.

Salah satu hal yang penting dalam implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik oleh organisasi adalah adanya sejenis *standard operating procedures (SOP)*. SOP merupakan positivisasi atau pembakuan terhadap langkah-langkah dan prosedur yang harus dikerjakan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan, misalnya SOP pembuatan keputusan, SOP pertanggungjawaban kegiatan, SOP pengawasan kegiatan, dan lain sebagainya. SOP adalah suatu standard penyikapan baku yang harus dilaksanakan dalam kondisi apapun. Kebakuan seperti ini membuat kebijakan diterapkan secara seragam dan standar, padahal bisa jadi masing-masing masalah yang dihadapi memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik yang harusnya disikapi dengan kebijakan berbeda pula.

Edwards III mengemukakan pentingnya memperhatikan *fragmentation* dalam struktur birokrasi. Menurut Edwards *fragmentation* adalah pembagian pusat koordinasi dan pertanggungjawaban. Atau bisa dikatakan bahwa fragmentasi adalah terpecah-pecahnya pelaksana kebijakan karena banyaknya organisasi atau badan yang terlibat di dalamnya. *Fragmentation* membawa konsekuensi yang besar bagi keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin banyak pihak yang itu terlibat, pelaksana kegiatan cenderung kurang fokus. Tetapi disisi lain, jika suatu kegiatan memiliki skala besar sementara koordinasi dan pertanggungjawaban yang pada akhirnya mengakibatkan tersendatkan pelaksana kegiatan.





## BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi atau sosialisasi tentang penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional berada pada kategori kurang baik. Dalam arti bahwa komunikasi dalam implementasi pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf internasional belum sepenuhnya berjalan dengan baik., terutama komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh dinas Pendidikan Propinsi dan Suku Dinas Pendidikan Kota Serang masih kurang baik atau jarang.

Pada dimensi sumberdaya, faktor sumberdaya dalam kategori baik, aspek yang belum memadai misalnya latar belakang pendidikan guru untuk S2/S3 sesuai dengan dengan ketetapan untuk menyelenggarakan rintisan sekolah bertaraf internasional masih di bawah standar, belum adanya laboran dan bahan atau alat praktek belum memadai serta dukungan dana yang kurang. Namun, untuk jumlah rasio guru dengan rombongan belajar dan tingkat kedisiplinan guru sangat baik sehingga perlu dipertahankan.

Berdasarkan kriteria penilaian, dimensi disposisi khususnya sub dimensi komitmen terhadap pelaksanaan program rintisan sekolah bertaraf internasional sudah baik. Guru berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalitas, saling bekerjasama dalam upaya keberhasilan program rintisan sekoalh bertaraf internasional. Namun, penempatan staf dan insentif kurang memadai karena tidak adanya insentif yang diberikan kepada guru, insentif hanya diberikan apabila ada kegiatan atau kepanitian, misalnya: penerimaan peserta didik baru.

Faktor struktur birokrasi, pada subdimensi *Standard Operating Procedures* (SOP) yaitu ketersediaan SOP dan kejelasan pedoman dalam kategori cukup memadai, artinya bahwa subdimensi SOP belum sepenuhnya baik. Subdimensi fragmentasi sudah baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi atau sosialisasi dan sumberdaya manusia belum mendukung untuk

pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf internasional. Hal ini, yang dapat menyebabkan nilai Indikator Kinerja Kunci Minimal (IKKM) dan Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT) pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMPN 1 Serang termasuk kategori kurang.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan adanya upaya-upaya dalam menyelenggarakan rintisan sekolah bertaraf internasional, yaitu; Pertama dalam aspek komunikasi, perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah (kementerian pendidikan nasional, Dinas Pendidikan tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota) dan instansi terkait secara terperinci dan mendalam mengenai penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional, adanya bimbingan dan pendampingan bagi sekolah penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional oleh pemerintah (kementerian pendidikan nasional, Dinas Pendidikan tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota) dan instansi terkait. Bimbingan dan pendampingan dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, seminar-seminar dan forum-forum diskusi atau bentuk kegiatan lainnya.

Kedua dari aspek sumberdaya, khususnya sumberdaya manusia, agar guru-guru dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 atau S3.

## REFERENSI

### BUKU

- Ali Imron (2008), *Kebijaksanaan Pendidikan Indonesia: Proses, Produk dan Masa Depan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Alwasilah, A. Chaedar (2003), *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Arikunto, Suharsimi (2009), *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Arni Muhammad (2009), *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Becker, Brian E., Huselid, Mark A., dan Ulrich, Dave (2001), *The HR SCORECARD: Linking People, Strategy, and Performance*, Alih Bahasa: Dian Rahadyanto Basuki, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Departemen Pendidikan Nasional (2008), *Pedoman Penjamin Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (2008), *Laporan Monitoring dan Evaluasi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI-2008)*, Jakarta.
- Dwiyanto Indiahono, (2009), *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analisis*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Edwards III, George, (1980), *Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quaterly Inc.
- E. Mulyasa (2008), *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Suatu Panduan Praktis*. Bandung: Rosda Karya.
- Farouk Muhammad dan Djaali, (2003), *Metodologi Penelitian Sosial: Bunga Rampai*, Jakarta: Penerbit PTIK Press.
- Forum Wartawan Peduli Pendidikan (2006), *Kilas Balik Pendidikan Nasional 2006*. Jakarta
- Herman Sofyandi (2008), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Jamal Ma'mur Asmani (2010), *Tips Efektif Aplikasi KTSP di Sekolah*. Yogyakarta: Penerbit Bening.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier (1983), *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Moekijat (1995), *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Maju
- Muhammad Ali, (2009), *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*, (Jakarta: PT. Imperial Bhakti Utama).
- Pace, R. Wayne dan Faules, Don F (2006), *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Patton, Michael Quinn (2006), *Metode Evaluasi Kualitatif*, diterjemahkan oleh Budi Puspo Priyadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetya Irawan, (2006), *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: DIA FISIP UI
- Riant Nugroho (2009), *Public Policy*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Robbins, Stephen P. (1994), *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*. Alih Bahasa: Jusuf Udaya, Jakarta: Arcan.
- Said, M. Mas'ud (2010), *Birokrasi di Negara Birokratis: Makna, Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia*, Malang: UMM Press.
- Syafarudin (2008), *Efektivitas kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Solichin Abdul Wahab (2010), *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Tilaar, H.A.R, (1998), *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad 21*, Magelang: Penerbit Tera Indonesia.
- William N. Dunn (1994), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Diterjemahkan oleh: Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zuhal, (2008), *Kekuatan Daya Saing Indonesia, Menyiapkan Masyarakat Berbasis Pengetahuan*, Jakarta: Kompas.

## PERATURAN DAN PANDUAN

Kementerian Pendidikan Nasional (2010), *Panduan Pelaksanaan Pembinaan SMP-RSBI*, Jakarta

*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.*

*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.*

*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia.*

*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.* Jakarta: Depdiknas, 2005.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* Jakarta: Depdiknas, 2003.

## DISERTASI

Mudjito (2010), *Evaluasi Kebijakan Pendidikan Nasional Tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah.* Universitas Negeri Jakarta. Jakarta

Ratna Susiani (2010), *Kajian Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) SMK Negeri 2 Salatiga dan Hubungannya Dalam Pengembangan Wilayah Sekitar.* Universitas Indonesia

Setiawan Witaradya (2010) *Implementasi Kebijakan Subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional studi kasus pada SDNP 1 Menteng, 01 Jak-Pus dan SDN Sukadamai 3 Kota Bogor.* Universitas Indonesia

## Website

Pengantar Rintisan sekolah bertaraf Internasional. 20-10-2010  
<http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/web/rsbipeng/5.html>

## LAMPIRAN

## KUESIONER

## PETUNJUK

1. Berilah tanda (√) pada jawaban yang menurut Anda sesuai
2. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah terhadap pernyataan-pernyataan berikut
3. Bapak/Ibu pilih sesuai dengan kondisi/fakta sesungguhnya

| No.                          | Pernyataan   | Alternatif Jawaban                                  |   |  |   |   |
|------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| <b>Variabel : Komunikasi</b> |  |   |   |  |   |   |
| <b>Dimensi : Transmisi</b>   |  |   |   |  |   |   |
| 1                            | Pemerintah Pusat melakukan sosialisasi penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional kepada masyarakat melalui berbagai media (koran, televisi, pamflet, brosur, internet, dll)?                   | <input type="checkbox"/><br>Selalu ( $\geq 4$ Kali) | <input type="checkbox"/><br>Sering (4 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Kadang-Kadang (3 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Jarang (1-2 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Tidak Pernah (0 Kali) |
| 2                            | Pemerintah Daerah (Provinsi) melakukan sosialisasi penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional kepada masyarakat melalui berbagai media (koran, televisi, pamflet, brosur, internet, dll)?       | <input type="checkbox"/><br>Selalu ( $\geq 4$ Kali) | <input type="checkbox"/><br>Sering (4 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Kadang-Kadang (3 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Jarang (1-2 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Tidak Pernah (0 Kali) |
| 3                            | Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) melakukan sosialisasi penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional kepada masyarakat melalui berbagai media (koran, televisi, pamflet, brosur, internet, dll)? | <input type="checkbox"/><br>Selalu ( $\geq 4$ Kali) | <input type="checkbox"/><br>Sering (4 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Kadang-Kadang (3 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Jarang (1-2 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Tidak Pernah (0 Kali) |
| 4                            | Pemerintah melakukan sosialisasi penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional melalui kegiatan seminar.   | <input type="checkbox"/><br>Selalu ( $\geq 4$ Kali) | <input type="checkbox"/><br>Sering (4 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Kadang-Kadang (3 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Jarang (1-2 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Tidak Pernah (0 Kali) |
| 5                            | Pemerintah Daerah (Provinsi) melakukan sosialisasi penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional melalui kegiatan seminar.   | <input type="checkbox"/><br>Selalu ( $\geq 4$ Kali) | <input type="checkbox"/><br>Sering (4 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Kadang-Kadang (3 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Jarang (1-2 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Tidak Pernah (0 Kali) |
| 6                            | Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) melakukan sosialisasi penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional melalui kegiatan seminar.   | <input type="checkbox"/><br>Selalu ( $\geq 4$ Kali) | <input type="checkbox"/><br>Sering (4 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Kadang-Kadang (3 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Jarang (1-2 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Tidak Pernah (0 Kali) |

| No.                    | Pernyataan   | Alternatif Jawaban                                  |   |  |   |   |
|------------------------|--|---|---|--|---|---|
| 7                      | Pemerintah melakukan sosialisasi penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional melalui kegiatan workshop                           | <input type="checkbox"/><br>Selalu ( $\geq 4$ Kali) | <input type="checkbox"/><br>Sering (4 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Kadang-Kadang (3 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Jarang (1-2 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Tidak Pernah (0 Kali) |
| 8                      | Pemerintah Daerah (Provinsi) melakukan sosialisasi penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional melalui kegiatan workshop         | <input type="checkbox"/><br>Selalu ( $\geq 4$ Kali) | <input type="checkbox"/><br>Sering (4 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Kadang-Kadang (3 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Jarang (1-2 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Tidak Pernah (0 Kali) |
| 9                      | Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) melakukan sosialisasi penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional melalui kegiatan workshop   | <input type="checkbox"/><br>Selalu ( $\geq 4$ Kali) | <input type="checkbox"/><br>Sering (4 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Kadang-Kadang (3 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Jarang (1-2 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Tidak Pernah (0 Kali) |
| 10                     | Pemerintah melakukan sosialisasi penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional melalui kegiatan pelatihan.                         | <input type="checkbox"/><br>Selalu ( $\geq 4$ Kali) | <input type="checkbox"/><br>Sering (4 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Kadang-Kadang (3 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Jarang (1-2 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Tidak Pernah (0 Kali) |
| 11                     | Pemerintah Daerah (Provinsi) melakukan sosialisasi penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional melalui kegiatan pelatihan.       | <input type="checkbox"/><br>Selalu ( $\geq 4$ Kali) | <input type="checkbox"/><br>Sering (4 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Kadang-Kadang (3 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Jarang (1-2 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Tidak Pernah (0 Kali) |
| 12                     | Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) melakukan sosialisasi penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional melalui kegiatan pelatihan. | <input type="checkbox"/><br>Selalu ( $\geq 4$ Kali) | <input type="checkbox"/><br>Sering (4 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Kadang-Kadang (3 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Jarang (1-2 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Tidak Pernah (0 Kali) |
| <b>Kejelasan Pesan</b> |  |   |   |  |   |   |
| 13                     | Sosialisasi penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional melalui berbagai media mudah dipahami.                                   | <input type="checkbox"/><br>Sangat Mudah Dipahami   | <input type="checkbox"/><br>Mudah Dipahami  | <input type="checkbox"/><br>Cukup Dipahami         | <input type="checkbox"/><br>Tidak Dipahami    | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Dipahami |
| 14                     | Sosialisasi penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional melalui seminar mudah dipahami.  | <input type="checkbox"/><br>Sangat Mudah Dipahami   | <input type="checkbox"/><br>Mudah Dipahami  | <input type="checkbox"/><br>Cukup Dipahami         | <input type="checkbox"/><br>Tidak Dipahami    | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Dipahami |
| 15                     | Sosialisasi penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional melalui workshop mudah dipahami.   | <input type="checkbox"/><br>Sangat Mudah Dipahami   | <input type="checkbox"/><br>Mudah Dipahami  | <input type="checkbox"/><br>Cukup Dipahami         | <input type="checkbox"/><br>Tidak Dipahami    | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Dipahami |
| 16                     | Sosialisasi penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional melalui pelatihan mudah dipahami.  | <input type="checkbox"/><br>Sangat Mudah Dipahami   | <input type="checkbox"/><br>Mudah Dipahami  | <input type="checkbox"/><br>Cukup Dipahami         | <input type="checkbox"/><br>Tidak Dipahami    | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Dipahami |
| 17                     | Materi yang disampaikan dalam sosialisasi penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang disampaikan melalui                   | <input type="checkbox"/><br>Sangat Mudah Dipahami   | <input type="checkbox"/><br>Mudah Dipahami  | <input type="checkbox"/><br>Cukup Dipahami         | <input type="checkbox"/><br>Tidak Dipahami    | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Dipahami |

| No.                            | Pernyataan   | Alternatif Jawaban  |  |   |   |   |
|--------------------------------|--|---|--|---|---|---|
|                                | berbagai media dapat dipahami oleh masyarakat.   |   |  |   |   |   |
| 18                             | Materi yang disampaikan dalam sosialisasi penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang disampaikan melalui seminar mudah dipahami.   | <input type="checkbox"/><br>Sangat Mudah Dipahami             | <input type="checkbox"/><br>Mudah Dipahami         | <input type="checkbox"/><br>Cukup Dipahami              | <input type="checkbox"/><br>Tidak Dipahami              | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Dipahami                   |
| 19                             | Materi yang disampaikan dalam sosialisasi penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang disampaikan melalui workshop mudah dipahami.  | <input type="checkbox"/><br>Sangat Mudah Dipahami             | <input type="checkbox"/><br>Mudah Dipahami         | <input type="checkbox"/><br>Cukup Dipahami              | <input type="checkbox"/><br>Tidak Dipahami              | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Dipahami                   |
| 20                             | Materi yang disampaikan dalam sosialisasi penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang disampaikan melalui pelatihan mudah dipahami. | <input type="checkbox"/><br>Sangat Mudah Dipahami             | <input type="checkbox"/><br>Mudah Dipahami         | <input type="checkbox"/><br>Cukup Dipahami              | <input type="checkbox"/><br>Tidak Dipahami              | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Dipahami                   |
| 21                             | Saya memahami tujuan diselenggarakannya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional  | <input type="checkbox"/><br>Sangat Mudah Dipahami             | <input type="checkbox"/><br>Mudah Dipahami         | <input type="checkbox"/><br>Cukup Dipahami              | <input type="checkbox"/><br>Tidak Dipahami              | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Dipahami                   |
| <b>Variabel : Sumber Daya</b>  |  |   |  |   |   |   |
| <b>Dimensi : Kuantitas SDM</b> |  |   |  |   |   |   |
| 22                             | Jumlah Pendidik di Sekolah kami sudah memadai, rasio pendidik dengan rombongan belajar.  | <input type="checkbox"/><br>Sangat Memadai ( $\geq 1,5 : 1$ ) | <input type="checkbox"/><br>Memadai (1,2-1,4:1)    | <input type="checkbox"/><br>Cukup Memadai (1-1,19 : 1)  | <input type="checkbox"/><br>Tidak Memadai (1:1)         | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Memadai ( $\leq 1 : 1$ )   |
| 23                             | Kesesuaian bidang keahlian pendidik dengan mata pelajaran yang diampu.   | <input type="checkbox"/><br>Sangat Sesuai (95-100 Persen)     | <input type="checkbox"/><br>Sesuai (90-94 Persen)  | <input type="checkbox"/><br>Cukup Sesuai (85-89 Persen) | <input type="checkbox"/><br>Tidak Sesuai (80-84 Persen) | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Sesuai ( $\leq 80$ Persen) |
| <b>Dimensi : Kualitas SDM</b>  |  |   |  |   |   |   |
| 24                             | Pendidik dalam pembelajarannya selalu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu dan media pembelajaran.                      | <input type="checkbox"/><br>Sangat Setuju                     | <input type="checkbox"/><br>Setuju                 | <input type="checkbox"/><br>Cukup Setuju                | <input type="checkbox"/><br>Tidak Setuju                | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Setuju                     |
| 25                             | Kemampuan pendidik di Sekolah kami dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.  | <input type="checkbox"/><br>Sangat Memadai ( $\geq 90$ %)     | <input type="checkbox"/><br>Memadai (80-89 Persen) | <input type="checkbox"/><br>Cukup Memadai (70-79 %)     | <input type="checkbox"/><br>Tidak Memadai (55-69 %)     | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Memadai ( $\leq 54$ %)     |
| 26                             | Kedisiplinan semua pendidik meningkat dengan ditetapkannya sekolah kami menjadi rintisan sekolah bertaraf internasional                              | <input type="checkbox"/><br>Sangat Disiplin                   | <input type="checkbox"/><br>Disiplin               | <input type="checkbox"/><br>Cukup Disiplin              | <input type="checkbox"/><br>Tidak Disiplin              | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Disiplin                   |



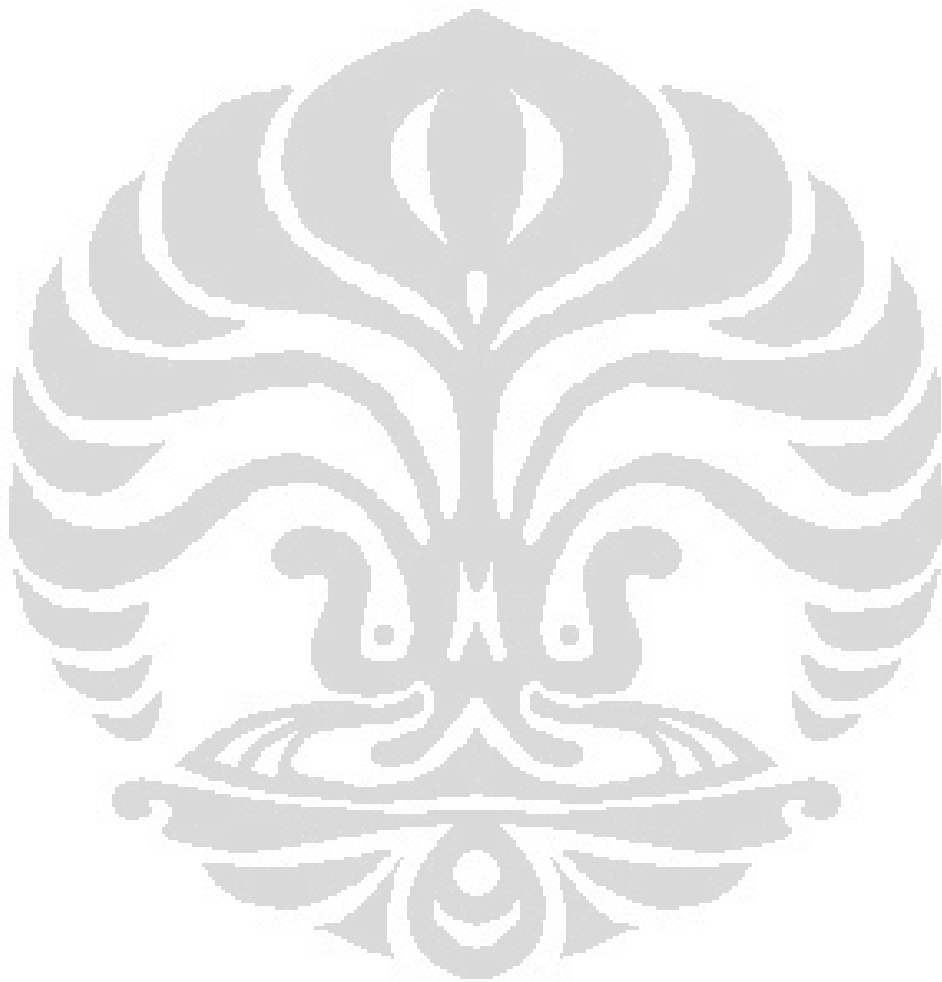
| No.                        | Pernyataan  | Alternatif Jawaban  |  |  |  |   |
|----------------------------|---|---|--|--|--|---|
| 27                         | Saya selalu tepat waktu dalam melaksanakan pembelajaran   | <input type="checkbox"/><br>Selalu                                  | <input type="checkbox"/><br>Sering                             | <input type="checkbox"/><br>Kadang-Kadang                            | <input type="checkbox"/><br>Jarang                                       | <input type="checkbox"/><br>Tidak Pernah                                |
| 28                         | Kualifikasi pendidikan pendidik pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional berpengaruh pada keberhasilan sekolah menjadi Sekolah Bertaraf Internasional | <input type="checkbox"/><br>Sangat Berpengaruh                      | <input type="checkbox"/><br>Berpengaruh                        | <input type="checkbox"/><br>Cukup Berpengaruh                        | <input type="checkbox"/><br>Tidak Berpengaruh                            | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Berpengaruh                    |
| 29                         | Kualifikasi pendidikan pendidik di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional berpengaruh pada produktivitas pembelajaran                                    | <input type="checkbox"/><br>Sangat Berpengaruh                      | <input type="checkbox"/><br>Berpengaruh                        | <input type="checkbox"/><br>Cukup Berpengaruh                        | <input type="checkbox"/><br>Tidak Berpengaruh                            | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Berpengaruh                    |
| 30                         | Tingkat kualifikasi pendidikan guru di sekolah kami.  | <input type="checkbox"/><br>Sangat Memadai (100 % Lulusan >= S1/D4) | <input type="checkbox"/><br>Memadai (90-99 % Lulusan >= S1/D4) | <input type="checkbox"/><br>Cukup Memadai (80-89 % Lulusan >= S1/D4) | <input type="checkbox"/><br>Tidak Sesuai (70-79 Persen Lulusan >= S1/D4) | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Sesuai (<= 69 % Lulusan S1/D4) |
| <b>Dimensi : Fasilitas</b> |   |   |  |  |  |   |
| 31                         | Keberadaan Laboran di Sekolah kami berpengaruh pada layanan terhadap peserta didik dalam praktikum.   | <input type="checkbox"/><br>Sangat Berpengaruh                      | <input type="checkbox"/><br>Berpengaruh                        | <input type="checkbox"/><br>Cukup Berpengaruh                        | <input type="checkbox"/><br>Tidak Berpengaruh                            | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Berpengaruh                    |
| 32                         | Perbandingan jumlah Laboran dengan jumlah rombongan belajar di Sekolah kami.  | <input type="checkbox"/><br>Sangat Sesuai (1 : <=9)                 | <input type="checkbox"/><br>Sesuai (1 : 9-12)                  | <input type="checkbox"/><br>Cukup Sesuai (1 : 12-15)                 | <input type="checkbox"/><br>Tidak Sesuai (1 : >=15)                      | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Sesuai (Tidak Ada)             |
| 33                         | Sekolah Kami memiliki jumlah ruang kelas yang sama dengan jumlah rombongan belajar.   | <input type="checkbox"/><br>Sangat Setuju                           | <input type="checkbox"/><br>Setuju                             | <input type="checkbox"/><br>Cukup Setuju                             | <input type="checkbox"/><br>Tidak Setuju                                 | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Setuju                         |
| 34                         | Jumlah ruang kelas yang kurang dari jumlah rombongan belajar akan menyebabkan tidak optimalnya pembelajaran   | <input type="checkbox"/><br>Sangat Setuju                           | <input type="checkbox"/><br>Setuju                             | <input type="checkbox"/><br>Cukup Setuju                             | <input type="checkbox"/><br>Tidak Setuju                                 | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Setuju                         |
| 35                         | Sedikitnya jumlah bahan praktikum berdampak pada tidak tercapainya target standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik       | <input type="checkbox"/><br>Sangat Setuju                           | <input type="checkbox"/><br>Setuju                             | <input type="checkbox"/><br>Cukup Setuju                             | <input type="checkbox"/><br>Tidak Setuju                                 | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Setuju                         |
| 36                         | Jumlah minimal bahan praktikum yang kami disediakan pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional  | <input type="checkbox"/><br>Sangat Sesuai (90-100 Persen)           | <input type="checkbox"/><br>Sesuai (80 - 89 Persen)            | <input type="checkbox"/><br>Cukup (70 - 79 Persen)                   | <input type="checkbox"/><br>Tidak Sesuai (55 - 69 Persen)                | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Sesuai (, 55 Persen)           |
| 37                         | Kelengkapan sarana teknologi informasi dan komunikasi di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional berpengaruh pada kualitas lulusan.                       | <input type="checkbox"/><br>Sangat Berpengaruh                      | <input type="checkbox"/><br>Berpengaruh                        | <input type="checkbox"/><br>Cukup Berpengaruh                        | <input type="checkbox"/><br>Tidak Berpengaruh                            | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Berpengaruh                    |

| No.                         | Pernyataan  | Alternatif Jawaban  |   |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|--|
| 38                          | Kelengkapan sarana teknologi informasi dan komunikasi di Sekolah Kami.  | <input type="checkbox"/><br>Sangat Memadai (90-100 % Terpenuhi) | <input type="checkbox"/><br>Memadai (80-89 % Terpenuhi) | <input type="checkbox"/><br>Cukup Memadai (70-79 % Terpenuhi) | <input type="checkbox"/><br>Tidak Memadai (55-69 % Terpenuhi) | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Memadai (<= 55 % Terpenuhi) |
| 39                          | Kelengkapan laboratorium multi media di Sekolah Kami?   | <input type="checkbox"/><br>Sangat Memadai (90-100 % Terpenuhi) | <input type="checkbox"/><br>Memadai (80-89 % Terpenuhi) | <input type="checkbox"/><br>Cukup Memadai (70-79 % Terpenuhi) | <input type="checkbox"/><br>Tidak Memadai (55-69 % Terpenuhi) | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Memadai (<= 55 % Terpenuhi) |
| 40                          | Jumlah buku yang ada di Perpustakaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional harus mencapai perbandingan 1 : ? 2 dengan jumlah siswa. Apakah jumlah buku di Perpustakaan Sekolah Anda sudah memenuhi? | <input type="checkbox"/><br>Sangat Memenuhi (1: <=2)            | <input type="checkbox"/><br>Memenuhi (1 : 2)            | <input type="checkbox"/><br>Cukup Memenuhii (1 : 3)           | <input type="checkbox"/><br>Tidak Memenuhi (1 : 4)            | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Memenuhi (1 : >=4)          |
| <b>Dimensi Pembiayaan</b>   |   |   |   |   |   |  |
| 41                          | Pembiayaan pendidikan yang memadai akan menentukan keberhasilan pembelajaran di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.  | <input type="checkbox"/><br>Sangat Setuju                       | <input type="checkbox"/><br>Setuju                      | <input type="checkbox"/><br>Cukup Setuju                      | <input type="checkbox"/><br>Tidak Setuju                      | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Setuju                      |
| 42                          | Peran serta masyarakat dalam pembiayaan sangat diperlukan di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.   | <input type="checkbox"/><br>Sangat Setuju                       | <input type="checkbox"/><br>Setuju                      | <input type="checkbox"/><br>Cukup Setuju                      | <input type="checkbox"/><br>Tidak Setuju                      | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Setuju                      |
| 43                          | Peran pemerintah dalam pembiayaan RSBI di Sekolah Kami  | <input type="checkbox"/><br>Sangat Memadai                      | <input type="checkbox"/><br>Memadai                     | <input type="checkbox"/><br>Cukup Memadai                     | <input type="checkbox"/><br>Tidak Memadai                     | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Memadai                     |
| 44                          | Peran pemerintah daerah (provinsi) dalam pembiayaan RSBI di Sekolah Kami  | <input type="checkbox"/><br>Sangat Memadai                      | <input type="checkbox"/><br>Memadai                     | <input type="checkbox"/><br>Cukup Memadai                     | <input type="checkbox"/><br>Tidak Memadai                     | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Memadai                     |
| 45                          | Peran pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam pembiayaan RSBI di Sekolah Kami  | <input type="checkbox"/><br>Sangat Memadai                      | <input type="checkbox"/><br>Memadai                     | <input type="checkbox"/><br>Cukup Memadai                     | <input type="checkbox"/><br>Tidak Memadai                     | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Memadai                     |
| 46                          | Peran orang tua peserta didik dalam pembiayaan RSBI di Sekolah Kami   | <input type="checkbox"/><br>Sangat Memadai                      | <input type="checkbox"/><br>Memadai                     | <input type="checkbox"/><br>Cukup Memadai                     | <input type="checkbox"/><br>Tidak Memadai                     | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Memadai                     |
| <b>Variabel : Disposisi</b> |   |   |   |   |   |  |
| <b>Dimensi : Komitment</b>  |   |   |   |   |   |  |
| 47                          | Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional membutuhkan peningkatan kinerja dari warga sekolah.   | <input type="checkbox"/><br>Sangat Setuju                       | <input type="checkbox"/><br>Setuju                      | <input type="checkbox"/><br>Cukup Setuju                      | <input type="checkbox"/><br>Tidak Setuju                      | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Setuju                      |

| No.                              | Pernyataan   | Alternatif Jawaban                        |                                    |   |  |   |
|----------------------------------|--|---|------------------------------------|---|--|---|
| 48                               | Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah Kami                         | <input type="checkbox"/><br>Sangat Setuju | <input type="checkbox"/><br>Setuju | <input type="checkbox"/><br>Cukup Setuju  | <input type="checkbox"/><br>Tidak Setuju | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Setuju |
| 49                               | Warga sekolah berusaha secara sungguh-sungguh untuk keberhasilan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional         | <input type="checkbox"/><br>Sangat Setuju | <input type="checkbox"/><br>Setuju | <input type="checkbox"/><br>Cukup Setuju  | <input type="checkbox"/><br>Tidak Setuju | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Setuju |
| 50                               | Warga sekolah berusaha bekerja dengan baik sesuai dengan bidang keahlian yang saya miliki.                                       | <input type="checkbox"/><br>Sangat Setuju | <input type="checkbox"/><br>Setuju | <input type="checkbox"/><br>Cukup Setuju  | <input type="checkbox"/><br>Tidak Setuju | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Setuju |
| 51                               | Warga sekolah bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan untuk mencapai hasil yang baik.                               | <input type="checkbox"/><br>Selalu        | <input type="checkbox"/><br>Sering | <input type="checkbox"/><br>Kadang-Kadang | <input type="checkbox"/><br>Jarang       | <input type="checkbox"/><br>Tidak Pernah        |
| <b>Dimensi : Penempatan Staf</b> |  |   |                                    |   |  |   |
| 52                               | Proporsi pemberian beban tugas tambahan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing warga sekolah                                 | <input type="checkbox"/><br>Sangat Setuju | <input type="checkbox"/><br>Setuju | <input type="checkbox"/><br>Cukup Setuju  | <input type="checkbox"/><br>Tidak Setuju | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Setuju |
| 53                               | Beban tugas yang diberikan kepada warga sekolah sudah sesuai dengan keahlian yang dimiliki                                       | <input type="checkbox"/><br>Sangat Sesuai | <input type="checkbox"/><br>Sesuai | <input type="checkbox"/><br>Cukup Sesuai  | <input type="checkbox"/><br>Tidak Sesuai | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Sesuai |
| <b>Dimensi : Insentif</b>        |  |   |                                    |   |  |   |
| 54                               | Penyelenggaraan RSBI berdampak pada kesejahteraan warga sekolah.   | <input type="checkbox"/><br>Sangat Setuju | <input type="checkbox"/><br>Setuju | <input type="checkbox"/><br>Cukup Setuju  | <input type="checkbox"/><br>Tidak Setuju | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Setuju |
| 55                               | Beban kerja yang meningkat dibarengi dengan pemberian insentif. Seberapa sering warga sekolah mendapat insentif dari sekolah?    | <input type="checkbox"/><br>Sangat Sering | <input type="checkbox"/><br>Sering | <input type="checkbox"/><br>Cukup Sering  | <input type="checkbox"/><br>Tidak Sering | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Sering |
| 56                               | Pemberian insentif dari pihak sekolah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.   | <input type="checkbox"/><br>Sangat Sesuai | <input type="checkbox"/><br>Sesuai | <input type="checkbox"/><br>Cukup Sesuai  | <input type="checkbox"/><br>Tidak Sesuai | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Sesuai |
| 57                               | Besar kecilnya insentif dari pihak sekolah disesuaikan dengan bobot pekerjaan yang diberikan kepada masing-masing warga sekolah. | <input type="checkbox"/><br>Sangat Sesuai | <input type="checkbox"/><br>Sesuai | <input type="checkbox"/><br>Cukup Sesuai  | <input type="checkbox"/><br>Tidak Sesuai | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Sesuai |

| <b>Variabel : Struktur Birokrasi</b> |   |   |   |  |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| <b>Dimensi : SOP</b>                 |   |   |   |  |   |   |
| 58                                   | Sekolah kami memiliki Standard Operating Procedures (SOP) yang memadai dalam penyelenggaraan RSBI                             | <input type="checkbox"/><br>Sangat Memadai        | <input type="checkbox"/><br>Memadai         | <input type="checkbox"/><br>Cukup Memadai          | <input type="checkbox"/><br>Tidak Memadai     | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Memadai  |
| 59                                   | Kejelasan SOP yang digunakan dalam penyelenggaraan RSBI di Sekolah Kami   | <input type="checkbox"/><br>Sangat Jelas          | <input type="checkbox"/><br>Jelas           | <input type="checkbox"/><br>Cukup Jelas            | <input type="checkbox"/><br>Tidak Jelas       | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Jelas    |
| 60                                   | Petunjuk pelaksanaan RSBI diperlukan sebagai pedoman pihak sekolah. Kejelasan petunjuk pelaksanaan yang dimiliki oleh sekolah | <input type="checkbox"/><br>Sangat Jelas          | <input type="checkbox"/><br>Jelas           | <input type="checkbox"/><br>Cukup Jelas            | <input type="checkbox"/><br>Tidak Jelas       | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Jelas    |
| <b>Dimensi : Fragmentasi</b>         |   |   |   |  |   |   |
| 61                                   | Kelompok kerja kemampuan yang memadai sesuai dengan keahlian masing-masing.   | <input type="checkbox"/><br>Sangat Setuju         | <input type="checkbox"/><br>Setuju          | <input type="checkbox"/><br>Cukup Setuju           | <input type="checkbox"/><br>Tidak Setuju      | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Setuju   |
| 62                                   | Kelompok kerja dapat bekerja dengan baik jika memiliki job deskripsi.   | <input type="checkbox"/><br>Sangat Setuju         | <input type="checkbox"/><br>Setuju          | <input type="checkbox"/><br>Cukup Setuju           | <input type="checkbox"/><br>Tidak Setuju      | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Setuju   |
| 63                                   | Kejelasan Job Deskriptif untuk masing-masing anggota Tim  | <input type="checkbox"/><br>Sangat Jelas          | <input type="checkbox"/><br>Jelas           | <input type="checkbox"/><br>Cukup Jelas            | <input type="checkbox"/><br>Tidak Jelas       | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Jelas    |
| 64                                   | Masing-masing individu dalam kelompok memiliki tanggungjawab sesuai dengan beban tugas yang diembannya.                       | <input type="checkbox"/><br>Sangat Setuju         | <input type="checkbox"/><br>Setuju          | <input type="checkbox"/><br>Cukup Setuju           | <input type="checkbox"/><br>Tidak Setuju      | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Setuju   |
| 65                                   | Dalam penyelenggaraan RSBI diperlukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama dengan pihak lain dapat berjalan dengan baik     | <input type="checkbox"/><br>Sangat Baik           | <input type="checkbox"/><br>Baik            | <input type="checkbox"/><br>Cukup Baik             | <input type="checkbox"/><br>Tidak Baik        | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Baik     |
| 66                                   | Sekolah atau Dinas Pendidikan pernah mengadakan sosialisasi/penjelasan mengenai RSBI kepada orang tua                         | <input type="checkbox"/><br>Selalu (>= 4 Kali)    | <input type="checkbox"/><br>Sering (4 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Kadang-Kadang (3 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Jarang (1-2 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Tidak Pernah (0 Kali) |
| 67                                   | Saat sosialisasi tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, penggunaan bahasa yang disampaikan pembaca                  | <input type="checkbox"/><br>Sangat Mudah Dipahami | <input type="checkbox"/><br>Mudah Dipahami  | <input type="checkbox"/><br>Netral                 | <input type="checkbox"/><br>Tidak Dipahami    | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak Dipahami |

|    |  |   |  |   |  |  |
|----|--|---|--|---|--|--|
| 68 | Pihak sekolah atau Dinas Pendidikan sering mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan RSBI | <input type="checkbox"/><br>4 Kali<br>Pertahun    | <input type="checkbox"/><br>3 Kali<br>Pertahun | <input type="checkbox"/><br>2 Kali<br>Pertahun            | <input type="checkbox"/><br>1 Kali<br>Pertahun   | <input type="checkbox"/><br>0 Kali<br>Pertahun       |
| 69 | Apakah sosialisasi/penjelasan mengenai RSBI disampaikan secara langsung (misalnya : seminar, rapat/pertemuan)                                | <input type="checkbox"/><br>Selalu<br>(>= 4 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Sering (4<br>Kali) | <input type="checkbox"/><br>Kadang-<br>Kadang (3<br>Kali) | <input type="checkbox"/><br>Jarang<br>(1-2 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Tidak Pernah<br>(0 Kali) |
| 70 | Apakah sosialisasi/penjelasan mengenai RSBI juga disampaikan secara tidak langsung (misalnya : surat pemberitahuan, brosur, spanduk)         | <input type="checkbox"/><br>Selalu<br>(>= 4 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Sering (4<br>Kali) | <input type="checkbox"/><br>Kadang-<br>Kadang (3<br>Kali) | <input type="checkbox"/><br>Jarang<br>(1-2 Kali) | <input type="checkbox"/><br>Tidak Pernah<br>(0 Kali) |
| 71 | Ruang kelas cukup memadai untuk melaksanakan RSBI  | <input type="checkbox"/><br>Sangat<br>Memadai     | <input type="checkbox"/><br>Memadai            | <input type="checkbox"/><br>Netral                        | <input type="checkbox"/><br>Tidak<br>Memadai     | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak<br>Memadai  |
| 72 | Kelengkapan bahan praktikum  | <input type="checkbox"/><br>Sangat<br>Lengkap     | <input type="checkbox"/><br>Lengkap            | <input type="checkbox"/><br>Cukup<br>Lengkap              | <input type="checkbox"/><br>Tidak<br>Lengkap     | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak<br>Lengkap  |
| 73 | Kondisi sarana TIK di sekolah  | <input type="checkbox"/><br>Sangat<br>Memadai     | <input type="checkbox"/><br>Memadai            | <input type="checkbox"/><br>Netral                        | <input type="checkbox"/><br>Tidak<br>Memadai     | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak<br>Memadai  |
| 74 | Kelengkapan buku perpustakaan  | <input type="checkbox"/><br>Sangat<br>Lengkap     | <input type="checkbox"/><br>Lengkap            | <input type="checkbox"/><br>Cukup<br>Lengkap              | <input type="checkbox"/><br>Tidak<br>Lengkap     | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak<br>Lengkap  |
| 75 | Buku di perpustakaan memadai dibanding dengan jumlah siswa   | <input type="checkbox"/><br>Sangat<br>Memadai     | <input type="checkbox"/><br>Memadai            | <input type="checkbox"/><br>Netral                        | <input type="checkbox"/><br>Tidak<br>Memadai     | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak<br>Memadai  |
| 76 | Apakah menurut anda guru sesuai bidang keahlian guru dengan mata pelajaran yang diajarkan  | <input type="checkbox"/><br>Sangat Sesuai         | <input type="checkbox"/><br>Sesuai             | <input type="checkbox"/><br>Netral                        | <input type="checkbox"/><br>Tidak Sesuai         | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak<br>Sesuai   |
| 77 | Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh guru   | <input type="checkbox"/><br>Sangat Sering         | <input type="checkbox"/><br>Sering             | <input type="checkbox"/><br>Kadang-<br>Kadang             | <input type="checkbox"/><br>Jarang               | <input type="checkbox"/><br>Tidak Pernah             |
| 78 | Bapak/Ibu guru memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran  | <input type="checkbox"/><br>Sangat Sering         | <input type="checkbox"/><br>Sering             | <input type="checkbox"/><br>Kadang-<br>Kadang             | <input type="checkbox"/><br>Jarang               | <input type="checkbox"/><br>Tidak Pernah             |
| 79 | Kemampuan Bapak/Ibu dalam berbahasa Inggris  | <input type="checkbox"/><br>Sangat<br>Mampu       | <input type="checkbox"/><br>Mampu              | <input type="checkbox"/><br>Cukup<br>Mampu                | <input type="checkbox"/><br>Tidak<br>Mampu       | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak<br>Mampu    |
| 80 | Tingkat kedisiplinan guru yang ada disekolah   | <input type="checkbox"/><br>Sangat<br>Disiplin    | <input type="checkbox"/><br>Disiplin           | <input type="checkbox"/><br>Cukup<br>Disiplin             | <input type="checkbox"/><br>Tidak<br>Disiplin    | <input type="checkbox"/><br>Sangat Tidak<br>Disiplin |
| 81 | Motivasi/semangat belajar anda sekolah di sekolah RSBI   | <input type="checkbox"/><br>Sangat<br>Semangat    | <input type="checkbox"/><br>Semangat           | <input type="checkbox"/><br>Cukup                         | <input type="checkbox"/><br>Tidak<br>Semangat    | <input type="checkbox"/><br>Tidak Pernah             |
| 82 | Insentif/penghargaan bagi siswa berprestasi  | <input type="checkbox"/><br>Sangat Sering         | <input type="checkbox"/><br>Sering             | <input type="checkbox"/><br>Cukup                         | <input type="checkbox"/><br>Kadang-<br>Kadang    | <input type="checkbox"/><br>Tidak Pernah             |



## Wawancara

### **Persepsi Guru Tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggraan Rintisan sekolah Bertaraf Internasional Di SMPN 1 Serang, Provinsi Banten**

#### **A. Pejabat di lingkungan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama**

1. Apakah yang melandasi dikeluarkannya kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) ?

Dasar kebijakan kita adalah Undang –Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 50 menyatakan bahwa: ayat 3 “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional”.

2. Pihak/lembaga mana sajakah yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan RSBI ?

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan Sekolah RSBI.

3. Bagaimana menentukan sekolah RSBI ?

Untuk menuju pada sekolah yang bertaraf internasional (SBI) pemerintah sejak tahun 2007 telah melaksanakan pembinaan pada sekolah atau satuan pendidikan rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI, yang berasal dari sekolah-sekolah yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi Sekolah Standar Nasional. Renstra sekolah bertaraf internasional membedakan SMP menjadi 4 kelompok, yaitu sekolah rintisan, sekolah potensial, sekolah standar nasional.

4. Bagaimana sumber daya kebijakan, baik yang menyangkut sumber pendanaan keuangan dan sumber daya manusia yang tersedia bagi implementasi kebijakan SMP RSBI ?

Pada dasarnya semua memiliki kapasitas dan tanggung jawab masing-masing, sudah barang tentu mereka memiliki komitmen dan kepedulian terhadap pendidikan di daerahnya masing-masing. Untuk pendanaan sudah diatur dalam anggaran pemerintah untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

5. Bagaimana pengawasan implementasi kebijakan SMP RSBI ?

Dengan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, yakni Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kab/Kota.

6. Bagaimana Sosialisasi RSBI dan dalam bentuk apa ?

Pemerintah melakukan sosialisasi dalam bentuk training atau pelatihan kepada kepala sekolah dan guru.

7. Hambatan atau kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan SMP RSBI ?

Kendala yang dihadapi masih kurangnya komitmen dari beberapa daerah dalam mendukung SMP RSBI, terutama dalam pendanaan. Kendala lainnya adalah kesiapan SDM dilapangan utamanya dalam menyelenggaraan SMP RSBI ini menuntut sekolah guru-gurunya harus S2. Sementara disekolah sebagian gurunya belum S2.

8. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut ?

Yang kita lakukan adalah terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat untuk dapat menyediakan dana pendamping. Koordinasi dengan sekolah juga kita lakukan agar dapat menyiapkan tenaga gurunya menjadi S2.



## Wawancara

### **Persepsi Guru Tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggraan Rintisan sekolah Bertaraf Internasional Di SMPN 1 Serang, Provinsi Banten**

#### **B. Kepala Sekolah SMPN 1 Serang, Provinsi Banten**

1. Bagaimana sosialisasi RSBI dari pemerintah pusat? Dan dalam bentuk apa? Pemerintah sering melakukan sosialisasi, melalui training atau pelatihan namun tidak adanya sosialisasi yang berkesinambungan dan secara kontinyu.
2. Apakah semua guru telah mengikuti sosialisasi? Untuk mengikuti sosialisasi, belum semua guru mengikuti tapi sudah lebih dari 50 %, biasanya mengikuti kegiatan workshop.
3. Bagaimana sosialisasi RSBI dari pemerintah propinsi? Dan dalam bentuk apa? Dinas pendidikan jarang melakukan sosialisasi kepada sekolah, bahkan yang melakukan para guru mensosialisasikan ke sekolah-sekolah dasar atau SD.” Sekolah mengadakan melalui sosialisasi secara langsung maupun surat kabar atau Koran..”
4. Bagaimana sosialisasi RSBI dari pemerintah kota? Dan dalam bentuk apa? Dinas pendidikan kota/kabupaten juga sangat jarang mengadakan sosialisasi, biasanya hanya dari pusat keguru dan kepala sekolah dan dari kepala sekolah dan guru mengsosialisasikan ke sekolah

5. Bahasa yang digunakan oleh narasumber, apakah bisa dipahami?  
Selama kegiatan sosialisasi bahasa yang digunakan oleh narasumber cukup jelas dan mudah dimengerti.
6. Tingkat pemahaman guru terhadap RSBI?  
Untuk pemahaman guru mengenai kegiatan atau penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional cukup jelas.
7. Jumlah guru dalam pelaksanaan RSBI, apakah sesuai dengan rombongan belajar?  
.Jumlah guru dibanding dengan rombongan belajar baik dengan arti bahwa jumlah guru yang ada di SMP ini memenuhi syarat dalam kegiatan pembelajaran RSBI.
8. Apakah sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka?  
Kesesuaian bidang keahlian guru termasuk sesuai karena di sekolah kami ini, guru mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Guru lulusan matematika mengajar matematika.
9. Apakah guru, misalnya matematika mengajar kelas 1 dan juga kelas 2?  
Ya, disini guru mengajar dari kelas 1 sampai kelas 3 misal, ini agar jam mengajar guru memenuhi peraturan, karena jika hanya mengajar kelas satu maka jam mengajarnya atau tugas mengajarnya akan kurang dari 24 jam dalam seminggu.
10. Tingkat kedisiplinan gurunya?  
Guru-guru di sekolah kami ini Alhamdulillah memiliki tingkat disiplin dan integritas yang tinggi termasuk ketepatan waktu atau kehadiran.

11. Apakah jumlah kelasnya memenuhi atau sesuai dengan rombongan belajarnya?

Jumlah kelas di sekolah ini memadai, artinya bahwa tidak terjadi kekurangan ruangan untuk belajar.

12. Bagaimana dengan ketersediaan dananya?

Dana dari pemerintah pusat memadai karena sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada awalnya sekolah menerima dari pemerintah sebesar 400 juta.

13. Kalau dari pemerintah propinsi bagaimana?

Dana dari propinsi seharusnya 30 %, tapi tidak jalan hanya kemampuan mereka, dari propinsi seharusnya 240 juta tapi propinsi hanya memberi 100 juta. Artinya bahwa dana dari propinsi tidak seseuai dengan ketentuan tau tidak memadai.

14. Kalau dari pemerintah kota bagaimana?

Dana dari propinsi seharusnya 20 %, tapi tidak jalan bahkan sampai sekarang pemerintah kota tidak member bantuan dana sedikit pun, dari kota/kabupaten tidak seseuai dengan ketentuan atau tidak memadai jadi ketersediaan dana cenderung tidak memadai, bantuan dana dari propinsi dan kota/kabupaten tidak memadai hanya dari pemerintah pusat yang memadai.

## Wawancara

### **Persepsi Guru Tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rintisan sekolah Bertaraf Internasional Di SMPN 1 Serang, Provinsi Banten**

#### **C. Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota**

1. Bagaimana menentukan sekolah RSBI ?

Melalui Perivikasi yang dilakukan pemerintah pusat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menentukan sekolah mana yang telah siap untuk melaksanakan program RSBI. Renstra sekolah bertaraf internasional membedakan SMP menjadi 4 kelompok, yaitu sekolah rintisan, sekolah potensial, sekolah standar nasional.

2. Pihak/lembaga mana sajakah yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan RSBI ?

Pemerintah Pusat, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan Sekolah RSBI.

3. Bagaimana sumber daya kebijakan, baik yang menyangkut sumber pendanaan keuangan dan sumber daya manusia yang tersedia bagi implementasi kebijakan SMP RSBI ?

Untuk daerah Sumber Daya manusia memang masih banyak yang belum memenuhi kriteria S2 yang harusnya dalam penyelenggaraan SMP RSBI satu sekolah minimal 20%. Untuk pendanaan sudah diatur dalam anggaran pemerintah untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

4. Bagaimana pengawasan implementasi kebijakan SMP RSBI ?

Dengan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, yakni Pemerintah Pusat dan Dinas Kab/Kota.

5. Bagaimana Sosialisasi RSBI dan dalam bentuk apa ?

Melakukan sosialisasi dalam bentuk training atau pelatihan kepada kepala sekolah dan guru.

6. Hambatan atau kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan SMP RSBI ?

Tidak adanya

Kurangnya dana yang tersedia sangat menghambat dalam implementasi kebijakan RSBI dan Sumber Daya Manusia masih banyak yang kurang, harusnya guru-guru SMP RSBI berpendidikan S2.

7. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut ?

Yang kita lakukan adalah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk dapat menyediakan dana agar dapat menyiapkan tenaga guru yang sesuai dengan kriteria SMP RSBI.

